

**FAKTOR DETERMINAN KEMISKINAN
DI PROVINSI GORONTALO**



TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi
pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Oleh:

ARIFIN SUAIB
NPM: 0606036850

**MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA**

DEPOK, 2008

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Arifin Suaib
Tempat/tanggal lahir : Tibawa Kab. Gorontalo/25 Juli 1974
NPM : 0606036850
Judul Tesis : Faktor Determinan Kemiskinan
di Provinsi Gorontalo

Depok, 3 Januari 2008

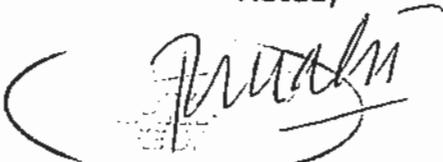
Menyetujui
Pembimbing



(Dr. Ir. Anton Hendranata)
NUP. 06.005000.53

Mengetahui :
Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Ketua,



(Dr. B. Raksaka Mahi)
NIP. 131.923.199

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui perubahan tingkat kemiskinan dan ketimpangan serta mendeskripsikan kondisi kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2006, membandingkan perubahan tingkat kesejahteraan kelompok penduduk termiskin dengan kelompok penduduk yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi, serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan kemiskinan dan tingkat pengaruhnya terhadap kemiskinan rumah tangga di Provinsi Gorontalo. Identifikasi faktor determinan kemiskinan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan serta pengentasan kemiskinan yang lebih terarah dan mencapai sasaran secara tepat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Susenas Kor Provinsi Gorontalo Tahun 2002, 2005, 2006, dan data Podes SE2006 Provinsi Gorontalo yang dikumpulkan oleh BPS. Analisis data menggunakan Index Foster-Greer-Thorbecke (FGT), Koefisien Gini dan Kurva Lorenz, Growth Incidence Curve, dan Metode Logit. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software Stata SE 8.2 for Windows dan EViews 5 Enterprise Edition.

Hasil pendugaan model logistik kemiskinan rumah tangga di perdesaan menunjukkan bahwa faktor determinan kemiskinan terdiri dari jarak ke ibukota kabupaten/kota, fasilitas jalan raya, kerawanan terhadap bencana alam, akses terhadap lembaga pendidikan keterampilan, kerawanan terhadap perkelahian massal, jumlah anggota keluarga, rasio ketergantungan, usia kepala rumah tangga (KRT), angka partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan KRT (petani informal, buruh tani informal, dan pembantu rumah tangga), akses terhadap kredit usaha, karakteristik perumahan, keluhan kesehatan, pendidikan (pendidikan KRT, rasio anggota rumah tangga (ART) dewasa lulusan SMP atau lebih rendah, Angka Partisipasi SD, dan Angka Partisipasi SMP), serta fasilitas buang air besar. Sedangkan pada pendugaan model logistik kemiskinan rumah tangga di perkotaan menunjukkan faktor determinan kemiskinan yang lebih sedikit yakni jarak ke ibukota kabupaten/kota, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap lembaga pendidikan keterampilan, jumlah anggota keluarga, rasio ketergantungan, jenis kelamin KRT, angka partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan KRT (petani informal, sektor perikanan, dan pedagang informal), karakteristik perumahan (berdinding bambu atau luas lantai per ART kurang dari 8 m²), dan pendidikan KRT.

KATA PENGANTAR

Gorontalo adalah sebuah daerah kecil dengan penduduk kurang dari sejuta jiwa, tetapi memiliki nyali besar untuk berdiri sebagai provinsi sendiri atas nama kesejahteraan rakyatnya. Berbagai prestasi dalam pengelolaan pemerintahan dibawah pimpinan Gubernur Fadel Muhammad mengharumkan nama Gorontalo sehingga menjadi rujukan pemerintah daerah lainnya. Walaupun demikian Provinsi Gorontalo sebenarnya masih berada pada suatu lingkaran masalah yang cukup berat yakni kemiskinan dan ketimpangan.

Untuk membuat semua pihak tetap memberi perhatian yang serius terhadap permasalahan yang ada dan tidak larut dalam romantika prestasi yang dicapai maka melalui penelitian ini saya berusaha menggambarkan kondisi kemiskinan dan ketimpangan yang selama ini agak kurang ditemukan pada publikasi media atau publikasi resmi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Analisis utama penelitian ini dikembangkan pada identifikasi faktor determinan kemiskinan.

Dalam bayangan kesulitan memilih topik ini, syukur Alhamdulillah saya beroleh kekuatan dan kesehatan untuk melakukan rangkaian usaha maksimal sehingga pada akhirnya tesis tentang kemiskinan ini bisa dirampungkan. Saya sadar benar bahwa peran Bapak Dr. Ir. Anton Hendranata sebagai pembimbing sekaligus dosen Mata Kuliah Ekonometrika Terapan, sangat besar artinya dalam penulisan tesis ini. Gaya humoris dan suasana akrab yang beliau ciptakan meruntuhkan mitos "Ekonometrika adalah matakuliah tersulit" dan semua itu telah mengantarkan tesis ini untuk memenuhi standar ilmiah yang dipersyaratkan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau.

Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Jossy P. Moeis serta Pimpinan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI. Melalui beliau saya dapat mengakses data-data kemiskinan di LPEM yang menjadi input penting dalam tesis ini selain data yang saya peroleh langsung dari BPS Pusat. Beliau bersama Ibu Dr. Vivi Yulaswati juga berjasa meletakkan dasar-dasar analisis dan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui kuliah Kemiskinan, Pemerataan dan Kebijakan Publik. Terima kasih pula patut disampaikan kepada seluruh dosen saya di MPKP FEUI yang tidak sempat disebutkan satu per satu.

Terima kasih paling istimewa saya persembahkan untuk istri tercinta, Khadijah serta kedua putri buah hati kami Ahdiyaty dan Asriyaty. Pengorbanan, doa dan kesabaran mereka menjadi hiasan terindah keluarga kami, termasuk ketika harus dipisahkan oleh lautan selama saya menempuh pendidikan di MPKP FEUI. Dan akhirnya saya bisa menjawab dengan pasti, kapan kami kembali berkumpul bersama. Juga kepada almarhum ayahanda Suaib Ali dan ibunda Rina Ahmad, adik-adik saya serta seluruh kerabat yang turut mendoakan kesuksesan saya.

Tidak cukup ruang untuk menuliskan semua pihak yang telah turut berjasa selama saya kuliah. Kepada mereka juga saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Beberapa diantaranya adalah :

1. Pimpinan dan Staf Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (PUSBINDIKLATREN) BAPPENAS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, sebagai pemberi beasiswa.
2. Pimpinan dan staf administrasi akademik MPKP FEUI.
3. Pimpinan dan staf Direktorat Diseminasi Statistik BPS Pusat; Pimpinan dan staf BPS Provinsi Gorontalo; serta Pimpinan dan staf BAPPPEDA Provinsi Gorontalo.
4. Teman-teman anggota Salemba Study Group (SSG) : Rizky; Maman; Uun; Willy; Irban; Aan; Renal; Bustamil Hinta, MH; Syaiful Maksum, M.T; Suprisno Baderan, M.Si; Moh. Husein Mohi, M.Si; Dr. Razak Umar, S.Ag.; Dr. Lukman A.R. Laliyo, M.Pd,M.M; Dr. Lukman Arsyad; Dr. Ismail Puh; Dr. Hamzah Ahmad; Dr. Ayuba Pantu; dan Dr. Syamsu Qamar Badu.
5. Para mentor SSG : Bapak Ir. Hengky Uno; Bapak Ir. Ary Mochtar Pedju, M.Arch; dan Bapak Dr. Bakri Arbie.
6. Pimpinan dan rekan kerja di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Daerah Kabupaten Gorontalo; Badan Pengawasan Daerah; Kantor Camat Tolinggula; dan PT. Isimu Utama Raya.
7. Teman-teman alumni MPKP Angkatan XV Pagi Salemba.

Akhirnya, ditengah perdebatan alot tentang pilihan metode analisis kemiskinan yang lebih mendekati realitas, maka tidak mungkin bagi saya untuk menyajikan analisis yang benar-benar sempurna. Selain itu berbagai keterbatasan teknis dapat saja ditemui di dalam penulisan tesis ini. Untuk itu saya berharap kiranya dapat dilakukan studi-studi lanjutan yang dapat menyempurnakan metode dan hasil analisa tentang kemiskinan, khususnya di Provinsi Gorontalo. Walaupun demikian saya tetap berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi para pengambil kebijakan di Provinsi Gorontalo.

Depok, 3 Januari 2008

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xii
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penulisan Tesis	12
1.4. Hipotesis	12
1.5. Manfaat Penelitian	13
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II Tinjauan Pustaka	
2.1. Pengertian Kemiskinan dan Ketimpangan	15
2.2. Pengukuran Kemiskinan, Ketimpangan dan Kerentanan	19
2.2.1. Indikator kemiskinan	21
2.2.2. Garis Kemiskinan	26
2.2.3. Ukuran Kemiskinan	30
2.2.4. Kerentanan	31
2.2.5. Ketimpangan	33
2.3. Faktor Determinan Kemiskinan	33
2.4. Penanggulangan Kemiskinan	36
2.5. Pembangunan Pro Poor	39
2.6. Studi Sejenis	41
BAB III Data dan Metodologi	
3.1. Jenis dan Dumber Data	44
3.2. Ruang Lingkup dan Pemanfaatan Data	45
3.3. Metode Analisis	47

3.3.1. Indeks Foster-Greer-Thorbecke (FGT)	48
3.3.2. Kurva Lorenz dan Koefisien Gini	52
3.3.3. Growth Incidence Curve	53
3.3.4. Model Logit	55
BAB IV Deskripsi Umum Wilayah Penelitian	
4.1. Kondisi Geografis dan Karakteristik Pertanian	64
4.2. Dinamika Sosial Budaya dan Demografi	67
4.3. Kondisi Ekonomi	69
4.4. Aspek Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan	71
BAB V Faktor Determinan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo	
5.1. Kondisi Kemiskinan, Ketimpangan dan Perubahan Distribusi Pendapatan	73
5.1.1. Indeks Kemiskinan	73
5.1.2. Karakteristik Umum Penduduk Miskin	76
5.1.3. Ukuran Ketimpangan Pendapatan	80
5.1.4. Distribusi Perubahan Tingkat Kesejahteraan	82
5.2. Faktor-Faktor Determinan dan Tingkat Pengaruhnya terhadap Kemiskinan	84
5.2.1. Faktor Determinan Kemiskinan pada Daerah Gabungan Perdesaan dan Perkotaan	87
5.2.2. Faktor Determinan Kemiskinan pada Daerah Perdesaan	112
5.2.3. Faktor Determinan Kemiskinan pada Daerah Perkotaan	116
BAB VI Penutup	
6.1. Kesimpulan	122
6.2. Rekomendasi Kebijakan	125
Daftar Pustaka	127
Lampiran	131

DAFTAR TABEL

Tabel	1. 1	Perkembangan Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1976 – 2007	4
Tabel	1. 2	Distribusi Penduduk Miskin Per Provinsi di Indonesia Tahun 2004	6
Tabel	1. 3	Garis Kemiskinan Per Provinsi di Indonesia Tahun 2004	7
Tabel	2. 1	Perbandingan Pendapatan dan Konsumsi sebagai Indikator Kemiskinan	22
Tabel	3. 1	Sebaran Sampel Data Susenas 2002, 2005, 2006, dan Podes SE2006 Provinsi Gorontalo	46
Tabel	3. 2	Definisi Variabel Operasional	57
Tabel	4. 1	Rincian Luas Lahan di Provinsi Gorontalo Berdasarkan Kemiringan Tahun 2005	65
Tabel	4. 2	Rincian Luas Lahan di Provinsi Gorontalo Berdasarkan Ketinggian Tahun 2005	65
Tabel	4. 3	Rincian Penggunaan Lahan di Provinsi Gorontalo Tahun 2005	66
Tabel	4. 4	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Km ² Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2005	67
Tabel	4. 5	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Gorontalo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 Atas Dasar Harga Konstan 2000	70
Tabel	4. 6	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha/Sektor di Provinsi Gorontalo Tahun 2005	70
Tabel	5. 1	Indeks Foster Greer Thorbecke Provinsi Gorontalo Tahun 2002 dan 2006	75
Tabel	5. 2	Indeks Foster Greer Thorbecke Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2002 dan 2006	75
Tabel	5. 3	Distribusi Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2006	76

Tabel	5.4	Nilai Rata-rata Konsumsi Total, Konsumsi Makanan, Konsumsi Non Makanan dan Proporsi Konsumsi Makanan terhadap Konsumsi Total Per Kuintil Masyarakat Miskin di Provinsi Gorontalo Tahun 2006	77
Tabel	5.5	Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Menurut Jenis Pekerjaan Utama	78
Tabel	5.6	Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Menurut Klasifikasi Wilayah dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	79
Tabel	5.7	Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo Tahun 2005 Menurut Status Keluhan Kesehatan	79
Tabel	5.8	Koefisien Regresi, Probabilitas dan Odd Ratio Model Logit Kemiskinan Tahap Pertama di Provinsi Gorontalo Dirinci Menurut Kategori Perdesaan, Perkotaan, serta Gabungan Perdesaan dan Perkotaan	86
Tabel	5.9	Jumlah Pelanggan PLN Per Kelompok Pelanggan di Provinsi Gorontalo s.d. Juni 2007	91
Tabel	5.10	Koefisien Regresi, Probabilitas dan Odd Ratio Model Logit Kemiskinan Tahap Kedua Gabungan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi Gorontalo ...	107
Tabel	5.11	Koefisien Regresi, Probabilitas dan Odd Ratio Model Logit Kemiskinan Tahap Kedua Daerah Perdesaan di Provinsi Gorontalo	114
Tabel	5.12	Koefisien Regresi, Probabilitas dan Odd Ratio Model Logit Kemiskinan Tahap Kedua Daerah Perkotaan di Provinsi Gorontalo	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Perkembangan Persentasi Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1976-2007	4
Gambar 1. 2	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1976-2007	5
Gambar 1. 3	Persentasi penduduk Miskin Per provinsi di Indonesia Tahun 2004	6
Gambar 1. 4	Peta Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Per Tahun Provinsi di Indonesia Tahun 2000-2004	10
Gambar 2. 1	Kategori Kemiskinan dan Kerentanan	32
Gambar 2. 2	Lingkaran Setan Kemiskinan	34
Gambar 2. 3	Segi Tiga Kemiskinan, Ketimpangan dan Pertumbuhan	41
Gambar 3. 1	Kerangka Analisis Kemiskinan	48
Gambar 3. 2	Koefisien Gini menurut Kurva Lorenz	53
Gambar 3. 3	GIC Indonesia Tahun 1996-2002	54
Gambar 4. 1	Peta Provinsi Gorontalo	64
Gambar 5. 1	Grafik Nilai Rata-rata Konsumsi Total, Konsumsi Makanan, Konsumsi Non Makanan dan Proporsi Konsumsi Makanan terhadap Konsumsi Total Per Kuintil Masyarakat Miskin di Provinsi Gorontalo Tahun 2006	78
Gambar 5. 2	Kurva Lorenz provinsi Gorontalo Tahun 2002	80
Gambar 5. 3	Kurva Lorenz Provinsi Gorontalo Tahun 2005	81
Gambar 5. 4	Kurva Lorenz Provinsi Gorontalo Tahun 2006	81
Gambar 5. 5	Kurva Lorenz Provinsi Gorontalo Gabungan tahun 2002 dan 2005	81
Gambar 5. 6	Growth Incidence Curve Provinsi Gorontalo Selang Tahun 2002 s.d. 2006	83
Gambar 5. 7	Growth Incidence Curve Rata-rata Per Tahun Provinsi Gorontalo Selang Tahun 2002 s.d. 2006 .	83

Gambar 5. 8	Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Menurut Kuintil Usia KRT ..	99
Gambar 5.9	Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Menurut Jenis Kelamin KRT	100
Gambar 5.10	Faktor Determinan Kemiskinan pada Gabungan Daerah Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi Gorontalo Menurut Tingkatan Resiko Kemiskinan .	112
Gambar 5.11	Faktor Determinan Kemiskinan pada Daerah Perdesaan di Provinsi Gorontalo Menurut Tingkatan Resiko Kemiskinan	115
Gambar 5.12	Faktor Determinan Kemiskinan pada Daerah Perkotaan di Provinsi Gorontalo Menurut Tingkatan Resiko Kemiskinan	121



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Output Program Stata Perhitungan Indeks FGT Provinsi Gorontalo Tahun 2002 dan 2006	131
Lampiran 2	Output Program Stata Perhitungan Koefisien Gini Provinsi Gorontalo Tahun 2002, 2005 dan 2006 ..	141
Lampiran 3	Output EViews Model Logit Kemiskinan Gabungan Daerah Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi Gorontalo (Model I, Variabel Yang Logis).	145
Lampiran 4	Output EViews Model Logit Kemiskinan Daerah Perdesaan Di Provinsi Gorontalo (Model I, Variabel Yang Logis)	146
Lampiran 5	Output EViews Model Logit Kemiskinan Daerah Perkotaan di Provinsi Gorontalo (Model I, Variabel Yang Logis)	148
Lampiran 6	Output EViews Model Logit Kemiskinan Gabungan Daerah Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi Gorontalo (Model II, Taraf Nyata (α) = 0,2)	149
Lampiran 7	Output EViews Model Logit Kemiskinan Daerah Perdesaan di Provinsi Gorontalo (Model II, Taraf Nyata (α) = 0,2)	150
Lampiran 8	Output EViews Model Logit Kemiskinan Daerah Perkotaan di Provinsi Gorontalo (Model II, Taraf Nyata (α) = 0,2)	151
Lampiran 9	Output EViews Expectation Prediction Table Model Logit Kemiskinan Gabungan Daerah Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi Gorontalo (Model II, Taraf Nyata (α) = 0,2 dan cut off 0,5)	152
Lampiran 10	Output EViews Expectation Prediction Table Model Logit Kemiskinan Daerah Perdesaan di Provinsi Gorontalo (Model II, Taraf Nyata (α) = 0,2 dan cut off 0,5)	153
Lampiran 11	Output EViews Expectation Prediction Table Model Logit Kemiskinan Daerah Perkotaan di Provinsi Gorontalo (Model II, Taraf Nyata (α) = 0,2 dan cut off 0,5)	154

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hampir seluruh negara di dunia menghadapi permasalahan yang sama yakni kemiskinan, baik dalam ukuran absolut maupun relatif. Oleh karena itu kemiskinan dapat dikatakan sebagai masalah global yang utamanya melanda negara-negara berkembang. Puncak mengglobalnya perang terhadap kemiskinan ditunjukkan dengan adanya kesepakatan 147 kepala negara pada Konferensi Tingkat Tinggi Milenium bulan September 2000 untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang kemudian diadopsi pula oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya hingga menjadi 189 negara. Melalui MDGs ditetapkan 8 target dan 48 indikator yang harus dicapai pada tahun 2015 dengan menggunakan indikator yang sama pada tahun 1990 sebagai basis perhitungan. Kedelapan target tersebut adalah sebagai berikut¹ : (a) Tujuan 1: *Eradicate extreme poverty and hunger* (Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan); (b) Tujuan 2: *Achieve universal primary education* (Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua); (c) Tujuan 3: *Promote gender equality and empower women* (Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan); (d) Tujuan 4: *Reduce child mortality* (Menurunkan Angka Kematian Anak); (e) Tujuan 5: *Improve maternal health* (Meningkatkan Kesehatan Ibu); (f) Tujuan 6: *Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases* (Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya); (g) Tujuan 7: *Ensure environmental sustainability* (Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup); dan (h) Tujuan 8: *Develop a Global Partnership for Development* (Membentuk Kemitraan dalam Pelaksanaan Pembangunan).

¹ UN Millennium Project (2006). *About MDGs*. Diakses 13 April 2007 dari UN Millennium Project. <http://www.unmillenniumproject.org/goals/index.htm>

Sebagai salah satu penandatanganan MDGs, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pencapaian target-target tersebut. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan menyusun Laporan MDGs yang pertama pada bulan Pebruari 2004. Penerbitan laporan tersebut sekaligus untuk menentukan posisi Indonesia tahun 1990 sebagai acuan dasar (*baseline*). Keseriusan Indonesia dalam upaya mencapai MDGs, juga ditunjukkan dengan disusunnya Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Lima strategi utama yang terkandung dalam SNPK adalah² : (a) Perluasan kesempatan; (b) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat; (c) Peningkatan kapasitas; (d) Perlindungan sosial; dan (e) Penataan kemitraan global.

Selain SNPK penanggulangan kemiskinan juga menjadi salah satu bagian penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005. Melalui Bab 16 RPJM ditetapkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan terdiri dari³: 1. Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Dasar, meliputi: pemenuhan hak atas pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan usaha, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman, dan partisipasi; 2. Kebijakan Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Pemenuhan Hak Dasar, meliputi : percepatan pembangunan perdesaan, revitalisasi pembangunan perkotaan, pengembangan kawasan pesisir, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Penetapan SNPK dan RPJM merupakan instrumen yang mempertegas kembali agenda penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak pemerintahan Orde Baru. Beberapa program yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan di Indonesia antara lain pada tahun 1974-1988 dilaksanakan BIMAS, INMAS, transmigrasi, KUK, KIK, KCK dan lain-

² Komite Penanggulangan Kemiskinan, Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (Jakarta : TKPK, 2004), hal. 86

³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Bagian IV.16-9

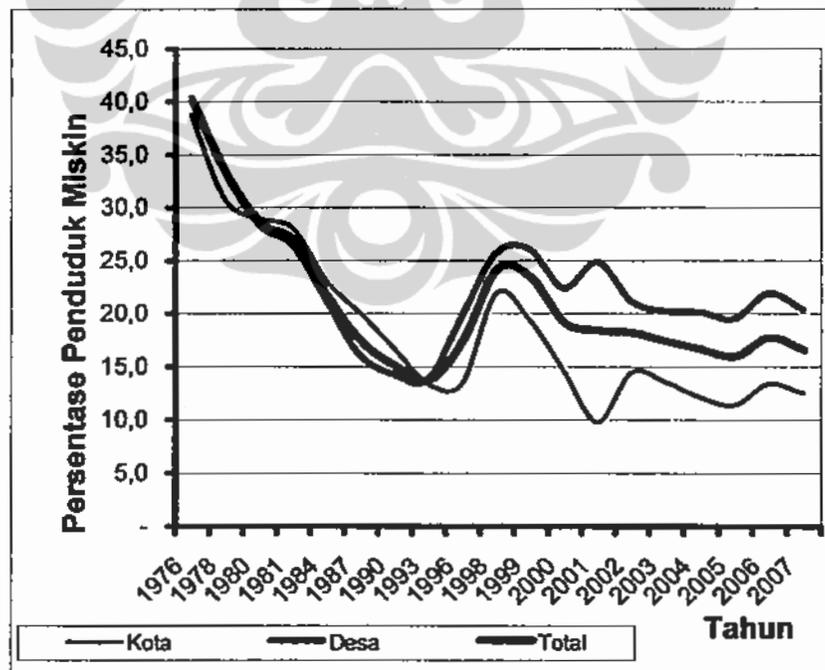
lain, pada kurun waktu tahun 1988-1997 dilaksanakan pula program antara lain Inpres Desa, Inpres Kabupaten, Inpres Jalan, Inpres Dati I, Irigasi, reboisasi dan penghijauan. Kemudian dalam rangka penanggulangan krisis ekonomi sejak tahun 1998 dilaksanakan pula Pengembangan Kawasan Terpadu (KPT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), PDMDKE, P2KP, PEMP. Pada tahun 2006 dilaksanakan Subsidi Langsung Tunai sebagai kompensasi atas kebijakan penghapusan subsidi harga bahan bakar minyak. Dan pada tahun 2007 dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bahan Bakar Nabati (BBN), dan Program Dana Amanah. PNPM merupakan perluasan dan penyempurnaan dari program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan sebelumnya, seperti PPK dan P2KP, sedangkan PKH merupakan penyempurnaan Subsidi Langsung Tunai.

Sebagai dampak dari kebijakan pembangunan, tingkat kemiskinan di Indonesia berangsur-angsur turun. Pada tahun 1976 tingkat kemiskinan sangat tinggi yakni 40,1 % atau 54,2 juta jiwa, 10,0 juta jiwa berada di perkotaan dan 44,2 juta jiwa tinggal di pedesaan.⁴ Pada Tahun 2007 menurut publikasi BPS tanggal 2 Juli 2007 tingkat kemiskinan di Indonesia berada pada level 16,58 %. Tingkat kemiskinan terendah yang pernah dicapai adalah pada tahun 1996 yakni 11,3% atau 34,5 juta jiwa, terdiri dari 9,6 juta jiwa di perkotaan dan 24,9 juta jiwa di pedesaan. Angka tersebut kembali naik menjadi 23,4 % pada tahun 1999 sebagai akibat krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Pada tahun 2006 juga terjadi kenaikan tingkat kemiskinan menjadi 17,8% dari posisi tahun sebelumnya sebesar 16,0%. Kenaikan ini diduga sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak pada periode tersebut. Perkembangan tingkat kemiskinan Indonesia selang tahun 1976-2007 dapat dilihat pada Tabel 1.1 serta Gambar 1.1 dan gambar 1.2.

Tabel 1. 1
Perkembangan Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 1976 – 2007

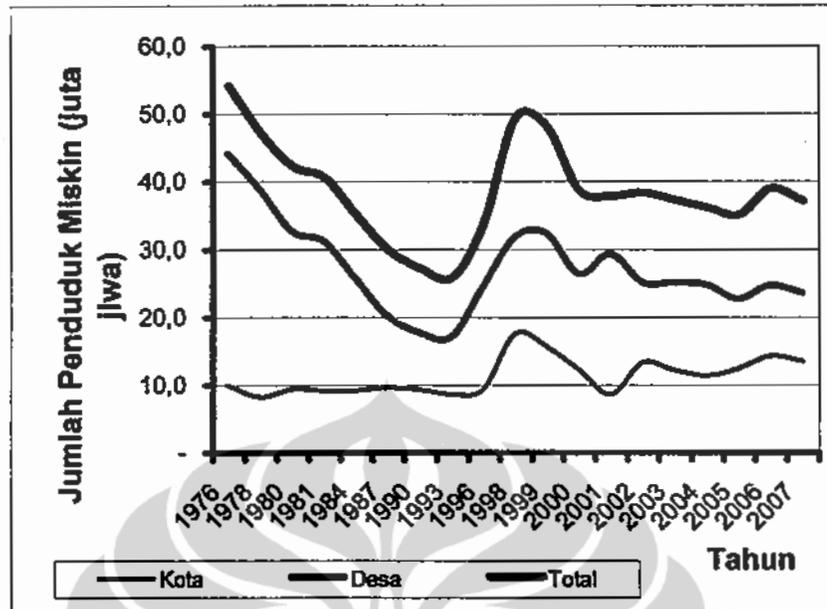
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)			Persentase Penduduk Miskin			
	Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Total	Perubahan Absolut
1976	10,0	44,2	54,2	38,8	40,4	40,1	0,0
1978	8,3	38,9	47,2	30,8	33,4	33,3	-6,8
1980	9,5	32,8	42,3	29,0	28,4	28,6	-11,5
1981	9,3	31,3	40,6	28,1	26,5	26,9	-13,2
1984	9,3	25,7	35,0	23,1	21,2	21,6	-18,5
1987	9,7	20,3	30,0	20,1	16,1	17,4	-22,7
1990	9,4	17,8	27,2	16,8	14,3	15,1	-25,0
1993	8,7	17,2	25,9	13,4	13,8	13,7	-26,4
1996	9,4	24,6	34,0	13,4	19,8	17,5	-22,6
1998	17,6	31,9	49,5	21,9	25,7	24,2	-15,9
1999	15,6	32,3	48,0	19,4	26,0	23,4	-16,7
2000	12,3	26,4	38,7	14,6	22,4	19,1	-21,0
2001	8,6	29,3	37,9	9,8	24,8	18,4	-21,7
2002	13,3	25,1	38,4	14,5	21,1	18,2	-21,9
2003	12,2	25,1	37,3	13,6	20,2	17,4	-22,7
2004	11,4	24,8	36,2	12,1	20,1	16,7	-23,4
2005	12,4	22,7	35,1	11,4	19,5	16,0	-24,1
2006	14,3	24,8	39,1	13,4	21,9	17,8	-22,4
2007	13,6	23,6	37,2	12,5	20,4	16,6	-23,5

Sumber : BPS & Buku Kemiskinan di Indonesia 2005



Gambar 1. 1
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 1976-2007

⁴ Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kemiskinan di Indonesia: Perkembangan Data dan Informasi Mutakhir (Jakarta: TKPK, 2005), hal. 7



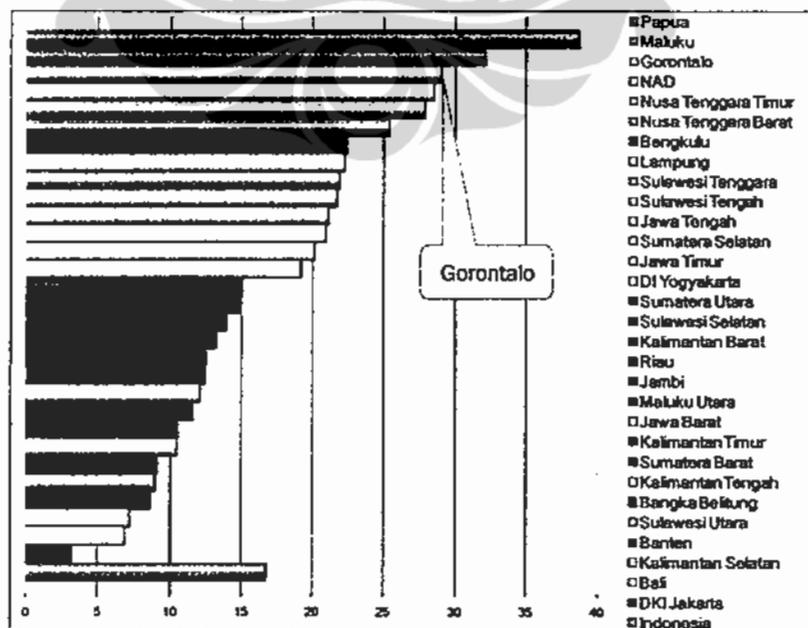
Gambar 1. 2
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
di Indonesia Tahun 1976-2007

Apabila dirinci per provinsi, maka dapat dilihat bahwa distribusi kemiskinan di Indonesia tidak merata. Perbedaan tingkat kemiskinan tersebut hampir tidak dapat dihubungkan dengan aspek region, misalnya Indonesia bagian Timur atau bagian Barat, Jawa dan luar Jawa, atau identifikasi regional lainnya. Pada tahun 2004 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Papua dengan angka 38,69 % dan yang terendah adalah DKI Jakarta 3,18. Tetapi jika yang dilihat adalah jumlah penduduk miskin, maka yang tertinggi adalah Jawa Timur yakni sebanyak 7,3 juta jiwa (20,23%), dan terendah Bangka Belitung sebanyak 91,8 ribu jiwa (0,25%). Distribusi penduduk miskin per provinsi di Indonesia tahun 2004 ditunjukkan dengan Tabel 1.2. dan Gambar 1.3.

Tabel 1. 2
Distribusi Penduduk Miskin Per Provinsi di Indonesia Tahun 2004

No.	Provinsi	Jumlah (ribu jiwa)	% terhadap Indonesia	% terhadap Provinsi
1	NAD	1.157,2	3,2	28,47
2	Sumatera Utara	1.800,1	4,98	14,93
3	Sumatera Barat	472,4	1,31	10,46
4	Riau	744,4	2,06	13,12
5	Jambi	325,1	0,9	12,45
6	Sumatera Selatan	1.379,3	3,82	20,92
7	Bengkulu	345,1	0,95	22,39
8	Lampung	1.561,7	4,32	22,22
9	Bangka Belitung	91,8	0,25	9,07
10	DKI Jakarta	277,1	0,77	3,18
11	Jawa Barat	4.654,2	12,88	12,1
12	Jawa Tengah	6.843,8	18,93	21,11
13	DI Yogyakarta	616,2	1,7	19,14
14	Jawa Timur	7.312,5	20,23	20,08
15	Banten	779,2	2,16	8,58
16	Bali	231,9	0,64	6,85
17	Nusa Tenggara Barat	1.031,6	2,85	25,38
18	Nusa Tenggara Timur	1.152,1	3,19	27,86
19	Kalimantan Barat	558,2	1,54	13,91
20	Kalimantan Tengah	194,1	0,54	10,44
21	Kalimantan Selatan	231,0	0,64	7,19
22	Kalimantan Timur	318,2	0,88	11,57
23	Sulawesi Utara	192,2	0,53	8,94
24	Sulawesi Tengah	486,3	1,35	21,69
25	Sulawesi Selatan	1.241,5	3,43	14,9
26	Sulawesi Tenggara	418,4	1,16	21,9
27	Gorontalo	259,1	0,72	29,01
28	Maluku	397,6	1,1	32,13
29	Maluku Utara	107,8	0,3	12,42
30	Papua	966,8	2,67	38,69

Sumber : Buku Kemiskinan di Indonesia 2005



Gambar 1. 3
Persentasi Penduduk Miskin Per Provinsi di Indonesia Tahun 2004

Variasi tingkat kemiskinan pada setiap provinsi wajar terjadi karena pengukurannya dilakukan dengan garis kemiskinan yang memiliki nilai berbeda pada setiap provinsi. Dengan demikian penduduk yang dikategorikan miskin pada suatu provinsi belum tentu masuk pada kategori miskin juga pada provinsi lainnya, dan sebaliknya penduduk yang termasuk kategori tidak miskin dapat saja dikategorikan miskin jika menggunakan garis kemiskinan provinsi lain yang lebih tinggi. Garis kemiskinan Provinsi di Indonesia Tahun 2004 ditunjukkan dengan Tabel 1.3.

Tabel 1. 3
Garis Kemiskinan Per Provinsi di Indonesia Tahun 2004

No.	Provinsi	Desa	Kota
1	NAD	137.440	129.615
2	Sumatera Utara	114.214	122.414
3	Sumatera Barat	128.610	144.704
4	Riau	164.921	179.589
5	Jambi	117.428	129.805
6	Sumatera Selatan	108.457	124.353
7	Bengkulu	102.335	115.569
8	Lampung	108.611	117.135
9	Bangka Belitung	143.114	151.243
10	DKI Jakarta	197.306	197.306
11	Jawa Barat	122.475	137.929
12	Jawa Tengah	116.998	126.651
13	DI Yogyakarta	114.671	134.371
14	Jawa Timur	119.405	127.524
15	Banten	115.988	133.534
16	Bali	136.166	147.617
17	Nusa Tenggara Barat	99.686	116.145
18	Nusa Tenggara Timur	94.886	102.695
19	Kalimantan Barat	103.400	118.838
20	Kalimantan Tengah	128.382	134.374
21	Kalimantan Selatan	111.821	121.879
22	Kalimantan Timur	170.296	165.755
23	Sulawesi Utara	132.207	136.470
24	Sulawesi Tengah	116.373	124.133
25	Sulawesi Selatan	107.309	109.979
26	Sulawesi Tenggara	108.260	111.018
27	Gorontalo	94.889	103.247
28	Maluku	135.425	131.654
29	Maluku Utara	129.442	124.713
30	Papua	154.905	135.558

Sumber : Buku Kemiskinan di Indonesia 2005

Provinsi Gorontalo sebagai salah satu provinsi baru yang di mekarkan dari Sulawesi Utara pada tahun 2000, menduduki peringkat ke-3 tingkat kemiskinan tertinggi setelah Papua dan Maluku dengan angka 29,01% atau 259,1 ribu jiwa pada tahun 2004. Jumlah tersebut adalah 0,72% dari total penduduk miskin Indonesia yang berjumlah 36,15 juta jiwa. Bila dibandingkan dengan peringkat provinsi induknya Sulawesi Utara maka Gorontalo terpaut sangat jauh. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara berada pada 8,94% dan merupakan peringkat ke-5 terendah.

Walaupun angka 29,01% menunjukkan penurunan 0,82% dari persentasi penduduk miskin tahun 2003 sebesar 29,25% tetapi penurunan tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2004 yang menunjukkan kenaikan sebesar 6,93%. Angka kemiskinan tersebut berarti hanya 70,99% penduduk Gorontalo yang mampu mencapai tingkat kehidupan yang layak pada tahun 2004.

Kemiskinan di Provinsi Gorontalo Tahun 2004 diukur dengan garis kemiskinan Rp. 94.889 di perkotaan dan Rp. 103.247 di pedesaan. Sedangkan garis kemiskinan nasional adalah Rp. 108.725 untuk pedesaan dan Rp. 122.775 untuk perkotaan. Dengan demikian jika garis kemiskinan nasional digunakan untuk mengukur kemiskinan di Gorontalo maka tingkat kemiskinan akan lebih tinggi. Garis kemiskinan Provinsi Gorontalo merupakan peringkat ke-2 terendah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat di Provinsi Gorontalo relatif berada pada posisi jauh dibawah tingkat konsumsi provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Melihat tingginya tingkat kemiskinan tersebut maka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo memerlukan perhatian yang lebih khusus dari pemerintah. Walaupun penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab semua komponen dalam masyarakat bangsa dan negara Indonesia, tetapi pemerintah diberi amanah yang lebih besar oleh konstitusi negara untuk mencapai

kondisi dimana masyarakat dapat menikmati kehidupan yang sejahtera, berkeadilan sosial dan bermartabat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa cita-cita nasional antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan sila ke-5 dari dasar negara Pancasila juga menghendaki adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan kehendak Pancasila dan UUD 1945 maka kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilhami dengan semangat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Kedua UU tersebut menggantikan 2 UU sebelumnya yakni UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999.

Dengan otonomi daerah maka Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri alokasi anggaran sesuai kebutuhan masyarakat setempat, karena yang lebih memahami kebutuhan masyarakat adalah pemerintah di tingkat bawah. Disamping itu kebijakan otonomi daerah juga memungkinkan pembentukan provinsi baru untuk mendekatkan pelayanan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Semangat otonomi daerah tersebut melahirkan Provinsi Gorontalo melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000.

Dengan semangat sebagai provinsi baru, Gorontalo berhasil memacu pertumbuhan ekonomi hingga mencapai rata-rata 6,69% per tahun dalam periode 2001-2006. Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, Gorontalo termasuk dalam 3 Provinsi yang mencapai pertumbuhan rata-rata diatas 6% pada periode 2000-2004.



Gambar 1. 4
Peta Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Per Tahun
Provinsi di Indonesia Tahun 2000-2004

Rangkaian penyelenggaraan pemerintahan yang digambarkan di atas sebenarnya bermuara pada sebuah harapan mewujudkan mekanisme penyelenggaraan kebijakan publik yang efektif untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara merata. Penyelenggaraan kebijakan publik yang efektif dapat dimaksimalkan melalui pengenalan terhadap akar permasalahan yang sesungguhnya. Maka dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengenalan terhadap faktor determinan yang menjadi penyebab kemiskinan serta karakteristik kemiskinan menjadi penting artinya sebagai referensi bagi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Beberapa karakteristik penduduk miskin diungkapkan oleh Todaro⁵ bahwa penduduk miskin pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian baik sebagai buruh tani (*sharecroppers*) maupun sebagai petani penyewa lahan (*tenant farmers*). Sistem pertanian masyarakat pedesaan biasanya bersifat *subsisten* dalam arti bahwa tujuan utama dari kegiatan usahanya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bukan untuk tujuan komersil. Disamping itu keluarga miskin cenderung menambah jumlah anak karena anak dianggap sebagai

⁵ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan Jilid 1*, terj. Haris Munandar dan Puji A.L. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004) hal. 255

tenaga kerja murah untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan sandaran hari tua, tetapi kenyataannya jumlah anak atau anggota rumah tangga yang banyak mengakibatkan tingginya beban ketergantungan yang pada gilirannya justru meningkatkan kemiskinan. Kondisi kemiskinan yang semakin meningkat memaksa keluarga untuk mempekerjakan anak-anak walaupun belum mencapai usia kerja. Kondisi tersebut juga memperparah kemiskinan dan menghilangkan kesempatan anak-anak untuk memperoleh pendidikan dan mencapai taraf hidup yang lebih baik. Disamping anak-anak, kemiskinan juga didominasi oleh kaum wanita. Hal ini terjadi karena tingginya kegagalan perempuan dalam mengakses pasar tenaga kerja sebagai akibat dari pasar tenaga kerja yang bias gender.

1.2. Rumusan Masalah

Kecenderungan data-data kemiskinan di Provinsi Gorontalo mengisyaratkan bahwa upaya mengentaskan kemiskinan bukanlah hal yang sederhana. Sebagai sebuah penyakit sosial multidimensional maka dibutuhkan diagnosa yang tepat guna memutuskan kebijakan yang efisien dan efektif. Untuk itu pemahaman secara mendalam terhadap faktor-faktor determinan kemiskinan menjadi salah satu faktor penentu berhasil tidaknya kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan. Selain itu pola kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak dapat secara langsung digeneralisir, karena faktor-faktor yang berpengaruh antara suatu daerah dengan daerah lain memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kajian terhadap kemiskinan harus diarahkan pada ruang lingkup yang lebih spesifik, misalnya dalam region yang lebih sempit dan pendekatan mata pencaharian.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian tesis ini diformulasikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Berapa besar perubahan ukuran kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi Gorontalo?

- b. Apakah distribusi perubahan tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Gorontalo menguntungkan penduduk miskin?
- c. Apa saja faktor-faktor determinan kemiskinan dan tingkat pengaruhnya terhadap resiko kemiskinan rumah tangga di Provinsi Gorontalo?

1.3. Tujuan Penulisan Tesis

Tesis ini bermaksud memberikan jawaban secara ilmiah terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada permasalahan di atas. Untuk itu tujuan penulisan tesis ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mengetahui perubahan tingkat kemiskinan dan ketimpangan serta mendeskripsikan kondisi kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2006.
- b. Membandingkan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk yang relatif lebih miskin dengan penduduk yang relatif lebih kaya.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor determinan kemiskinan dan tingkat pengaruhnya terhadap resiko kemiskinan rumah tangga di Provinsi Gorontalo.

1.4. Hipotesis

Untuk memberikan jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan pada permasalahan penelitian maka dugaan awal ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo tahun 2006 tidak mengalami perubahan yang besar terhadap tingkat kemiskinan pada tahun 2002.
- b. Distribusi perubahan tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Gorontalo tidak menguntungkan penduduk miskin.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Gorontalo terdiri dari:
 - tingkat *dependency ratio*, berpengaruh positif terhadap kemiskinan

- akses kepemilikan/penguasaan lahan pertanian, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan
- status kepemilikan rumah, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan
- sumber penghasilan utama keluarga, jika bekerja pada sektor pertanian maka kemungkinan menjadi miskin lebih besar
- semakin rendah tingkat pendidikan kepala keluarga maka peluang menjadi miskin semakin besar
- jika tinggal di perdesaan maka kemungkinan menjadi miskin lebih besar
- jika kepala keluarga adalah perempuan maka peluang menjadi miskin lebih besar
- disamping itu masih terdapat beberapa karakteristik kemiskinan lain pada level regional, masyarakat, rumah tangga dan individu yang juga berpengaruh terhadap kemiskinan, baik pengaruh positif maupun negatif.

1.5. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberi kontribusi terhadap penyediaan kajian data dan informasi karakteristik kemiskinan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo
- b. Memberi kontribusi terhadap pengembangan keilmuan, khususnya kajian dan penelitian tentang kemiskinan

1.6. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tesis secara sistematis terdiri dari 6 Bab. Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan ringkas tentang alur pikir penelitian, khususnya menyangkut urgensi permasalahan yang diteliti, serta manfaat penelitian. Bab ini penting

untuk memberikan pengantar untuk memahami permasalahan yang diteliti.

Pada Bab II dengan judul Kajian Literatur, akan menjelaskan secara teoritis tentang pengertian kemiskinan, pengukuran kemiskinan, faktor determinan kemiskinan, pembangunan pro poor dan penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Bagian ini memberikan pemahaman teoritis tentang konsep dan asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam memahami dan menganalisa permasalahan pokok.

Bab III Data dan Metodologi, berisi penjelasan tentang data yang digunakan, batasan variabel dan metode analisis. Bagian ini juga memberikan gambaran tentang proses serta alat analisis yang digunakan.

Bab IV Deskripsi Umum Wilayah Penelitian, memberikan penjelasan ringkas tentang kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat Provinsi Gorontalo. Pentingnya bab ini adalah untuk memahami hubungan empiris kemiskinan dengan kecenderungan-kecenderungan sosial budaya, ekonomi dan historis di Provinsi Gorontalo.

Hasil penelitian akan disajikan pada Bab V dengan judul Faktor Determinan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Bab V merupakan bagian yang paling penting dari penelitian. Isi bab ini meliputi data, hasil analisa dan interpretasi tentang kondisi dan ukuran kemiskinan, ketimpangan dan distribusi perubahan tingkat kesejahteraan, dan faktor-faktor determinan yang berhubungan dengan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Bab ini sekaligus menguji kebenaran hipotesa yang ditetapkan pada Bab I.

Bagian akhir adalah Bab VI Penutup, berisi kesimpulan berupa poin-poin inti dari pembahasan pada Bab V, dan rekomendasi kebijakan yakni berupa implikasi kebijakan yang perlu diambil sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang bersifat multi dimensional. Pemahaman terhadap kemiskinan tergantung pada pendekatan atau perspektif yang digunakan. Oleh karena itu pendefinisian kemiskinan sangat beraneka ragam, mulai dari definisi yang sederhana sekedar sebagai keterbatasan-keterbatasan yang bersifat ekonomi sampai definisi yang memasukkan komponen-komponen non ekonomi seperti aspek moral, sosial, politik dan budaya.

Potret kemiskinan dapat dilihat sebagai kelaparan, ketiadaan tempat berteduh, ketidakmampuan mendapatkan pengobatan secara medis, ketiadaan akses untuk bersekolah dan buta huruf, pengangguran, kekhawatiran tentang masa depan bahkan kehidupan pada satu hari berikutnya. Tampilan kemiskinan lainnya adalah kehidupan tidak sehat yang disebabkan oleh air yang kotor, ketidakberdayaan, kehilangan aspirasi dan kebebasan. Demikianlah kemiskinan dipahami sebagai suatu konsep yang multidimensional mencakup seluruh indikator kesejahteraan, mempunyai banyak wajah, yang berubah dari satu tempat ke tempat ke tempat yang lain, dari waktu ke waktu.¹ Hal itulah yang membuat setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang kemiskinan.

Menurut Lembaga Penelitian SMERU², orang miskin memandang bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan ketika seseorang kehilangan harga diri, terbentur pada ketergantungan, terpaksa menerima perlakuan kasar dan hinaan, serta tak dipedulikan ketika sedang mencari pertolongan. SMERU juga mengungkapkan

¹ Tara Bedi, et al., *Beyond the Numbers, Understanding the Institutions for Monitoring Poverty Reduction Strategies* (Washington D.C.: The World Bank, 2006), hal. 1; World Bank, *Poverty Analysis*. Diakses 3 Agustus 2007 dari World Bank. <http://go.worldbank.org/K7LWOUT9L0>

² Lembaga Penelitian SMERU, *Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta: BPKP dan SMERU, 2001) hal. vi dan 1

pengertian lain kemiskinan yakni sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kemiskinan timbul karena adanya ketimpangan dalam kepemilikan alat produksi, kemiskinan terkait pula dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan tertentu dalam suatu masyarakat. Kemiskinan juga diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat di bawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi. Tidak jauh berbeda Peter Townsend³ menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketiadaan atau kekurangan makanan, kenyamanan, standard pelayanan dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memandang bahwa kemiskinan memiliki manifestasi yang bervariasi, termasuk keterbatasan pendapatan dan kecukupan sumber daya produksi untuk menjamin mata pencaharian secara terus-menerus, kelaparan dan kurang gizi, kesehatan yang rendah, keterbatasan akses pada pendidikan dan pelayanan dasar, peningkatan jumlah penderita penyakit dan kematian karena penyakit, gelandangan dan rumah kumuh, lingkungan yang tidak sehat, serta diskriminasi sosial dan keterasingan. Kemiskinan juga ditandai dengan keterbatasan pada partisipasi pada pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial, budaya dan masyarakat.⁴

World Bank dalam dua publikasi *World Development Report* mendefinisikan kemiskinan secara berbeda. Pada tahun 1990 kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimal⁵. Standar hidup minimal tersebut diukur dengan nilai konsumsi yang dianggap layak untuk bertahan hidup, kemudian

³ The Robert Gordon University, *An introduction to Social Policy*. Diakses 5 Agustus 2007 dari The Robert Gordon University.

<http://www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/needf.htm>

⁴ United Nations (2006), "World Summit for Social Development Agreements," *Programme of Action of the World Summit for Social Development" Copenhagen 1995*. Diakses 5 Agustus 2007 dari United Nations.

<http://www.un.org/esa/socdev/wssd/index.html>

dikenal dengan *the poverty line* (garis kemiskinan). Garis kemiskinan digunakan sebagai standar pengukuran umum, dalam hal ini seseorang atau suatu rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan dinyatakan miskin. Sedangkan pada tahun 2000 World Bank, mendefinisikan kemiskinan sebagai kehilangan kehidupan yang sejahtera⁶. Walaupun demikian ciri-ciri masyarakat miskin yang diungkapkan tidak jauh berbeda, hanya pada tahun 2000 lebih menekankan pada kerentanan untuk menjadi miskin dalam keadaan yang tidak dapat dikendalikan secara mandiri oleh orang miskin tersebut serta pandangan bahwa kemiskinan juga merupakan dampak dari interaksi yang kurang baik antara institusi negara atau pemerintah terhadap rakyatnya.

Dari definisi-definisi di atas dapat disederhanakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi keterpaksaan untuk bertahan dibawah standar kehidupan yang layak serta diabaikan dalam interaksi sosial. Orang miskin berada pada situasi tanpa pilihan, eksistensinya tidak diperhitungkan bahkan diremehkan. Keadaan yang serba kekurangan membuat kaum miskin merasa rendah diri, tidak pantas dan tidak bisa melakukan sesuatu untuk orang banyak. Akibatnya kaum miskin semakin lemah dan hanya bisa bertahan untuk menghidupi dirinya sendiri dalam jangka yang relatif pendek.

Pengertian kemiskinan menurut sifatnya dibedakan dalam kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan keadaan yang ditunjukkan oleh kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup⁷. PBB juga mendefinisikan bahwa kemiskinan absolut merupakan kondisi yang dicirikan oleh keadaan yang sangat terbatas tentang kebutuhan dasar manusia, mencakup makanan, air bersih, fasilitas kesehatan, kebersihan

⁵ World Bank, "Poverty," *World Development Report 1990* (New York: Oxford University Press, 1990), hal 26

⁶ World Bank, "Attacking Poverty," *World Development Report 2000/2001* (New York: Oxford University Press, 2000), hal. 15.

⁷ Exaltacion E. Lamberte (2004). "Urban Poverty and Social Safety Net Program in the Philippines," *EADN Regional Project on Urban Poverty and Social Safety Net in East Asia: Final Reports*, hal. 5-6. Diakses 1 Agustus 2007 dari EADN. <http://www.eadn.org/reports/urbanweb/u04.pdf>

lingkungan, perumahan, pendidikan dan informasi, serta akses terhadap pelayanan kemasyarakatan.⁸ Kebutuhan dasar manusia dalam istilah BPS disebut kebutuhan pokok minimum.⁹

Sedangkan kemiskinan relatif merupakan keadaan yang menunjukkan kekurangan sumber daya pada suatu individu atau kelompok masyarakat dibandingkan dengan individu atau kelompok lainnya, dengan kata lain perbandingan tentang standar hidup mereka.¹⁰ Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan tertentu yang ditetapkan berdasarkan kemampuan masyarakat setempat.¹¹ Acuan dalam penentuan miskin atau tidak miskin dalam hal ini adalah standar kehidupan kelompok masyarakat termiskin, dengan demikian orang miskin akan selalu ada dimanapun.

Penggunaan dua pendekatan di atas dapat menghasilkan persepsi yang berbeda terhadap status kesejahteraan seorang individu atau rumah tangga. Suatu rumah tangga dapat dikategorikan miskin menurut definisi kemiskinan relatif tetapi tidak miskin menurut definisi kemiskinan absolut. Ambiguitas dalam penentuan kategori miskin atau tidak miskin ini menyebabkan kesulitan tersendiri dalam menemukan orang miskin, tetapi para ahli seperti Peter Townsend (1978; 1982; 1987), Rainwater (1976) dan Herbert Blumer (1976) berpendapat bahwa kemiskinan lebih baik didefinisikan dalam terminologi relatif daripada terminologi absolut¹². Hal ini didasari pemikiran bahwa suatu keluarga atau rumah tangga mungkin saja memiliki sumber daya yang cukup untuk menafkahi kehidupan mereka, tetapi tidak mampu mencapai kesejahteraan atau tidak termasuk dalam kategori memiliki kehidupan ekonomi dan sosial yang lazim pada lingkungan masyarakat setempat.

⁸ United Nations (2006), "World Summit for Social Development Agreements", *op cit.*

⁹ Badan Pusat Statistik, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2006, (Jakarta: CV. Nario Sari, 2006), hal. 6

¹⁰ Exaltacion E. Lamberte, *op cit.*, hal. 6

¹¹ Badan Pusat Statistik, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2005 (Jakarta: BPS, 2005), hal. 5

¹² Exaltacion E. Lamberte, *loc cit.*

Kemiskinan selalu dipadankan dengan istilah ketimpangan (*inequality*). Setiap tingkat ketimpangan yang tinggi pasti menunjukkan adanya kemiskinan. Walaupun demikian kedua istilah tersebut tetap memiliki makna yang berbeda. Ketimpangan memiliki konsep yang lebih luas daripada kemiskinan, karena ketimpangan didefinisikan dari seluruh populasi, tidak hanya sekedar penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan saja.¹³ Dengan kata lain ketimpangan merujuk pada standar hidup relatif seluruh masyarakat yang berada dalam wilayah kajian, sedangkan kemiskinan pada standar hidup yang bersifat absolut pada sekelompok masyarakat miskin yang menjadi referensi. Pada tingkat ketimpangan yang tinggi dimana sekelompok kecil orang kaya memiliki segalanya, maka dapat dipastikan bahwa tingkat kemiskinan juga tinggi. Tetapi pada tingkat ketimpangan yang rendah bisa mengindikasikan dua kemungkinan, yakni kemungkinan pertama tidak ada orang miskin atau kemungkinan kedua seluruh individu adalah miskin.¹⁴

2.2. Pengukuran Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kerentanan

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan masalah klasik yang selalu ada dalam setiap kelompok masyarakat. Berbagai kajian telah dilakukan oleh para ahli ekonomi dan ilmu sosial lainnya untuk mencari format pendekatan yang lebih efektif dalam penanggulangan masalah kemiskinan dan pendistribusian kesejahteraan secara merata. Dalam rangka efektivitas penanggulangan kemiskinan maka dibutuhkan ukuran kemiskinan yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan dan penetapan target. Secara Umum pengukuran kemiskinan sangat penting dilakukan karena beberapa alasan pokok¹⁵ sebagai berikut: (a) untuk menjaga konsistensi terhadap agenda penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini menurut Ravallion (1998), ukuran kemiskinan yang kredibel dapat menjadi

¹³ World Bank Institute (2005), *Introduction to Poverty Analysis*, hal. 95. Diakses 5 Agustus 2007 dari World Bank.

<http://siteresources.worldbank.org/PGLP/Resources/PovertyManual.pdf>

¹⁴ World Bank, "Poverty," *World Development Report 1990*, *op cit.*, hal 26.

¹⁵ World Bank Institute, *Introduction to Poverty Analysis*, *op cit.*, hal. 10-13

instrumen yang kuat bagi para pengambil kebijakan untuk memusatkan perhatian pada kondisi kehidupan orang miskin. Sebaliknya ketiadaan statistik kemiskinan dapat menyebabkan mereka terabaikan dalam pengambilan kebijakan; (b) untuk menetapkan target intervensi. Fakta-fakta kemiskinan perlu dipetakan secara tepat berdasarkan karakteristik setiap kelompok sosial atau wilayah. Perbedaan karakteristik kemiskinan membutuhkan kebijakan yang berbeda pula. Oleh karena itu target intervensi harus disesuaikan berdasarkan data profil kemiskinan masing-masing daerah atau kelompok; (c) dalam rangka monitoring dan evaluasi dampak proyek dan kebijakan terhadap orang miskin. Kebijakan penanggulangan kemiskinan pada dasarnya merupakan konsep yang didasarkan pada prediksi terhadap kecenderungan dampak ekonomi dan sosial yang akan terjadi bila dilakukan intervensi. Ketersediaan data kemiskinan dapat digunakan untuk melakukan evaluasi sebuah program cocok atau tidak dengan masyarakat yang menjadi target. Hal ini penting untuk memutuskan keberlanjutan dan perbaikan program-program kebijakan yang dilakukan; dan (d) untuk mengevaluasi institusi mana yang lebih efektif dalam penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam prakteknya banyak pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan, baik pemerintah, dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility*, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam berbagai tingkatan, dan sebagainya. Pola pendekatan yang digunakan berbeda-beda berdasarkan kekhasan institusi masing-masing dan juga berhadapan dengan karakteristik dan budaya orang miskin yang tidak sama. Interaksi masyarakat miskin dengan berbagai institusi tersebut akan menunjukkan pencapaian tujuan yang bervariasi. Pengukuran kemiskinan akan membantu dalam menentukan tingkat efektivitas pencapaian tujuan oleh masing-masing institusi.

Dalam skala yang lebih kecil, identifikasi kemiskinan tidak terlalu sulit dilakukan. Secara relatif melalui perbandingan suatu individu atau rumah tangga dengan individu atau rumah tangga

lainnya dengan mudah bisa ditentukan mana yang lebih miskin. Tetapi dalam skala agregatif pengukuran kemiskinan membutuhkan metode yang lebih kompleks. Data kemiskinan biasanya diperoleh dari hasil survey, terkecuali untuk cakupan populasi yang terlalu banyak atau wilayah yang tidak terlalu luas dapat diperoleh dengan melakukan sensus. Menurut Ravallion¹⁶, untuk mengukur kemiskinan dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Mendefinisikan indikator kesejahteraan; (2) Menetapkan standar minimum indikator kesejahteraan yang dapat digunakan untuk mengelompokkan individu atau rumah tangga kedalam status miskin atau tidak miskin yang dikenal dengan garis kemiskinan; (3) Menetapkan ukuran kemiskinan berupa ringkasan statistik tentang informasi agregat mengenai distribusi kesejahteraan berdasarkan garis kemiskinan tersebut.

2.2.1. Indikator Kemiskinan

Kemiskinan dapat ditemukan dimana-mana dengan karakteristik yang berbeda-beda pada masing-masing dimensi ruang dan waktu. Penentuan indikator yang tepat merupakan titik awal keakuratan penghitungan kemiskinan. Indikator kemiskinan pada dasarnya sama dengan indikator kesejahteraan, tetapi dalam konteks kemiskinan yang menjadi fokus adalah pada aspek kekurangan atau ketiadaan indikator-indikator tersebut bagi orang miskin.

Penentuan indikator kemiskinan dapat dibagi dalam dua pendekatan yakni pendekatan moneter dan pendekatan non moneter. Pendekatan moneter menggunakan faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan uang atau variabel-variabel yang dikonversi kedalam nilai uang. Sedangkan pendekatan non moneter menggunakan faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan uang.

Pendekatan moneter menggunakan nilai pendapatan atau nilai pengeluaran konsumsi tertentu yang dianggap memenuhi kebutuhan dasar yang dijadikan sebagai garis kemiskinan untuk menentukan

¹⁶ Martin Ravallion, "Poverty Comparisons, A Guide to Concepts and Methods", *Living Standards Measurement Study, Working Paper No. 88*, (Feb. 1992), The World Bank Washington D.C. hal. 4.

status miskin atau tidak miskin. Pendapatan dalam hal ini mengacu pada definisi Haig dan Simons yang menyatakan bahwa pendapatan merupakan konsumsi dikurangi dengan perubahan nilai kekayaan bersih. Sedangkan pengeluaran konsumsi merupakan penjumlahan nilai barang-barang atau jasa yang dibeli dan barang atau jasa yang dihasilkan sendiri.¹⁷

Penggunaan indikator konsumsi atau pendapatan masih mengandung pro kontra sebagaimana ditunjukkan dengan Tabel 2.1. Namun secara umum negara-negara kaya mengukur kemiskinan dengan pendekatan pendapatan, sedangkan negara-negara miskin menggunakan pengeluaran. Alasannya adalah bahwa di negara-negara kaya pendapatan secara komparatif mudah diukur karena sebahagian besar bersumber dari gaji dan upah, sementara pengeluaran mereka sangat kompleks dan sulit dihitung. Sebaliknya, di negara-negara berkembang pendapatan sulit diukur karena sebahagian besar bersumber dari hasil bekerja sendiri, sedangkan pengeluaran tidak terlalu berkembang sehingga mudah diestimasi.¹⁸

Tabel 2. 1
Perbandingan Pendapatan dan Konsumsi sebagai
Indikator Kemiskinan

Kelebihan	Kekurangan
<p>a. Pendapatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mudah diukur, berdasarkan jumlah sumber pendapatan - Menunjukkan tingkat penguasaan rumah tangga terhadap sumber daya yang ada (yang dapat digunakan bila dibutuhkan sewaktu-waktu) - Biaya yang dibutuhkan hanya seperlima dari kebutuhan pengumpulan data pengeluaran, sehingga sampel bisa lebih banyak 	<ul style="list-style-type: none"> - Memungkinkan untuk dilaporkan lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya - Memungkinkan untuk dipengaruhi oleh fluktuasi keadaan jangka pendek (misalnya pola pertanian musiman) - Beberapa jenis pendapatan sulit diobservasi (seperti sektor informal, produksi pertanian perorangan, pendapatan dari upah diri sendiri)

¹⁷ World Bank Institute, *Introduction to Poverty Analysis, op cit.*, hal. 26-28

¹⁸ *Ibid*, hal. 36

Tabel 2. 1 (lanjutan)

	<ul style="list-style-type: none">- Hubungan antara pendapatan dan kesejahteraan tidak selalu jelas- Periode pelaporan bisa jadi tidak memasukkan pendapatan rumah tangga secara rata-rata
b. Konsumsi <ul style="list-style-type: none">- Menunjukkan standar hidup yang aktual- Menunjukkan kecenderungan yang teratur dan dapat merefleksikan kesejahteraan secara rata-rata dalam jangka panjang- Memiliki kesalahan yang lebih sedikit daripada data pendapatan, karena pengeluaran mudah diingat	<ul style="list-style-type: none">- Rumah tangga mungkin tidak mampu mempertahankan kecenderungan konsumsi (misalnya pada saat mendapatkan pinjaman, atau bantuan sosial)- Pola konsumsi yang dipilih oleh rumah tangga bisa jadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya (misalnya rumah tangga kaya yang hidup sederhana, tidak menunjukkan bahwa mereka miskin)- Beberapa pengeluaran tidak dilakukan secara reguler, sehingga data mungkin menyimpang- Sulit mengukur beberapa komponen dari konsumsi, termasuk barang tahan lama

Sumber: World Bank, diadaptasi dari Albert, 2004

Pendekatan non moneter menggunakan indikator yang lebih bervariasi. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ke antara lain konsumsi kalori per kapita per hari, perbandingan konsumsi makanan terhadap total konsumsi (berdasarkan Hukum Engel), pemenuhan gizi, dan metode antropologi dengan melibatkan masyarakat setempat dalam menilai kemiskinan.¹⁹ Disamping itu, beberapa indikator lainnya yang juga pernah digunakan di Indonesia antara lain pelaksanaan ibadah keagamaan, luas dan jenis lantai rumah, sumber air minum, kemampuan membeli pakaian, kepemilikan aset, tingkat pendidikan kepala keluarga, akses terhadap

¹⁹ *Ibid*, hal. 37-39

pengobatan medis, dan sebagainya. Setiap faktor diberi bobot berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap kemiskinan dengan total bobot bernilai 1, kemudian dikalikan dengan 1 bila mengindikasikan kemiskinan atau 0 bila tidak mengindikasikan kemiskinan. Penentuan status miskin atau tidak miskin berdasarkan nilai indeks hasil perkalian, semakin tinggi nilai indeks maka semakin miskin status seseorang.²⁰

Ukuran kemiskinan non moneter dalam cakupan wilayah dihitung dengan *Human Poverty Index* (HPI) atau Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Metode penghitungan IKM menggunakan tiga indikator yang sama dengan perhitungan *Human Development Index* (HDI) yakni usia harapan hidup, pengetahuan dan pemenuhan standar kelayakan hidup²¹, tetapi pendekatan yang dilakukan adalah keterbatasan atas capaian terhadap indikator-indikator tersebut.

Indikator Usia harapan hidup diukur dengan peluang suatu populasi untuk tidak bertahan hidup sampai umur 40 tahun. Indikator pengetahuan diukur dengan persentasi buta huruf dewasa atau penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan indikator pemenuhan standar kelayakan hidup diukur dengan tiga variabel yakni persentasi penduduk tanpa akses terhadap air bersih, persentasi penduduk yang tidak memiliki akses ke sarana kesehatan, dan persentasi anak berumur lima tahun ke bawah (balita) dengan status gizi kurang

Di Indonesia penghitungan resmi tentang kemiskinan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Perhitungan pertama kali dilakukan pada tahun 1984, mencakup periode 1976-1981.²² Pendekatan yang dilakukan oleh BPS untuk mengukur kemiskinan adalah menggunakan pengeluaran konsumsi sebagai indikatornya. Data tentang konsumsi tersebut diperoleh dari Survey Sosial Ekonomi

²⁰ Badan Pusat Statistik, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2006, *op cit.*, hal. 16 dan 26

²¹ UNDP, Human Development Report 1997 (New York: Oxford University Press, 1997), hal. 18

²² Badan Pusat Statistik, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2006, *op cit.*, hal. 1

Nasional (Susenas) modul konsumsi yang saat ini sudah dilakukan setiap tahun.²³

Penghitungan kemiskinan dengan pendekatan yang berbeda dengan BPS juga pernah dilakukan oleh Sayogyo (1971) pada awal tahun 1970-an dengan menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Tingkat ekuivalensi konsumsi beras di daerah pedesaan adalah 240 kg per orang per tahun, sedangkan untuk daerah perkotaan sebesar 360 kg beras per orang per tahun. Penduduk yang mengkonsumsi dibawah nilai ekuivalen tersebut digolongkan miskin.²⁴

Selain Sayogyo, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga melakukan perhitungan dengan pendekatan non moneter lainnya. BKKBN menggunakan 23 indikator untuk menggolongkan keluarga ke dalam 5 kategori yakni Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus. Keluarga miskin menurut BKKBN adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih dari enam indikator penentu kemiskinan alasan ekonomi²⁵, yakni: (1) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; (2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian; (3) Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah; (4) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ikan/telur; (5) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru; (6) Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi untuk tiap penghuni.

²³ *Ibid*, hal. 29-30

²⁴ Ade Cahyat, "Bagaimana kemiskinan diukur? Beberapa model penghitungan kemiskinan di Indonesia", *Governance Brief Number 2* (November 2004), Center for International Forestry Research, hal. 1

²⁵ BKKBN (2004), *Pendataan Keluarga, Selayang Pandang*. Diakses 5 Agustus 2007 dari BKKBN. http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=49

2.2.2. Garis kemiskinan

Garis kemiskinan adalah suatu nilai moneter bagi seseorang pada tempat dan waktu tertentu sebagai penentu tingkat kesejahteraannya.²⁶ Garis kemiskinan juga diartikan sebagai pengeluaran minimum yang dibutuhkan memenuhi kebutuhan dasar, ambang batas konsumsi yang diperlukan suatu rumah tangga untuk lepas dari kemiskinan. Orang yang tidak menjangkau nilai moneter tersebut dikategorikan miskin, dan selebihnya tidak miskin.

Kerangka konseptual garis kemiskinan terdiri dari dua jenis yakni garis kemiskinan relatif dan garis kemiskinan absolut. Garis kemiskinan relatif (*relative poverty lines*) berhubungan erat dengan distribusi pendapatan atau konsumsi dalam suatu negara atau region. Karena berdasarkan konsep ini standar minimum yang digunakan merupakan angka yang diperoleh dari nilai tengah atau median pendapatan atau konsumsi golongan masyarakat termiskin setempat, misalnya 15%, 20 %, 50% dan sebagainya. Dengan demikian garis kemiskinan pada suatu daerah atau negara tertentu akan berbeda dengan yang lainnya berdasarkan kondisi umum kesejahteraan masyarakat pada masing-masing wilayah.

Beberapa negara yang menggunakan garis kemiskinan relatif ini antara lain Inggris yang mematok garis kemiskinan pada median pendapatan 60 % percent penduduk termiskin²⁷, negara-negara Amerika Latin median pendapatan perkapita 50 % masyarakat termiskin, Oman median 40%, serta Iran median dan rata-rata 50 %²⁸.

Dengan perbedaan referensi dalam penentuan garis kemiskinan tersebut maka negara-negara miskin memiliki garis kemiskinan relatif yang lebih rendah dari pada negara-negara kaya.

²⁶ Martin Ravallion, "Poverty Lines in Theory and Practice", LSMS Working Paper, Number 133 (Juli 1998), The World Bank, hal. 3

²⁷ United Nations Statistics Division (2005). Handbook On Poverty Statistics : Concepts, Methods And Policy Use, hal. 32. Diakses 6 Agustus 2007 dari United Nations Statistics Division.
http://unstats.un.org/unsd/methods/poverty/pdf/UN_Book%20FINAL%2030%20Dec%2005.pdf

²⁸ *Loc cit.*

Akibatnya penduduk yang dikategorikan miskin pada negara kaya tetapi dapat dikategorikan kaya pada negara miskin. Hal inilah yang mendasari fakta bahwa Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 1990-an memiliki tingkat kemiskinan yang sama yakni mendekati 15% sebagaimana laporan Ravallion (1998)²⁹.

Sedangkan garis kemiskinan absolut (*absolute poverty line*) menurut Ravallion, merupakan suatu angka tetap yang mengacu pada standar hidup minimum yang digunakan serta berlaku umum dalam membandingkan kemiskinan. Jadi garis kemiskinan absolut dapat menentukan seseorang miskin atau tidak miskin tanpa tergantung pada ruang dan waktu dengan melihat tingkat konsumsi riilnya.³⁰ Sementara menurut François Bourguignon bahwa garis kemiskinan absolut ditentukan oleh daya beli tetap terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar fisik dan sosial.³¹

Garis kemiskinan absolut penting untuk mengukur dampak penanggulangan kemiskinan, atau memperkirakan dampak suatu kebijakan terhadap kemiskinan, juga untuk membandingkan tingkat kemiskinan suatu negara dengan negara lainnya. Berdasarkan pemikiran tersebut maka World Bank menetapkan dua ukuran yakni US \$ 1 per hari dan US \$ 2 per hari. Berdasarkan Garis kemiskinan US \$ 1 per hari maka pada tahun 2001 diperkirakan 1,1 milyar penduduk dunia hidup dibawah kemiskinan, dan dengan garis kemiskinan US \$ 2 per hari maka jumlah tersebut menjadi 2,7 milyar.³² Sementara menurut perhitungan World Bank dunia juga, dengan garis kemiskinan US PPP \$ 1 per hari 7,4 % Penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan menjadi 49,0 % jika diukur dengan US PPP \$ 2 per hari³³.

²⁹ Badan Pusat Statistik, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2006, *op cit.*, hal. 5

³⁰ Martin Ravallion, "Poverty Comparisons, A Guide to Concepts and Methods", *op cit.*, hal. 25

³¹ François Bourguignon, "The Poverty-Growth-Inequality Triangle", *Paper presented at Conference on Poverty, Inequality and Growth*, in Paris (November 13, 2003), hal. 1. Diakses 5 Agustus 2007 dari World bank. <http://go.worldbank.org/ZLH1L4T1Z2>

³² World Bank Institute, *Introduction to Poverty Analysis*, *op cit.*, hal. 48

³³ World Bank, *Making the New Indonesia Work for the Poor*, (Jakarta: The World Bank Office Jakarta, 2006) hal. 26

Nilai US \$ 1 per hari dan US \$ 2 per hari merupakan salah satu garis kemiskinan yang digunakan oleh World Bank dan PBB, walaupun pada prakteknya setiap negara memiliki angka garis kemiskinan yang berbeda-beda berdasarkan perhitungan masing-masing. Pendekatan dalam penghitungan garis kemiskinan dapat dibagi atas tiga jenis yakni: (1) Metode asupan energi makanan (*food energy intake/FEI*); (2) Metode biaya kebutuhan dasar (*cost of basic needs/CBN*); dan (3) Metode garis kemiskinan subyektif (*subjective poverty lines*).³⁴

Metode Asupan Energi Makanan (FEI) dikembangkan dari metode *direct calorie intake* (DCI). Metode DCI itu sendiri menggunakan standar kebutuhan kalori perkapita tertentu sebagai garis kemiskinan, yakni 2112 untuk perdesaan dan 2122 untuk perkotaan³⁵. Kuantitas makanan yang dikonsumsi suatu rumah tangga dikonversi kedalam ukuran kalori kemudian dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga untuk memperoleh asupan kalori perkapita. Rumah tangga dengan tingkat asupan kalori dibawah standar kebutuhan kalori perkapita yang ditentukan dikategorikan miskin.

Dalam FEI perhitungan standar kebutuhan kalori perkapita diperluas dengan menambahkan kebutuhan non makanan. Karena rumah tangga miskin sekalipun tetap mengkonsumsi barang-barang non makanan seperti pakaian dan perumahan. Dalam hal ini kebutuhan non makanan diperlakukan seperti kebutuhan makanan. Garis kemiskinan ditentukan melalui survey terhadap tingkatan pengeluaran atau pendapatan rumah tangga, yakni nilai rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang diperkirakan pemenuhan kalorinya secara rata-rata sama dengan kebutuhan dasar energi yang ditetapkan, atau dengan menggunakan hubungan empiris antar asupan energi makanan dan pengeluaran konsumsi³⁶.

³⁴ World Bank Institute, *Introduction to Poverty Analysis, op cit.*, hal. 42

³⁵ Isidoro P. David (2000). "Poverty Statistics and Indicators: How Often Should They Be Measured?", *United Nations Statistics Division's Electronic Documents*, hal. 4. diakses 5 Agustus 2007 United Nations Statistics Division
<http://unstats.un.org/unsd/methods/poverty/sid%20aug%202000%20povnote.pdf>

³⁶ Ragayah Haji Mat Zin (2004), *Poverty Concepts and Measurements: An Overview of Theory and Practice*, hal. 6. Diakses 10 Agustus 2007 dari Economic Planning Unit Prime Minister's Department Malaysia

Metode biaya kebutuhan dasar (CBN) pertama kali diperkenalkan oleh B. Seebomh Rowntree pada Seminar Study Kemiskinan di York suatu daerah di bagian Utara Inggris pada tahun 1899.³⁷ Metode ini menetapkan satu bundel atau satu paket konsumsi yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemudian menaksir biaya masing-masing berdasarkan kelompok wilayah perkotaan dan perdesaan untuk dijadikan pembandingan dalam penentuan profil kemiskinan. Paket konsumsi tersebut terdiri dari konsumsi makanan dan non makanan.

Komponen makanan secara umum merupakan bahan makanan pokok yang mengandung gizi yang cukup untuk kesehatan. Menurut perhitungan *Food and Agricultural Organization* (FAO) kebutuhan kalori minimum setiap orang per hari adalah sebanyak 2.100 kalori. Jenis bahan makanan yang dipilih sebagai acuan didasarkan pada pola konsumsi masyarakat setempat.³⁸ Sedangkan komponen non makanan terdiri dari beberapa kebutuhan pokok seperti pakaian, perumahan, biaya kesehatan dan lain-lain. Penentuan jenis komponen non makanan lainnya sering menjadi perdebatan misalnya biaya dari aktivitas sosial yang dianggap penting dan dapat menghindarkan orang dari jeratan kemiskinan, misalnya biaya mencari pekerjaan, biaya sekolah, dan sebagainya. Perdebatan lainnya yang berhubungan dengan garis kemiskinan dengan metode CBN adalah penentuan share makanan dan non makanan pada garis kemiskinan, misalnya 1:1, 1:3 dan sebagainya.

Dalam penghitungan garis kemiskinan di Indonesia, BPS menggunakan metode CBN dengan memformulasikan Garis Kemiskinan (GK) sebagai penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan

<http://www.epu.jpm.my/New%20Folder/POVERTY.pdf>

³⁷ Richard Anker (2007), "Poverty Lines Around The World: A New Methodology and Internationally Comparable Estimates", *International Labour Review*, diakses 10 Agustus 2007 dari Goliath Business Knowledge on Demand. http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-6595421/Poverty-lines-around-the-world.html

dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, ikan daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang diwakili oleh 51 jenis komoditi non makanan untuk perkotaan serta 47 jenis komoditi non makanan untuk perdesaan.³⁹

Pendekatan metode garis kemiskinan subyektif disebut juga *consensual poverty lines* oleh Walker atau *Sociovitral Minimum Income Level (SMIL)* oleh Callan. Garis Kemiskinan Subyektif ditentukan oleh sendiri oleh penduduk yang diperoleh melalui survey tentang tingkat pendapatan minimum yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup dengan baik. Metode ini menggunakan *Minimum Income Question (MIQ)* yakni pertanyaan yang dibuat untuk mengukur pendapatan yang paling kecil yang dibutuhkan untuk menghindari kemiskinan, hidup dengan baik, hidup dengan cukup atau bertahan hidup.⁴⁰ Berdasarkan metode ini garis kemiskinan lebih bersifat realistik karena ditentukan sendiri oleh masyarakat setempat.

2.2.3. Ukuran Kemiskinan

Penetapan ukuran kemiskinan merupakan proses akhir proses pengukuran kemiskinan. Ukuran kemiskinan merupakan fungsi statistik yang mendeskripsikan perbandingan indikator kesejahteraan rumah tangga dengan garis kemiskinan yang digunakan dalam suatu angka agregat untuk populasi secara keseluruhan atau sub populasi yang dipilih. Metode analisis yang dapat digunakan sebagai ukuran kemiskinan sangat banyak, tetapi yang paling populer dikenal dengan indeks FGT (Foster-Greer-Thorbecke). Indeks FGT diperkenalkan oleh

³⁸ Martin Ravallion, "Poverty Lines in Theory and Practice", *op cit.*, hal. 15

³⁹ Badan Pusat Statistik, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2006, *op cit.*, hal. 29-30

⁴⁰ David Gordon, et al., *Poverty and Social Exclusion in Britain* (Water End York: Joseph Rowntree Foundation, 2000), hal. 73

Erik Thorbecke, James Foster, dan Joel Greer pada tahun 1984⁴¹. Ukuran kemiskinan yang digunakan terdiri dari tiga indeks yakni: (a) *Head Count Index*; (b) *Poverty Gap Index*; dan (c) *Poverty Severity Index*.

Head count index atau tingkat kemiskinan sering disimbolkan P_0 , merupakan angka perbandingan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Nilai P_0 berkisar antara 0 sampai dengan 1. *Poverty Gap Index* atau indeks kedalaman kemiskinan (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran (gap) masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan (*poverty gap*/kedalaman kemiskinan). Sedangkan *Poverty Severity Index* atau indeks keparahan kemiskinan (P_2) dapat menggambarkan ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Tinggi rendahnya nilai P_2 menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri. Konstruksi P_2 dilakukan melalui pemberian bobot kuadratik pada nilai kesenjangan konsumsi sehingga disebut juga *squared poverty gap*.

2.2.4. Kerentanan

Kerentanan atau *vulnerability* adalah resiko jatuh ke jurang kemiskinan pada waktu yang akan datang, walaupun pada saat ini tidak miskin, sebagai efek dari guncangan (*shock*) seperti, musim kemarau, turunnya harga komoditi pertanian, atau krisis moneter. Kerentanan merupakan dimensi pokok dari kesejahteraan karena hal itu mempengaruhi perilaku individu (misalnya dalam berinvestasi, menerapkan pola produksi dan strategi menghadapi kondisi sulit di masa datang) serta persepsi mereka tentang situasi saat ini.⁴²

⁴¹ Choiril Maksum (2004), "Official Poverty Measurement in Indonesia", *Paper Presented at 2004 International Conference on Official Poverty Statistics*. Diakses pada 6 Agustus 2007 dari NSCB Board Philippine.

www.nscb.gov.ph/poverty/conference/papers/2_Indonesia.pdf; Martin Ravallion, "Poverty Comparisons, A Guide to Concepts and Methods", *op cit.*, hal. 35.

⁴² World Bank Institute, *Introduction to Poverty Analysis*, *op cit.*, hal. 10.

Individu atau rumah tangga yang berada pada atau sedikit di atas garis kemiskinan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan, walaupun demikian tidak berarti bahwa kelompok di atasnya benar-benar bebas dari kerentanan. Dalam hubungan antara kerentanan dan kecenderungan kemiskinan pada masa depan, Asep Suryahadi dan Sudarno Sumarto mengklasifikasikan rumah tangga⁴³ seperti gambar di bawah ini.

		Current Consumption (c)			Expected Consumption (E[c])
		$c < \underline{c}$	$c \geq \underline{c}$		
Vulnerability to poverty (v)	$v \geq 0,5$	A	D	$E[c] < \underline{c}$	
	$v < 0,5$	B	E	$E[c] \geq \underline{c}$	
		C	F		

Sumber: Asep Suryahadi dan Sudarno Sumarto (2001)

Gambar 2. 1
Kategori Kemiskinan dan Kerentanan

Berdasarkan gambar diatas dimana \underline{c} adalah garis kemiskinan maka kategori kemiskinan dan kerentanan diklasifikasikan kedalam 5 kelompok yang saling tumpang tindih, yakni miskin (A+B+C), tidak miskin (D+E+F), kelompok kerentanan tinggi (A+B+D+E), kelompok kerentanan rendah (C+F), dan total kelompok rentan (A+B+C+D+E). Kelompok miskin terdiri dari miskin kronis (A) dan miskin sementara (B+C). Rumah tangga miskin kronis adalah rumah tangga yang miskin saat ini dan memiliki harapan tingkat konsumsi dibawah garis kemiskinan pada masa depan, sehingga akan tetap menjadi miskin pada masa depan. Rumah tangga miskin sementara adalah rumah tangga yang miskin saat ini tetapi memiliki harapan untuk

⁴³ Asep Suryahadi dan Sudarno Sumarto, "Measuring Vulnerability to Poverty in Indonesia Before and After the Economic Crisis", *Smeru Working Paper* (Mei 2001) hal. 6. The SMERU Research Institute

meningkatkan konsumsi melewati garis kemiskinan. Sebahagian rumah tangga miskin sementara memiliki kerentanan rendah dan sebahagian lagi memiliki kerentanan tinggi untuk tetap miskin , demikian pula dengan rumah tangga tidak miskin.

Mengetahui kondisi kerentanan penting bagi para pengambil kebijakan untuk mempersiapkan program yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai resiko yang dapat menyebabkan mereka jatuh miskin. Berbagai resiko tersebut dapat berasal dari faktor alam, penyakit menular, inflasi, krisis keuangan dan sebagainya.

2.2.5. Ketimpangan

Ketimpangan merupakan suatu ukuran yang penting dalam menilai kemiskinan, karena pada dasarnya ketimpangan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Beberapa ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah *Gini Coefficient*, *Generalized Entropy (Theil Index)*, *Atkinson's Inequality Measures*, dan *Decile Dispersion Ratio*. Yang paling populer diantara ukuran tersebut adalah *Gini Coefficient* (Koefisien Gini). Koefisien Gini didasarkan pada Lorenz Curve (Kurva Lorenz) yaitu sebuah Kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu misalnya pengeluaran atau pendapatan dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentasi kumulatif penduduk.⁴⁴

2.3. Faktor Determinan Kemiskinan

Kemiskinan dapat dipandang sebagai hasil (*result*) dari sebuah proses interaksi sosial ekonomi, atau dengan kata lain adalah akibat. Tetapi dalam jangka panjang, proses tersebut bergulir terus menerus sehingga tidak jelas lagi mana komponen penyebab dan mana komponen akibat. Fakta yang menimpa kaum miskin adalah keadaan bahwa mereka semakin sulit untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Fenomena semakin terjeratnya kaum miskin tersebut sering

yang berhubungan dengan kondisi khusus rumah tangga dan individu, beberapa dimensi penting antara lain, dimensi kependudukan (sisi rumah tangga): komposisi usia, rasio ketergantungan, jenis kelamin kepala keluarga. Dimensi ekonomi: status ketenagakerjaan, jumlah jam kerja, kepemilikan aset. Dimensi sosial: status gizi dan kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Masih menurut World Bank⁴⁶, khusus untuk Indonesia faktor determinan yang mempengaruhi kemiskinan terdiri dari: (1) pendidikan; (2) pekerjaan; (3) gender; (4) akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar; dan (5) lokasi geografis. Kemiskinan di Indonesia dicirikan oleh tingkat pendidikan yang rendah, bekerja pada sektor pertanian, kepala rumah tangganya perempuan, memiliki akses yang rendah terhadap pendidikan, pelayanan kredit, jalan raya dan telekomunikasi, serta secara geografis memiliki keunggulan yang rendah.

Sementara Ted K. Bradshaw⁴⁷ merangkum teori-teori tentang kemiskinan yang dikemukakan para ahli antara lain Blank (2003), Goldsmith & Blakely (1992), Jennings & Kushnick (1999), Rodgers (2000) Schiller (1989), Shaw (1996), juga Ryan (1976), Jennings (1999), dan Rank (2004) mengemukakan lima teori penyebab kemiskinan yakni: (1) faktor individu, berupa keterbatasan yang disebabkan oleh karakteristik individual seperti sifat pemalas, kesalahan dalam menentukan pilihan hidup, kompetensi yang kurang, cacat bawaan; (2) faktor kebudayaan, yakni kepercayaan pada kebiasaan yang mendorong kepada budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan muncul dalam interaksi sosial yang berlangsung pada wilayah konsentrasi orang miskin misalnya pemukiman kumuh, kelompok minoritas miskin, dan sebagainya berupa kepercayaan, nilai-nilai, dan tingkat keterampilan tertentu yang menghambat kemajuan

⁴⁵ World Bank Institute, *Introduction to Poverty Analysis*, *op cit.*, hal. 124-218

⁴⁶ World Bank, *Making the New Indonesia Work for the Poor*, *op cit.*, hal. 48-52

⁴⁷ Ted K. Bradshaw, "Theories of Poverty and Anti-Poverty Programs in Community Development", *Community Development: Journal of the Community Development Society*, Vol. 38, No. 1 (Spring 2007), hal. 10-11, The Community Development Society

tetapi dipertahankan oleh individu secara turun temurun; (3) distorsi dan diskriminasi politik-ekonomi, teori ini memandang bahwa kemiskinan diciptakan dari perlakuan yang tidak adil dalam aspek sosial, ekonomi dan politik yang didasarkan pada stigma-stigma sosial tertentu. Akibatnya mereka sering diabaikan dan terus-menerus kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan; (4) kesenjangan geografis, memandang bahwa kemiskinan memiliki hubungan dengan kondisi spasial. Kesenjangan regional ditinjau dari aspek kependudukan, institusi, dan kebudayaan menyebabkan perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan; dan (5) akumulasi dan lingkaran ketergantungan, berdasarkan teori ini kemiskinan dipandang sebagai hasil dari siklus interaksi sosial ekonomi yang saling berhubungan. Siklus itu dibedakan oleh Jonathan Seher (1997) dalam tiga level yakni level masyarakat, level individu dan level psikologis. Keterbatasan pada level masyarakat, memiliki implikasi pada level individu dan selanjutnya secara psikologis membentuk sikap apatis, putus asa, bahkan fatalis.

2.4. Penanggulangan Kemiskinan

Dunia tanpa kemiskinan menjadi cita-cita semua negara. Banyak negara yang secara eksplisit maupun implisit menjadikan kesejahteraan atau pengentasan kemiskinan sebagai cita-cita penyelenggaraan negara. Hal ini didorong oleh kesadaran bahwa fenomena lingkaran kemiskinan yang tak berujung tidak mudah untuk diputuskan sendiri oleh kaum miskin. Kaum miskin membutuhkan pihak lain untuk membantu mereka, dan yang paling berkompeten dalam hal ini adalah pemerintah. Oleh karena itu berbagai upaya untuk menghilangkan kemiskinan telah menjadi diskusi yang panjang pada studi-studi kebijakan publik dan forum-forum pengambilan keputusan baik pada skala nasional maupun global.

Puncak mengglobalnya upaya pengentasan kemiskinan ditandai dengan kesepakatan tentang Millennium Development Goals

pada tahun 2000 yang menetapkan pemberantasan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan pertama. Walaupun demikian MDGs hanya berisi target capaian, tidak menjelaskan strategi dan kebijakan pemberantasan kemiskinan. Strategi dan kebijakan diserahkan kepada masing-masing negara sesuai hasil *assessment*.

Kesulitan dalam formulasi kebijakan pemberantasan kemiskinan terkait dengan sifat kemiskinan yang multi dimensional. Akibatnya kebijakan penanggulangan kemiskinan harus menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah dan masyarakat yang menjadi sasaran. Namun secara umum penanggulangan kemiskinan menurut World Bank⁴⁸ dapat didekati melalui penyebab kemiskinan dengan merumuskan tiga strategi yakni: (a) promosi kesempatan: berupa perluasan kesempatan secara ekonomi kepada masyarakat miskin melalui rangsangan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kepemilikan aset dan tingkat perolehan laba dari aset-aset tersebut dalam aktivitas market maupun non market. Dengan memiliki aset yang cukup maka masyarakat miskin dapat meningkatkan aktivitas produksi untuk pemenuhan kebutuhan secara subsisten dan kelebihanannya dapat dipasarkan sehingga secara total pendapatannya akan meningkat; (b) memfasilitasi pemberdayaan: meningkatkan tanggung jawab dan akuntabilitas pemerintah dalam memperkuat partisipasi kaum miskin dalam proses politik dan pengambilan keputusan di tingkat lokal, dan menghilangkan hambatan-hambatan yang berhubungan gender, etnis, ras dan status sosial; dan (c) peningkatan ketahanan: yakni mengurangi tingkat kerentanan kaum miskin dari resiko kesehatan, guncangan ekonomi, dampak negatif kebijakan pemerintah, bencana alam dan kekerasan.

Sejalan dengan konsep World Bank, Todaro⁴⁹ berpendapat bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan harus difokuskan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan, kesehatan, dan pendidikan

⁴⁸ World Bank, "Attacking Poverty," *op cit.*, hal. 33

⁴⁹ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan Jilid 1, terj. Haris Munandar dan Puji A.L. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004) hal. 411

secara bersama-sama. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa negara-negara berpendapatan tinggi memiliki tingkat kesehatan dan pendidikan yang jauh lebih tinggi daripada negara-negara miskin. Rasionalisasi pendapat ini dapat dilihat sebagai kebalikan dari lingkaran kemiskinan. Dengan pendapatan yang tinggi, masyarakat dan pemerintah mampu mengeluarkan dana yang lebih banyak untuk peningkatan pendidikan dan kesehatan. Dalam kondisi kesehatan dan pendidikan yang lebih baik akan lebih mudah untuk mencapai peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Sementara, kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih rinci dikemukakan oleh E. Wayne Nafziger⁵⁰ mengadopsi pemikiran Ahwulia, Carter, dan Chenery (1979), Adelman dan Robinson (1978), Frank dan Webb (1977) dijelaskan sebagai berikut: (a) modal dan kredit, berupa pemberian pinjaman lunak bagi kaum miskin melalui mekanisme dan administrasi yang mudah; (b) pendidikan dan pelatihan, yakni kebijakan pembebasan biaya pendidikan dasar dan pelatihan-pelatihan tertentu untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dasar bagi kaum miskin; (c) program ketenagakerjaan, yakni kebijakan untuk menurunkan tingkat pengangguran dengan mendorong penciptaan dan perluasan lapangan kerja, industri padat karya, pengembangan ekonomi perdesaan, pendidikan yang relevan dengan pasar tenaga kerja, dan pengaturan tingkat upah; (d) gizi dan kesehatan, yakni kebijakan pengenaan biaya pengobatan yang rendah atau gratis dan subsidi makanan tambahan bagi kaum miskin; (e) program kependudukan, yakni pengurangan rasio ketergantungan melalui pembentukan keluarga kecil (keluarga berencana); (f) riset dan teknologi, yakni pengembangan teknologi yang berhubungan dengan kepentingan orang miskin, khususnya pengembangan teknologi pertanian untuk peningkatan produktivitas, volume produksi dan insentif petani; (g) transmigrasi, yakni program yang ditujukan untuk pemeratakan sebaran penduduk sehingga kegiatan perekonomian di perdesaan dapat berkembang dan konsentrasi

kegiatan perekonomian di kota dapat berkurang; (h) perpajakan, berupa pengenaan pajak progresif terhadap penghasilan untuk mendorong pemerataan ekonomi; (i) transfer tunai dan subsidi, berupa kebijakan pemberian uang tunai kepada kaum miskin atau pemberian subsidi bagi produk yang banyak dikonsumsi dan komoditi yang mereka hasilkan; (j) penekanan pada kelompok sasaran tertentu, pada dasarnya kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan harus diarahkan secara fokus pada kelompok sasaran secara tepat berdasarkan karakteristiknya dan semaksimal mungkin menghindari kebocoran, misalnya pendidikan untuk perempuan, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin perkotaan, program pengaman sosial bagi para jompo dan sebagainya; (k) *workfare*, yakni suatu system pemberian bantuan yang dapat menularkan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik bagi penerima bantuan, dalam bentuk bantuan bersyarat sehingga target kebijakan dapat terseleksi secara otomatis; (l) perang terhadap kemiskinan secara terintegrasi, upaya menghapus kemiskinan hanya bisa berhasil apabila pemerintah secara total, menerapkan kebijakan dalam segala sektor yang saling mendukung untuk mendukung kepentingan kaum miskin; dan (m) program-program penyesuaian, berupa kebijakan-kebijakan pendukung dalam rangka reformasi ekonomi, penyesuaian struktur birokrasi dan kebijakan stabilisasi ekonomi makro.

2.5. Pembangunan Pro Poor

Secara umum fungsi utama pemerintah dalam perspektif ekonomi adalah menyelenggarakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyatnya. Untuk mengukur kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan pada awalnya digunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan Pendapatan Nasional Bruto atau *Gross National Product* (GNP), Produk Domestic Bruto atau *Gross Domestic Product* (GDP), dan GNP per kapita. Seiring dengan perubahan paradigma

⁵⁰ E. Wayne Nafziger, *The Economics of Developing Countries* (New Jersey: Prentice-

pembangunan, ukuran yang digunakan juga berubah. Sejak tahun 1970-an pandangan tentang tujuan utama pembangunan ekonomi bergeser pada penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja, sehingga muncul slogan populer pada saat itu yakni "redistribusi hasil pertumbuhan".⁵¹

Perubahan paradigma pembangunan tersebut mengantarkan perhatian para pengambil kebijakan dan ilmuwan untuk memfokuskan kajian-kajian yang berhubungan dengan isu terkait, terutama tentang perdebatan mengenai strategi dan kebijakan pembangunan dalam hubungannya dengan kemiskinan, ketimpangan dan pertumbuhan. Dalam hal ini François Bourguignon sependapat dengan Ernesto M. Pernia, mengatakan bahwa perubahan pada kemiskinan dapat dekomposisi dalam efek pertumbuhan murni yakni efek dari perubahan proporsional dalam semua tingkat pendapatan dimana distribusi pendapatan relatif dianggap tidak berubah, dan efek ketimpangan (efek distribusional) yakni efek perubahan distribusi pada pendapatan relatif.⁵² Tingkat pengaruh bertambah atau berkurangnya kemiskinan tergantung pada elastisitas kemiskinan terhadap kedua efek tersebut. Jika kesenjangan bersifat konstan maka pertumbuhan murni berpengaruh negatif, karena pertumbuhan dapat mengurangi kemiskinan. Sedangkan ketimpangan dapat berpengaruh positif atau negatif tergantung pada apakah pertumbuhan disertai dengan peningkatan atau penurunan ketimpangan itu sendiri. Hubungan antara kemiskinan, kesenjangan dan pertumbuhan digambarkan dalam bentuk segi tiga *Poverty-Growth-Inequality* (PIG) sebagaimana Gambar 2.3.

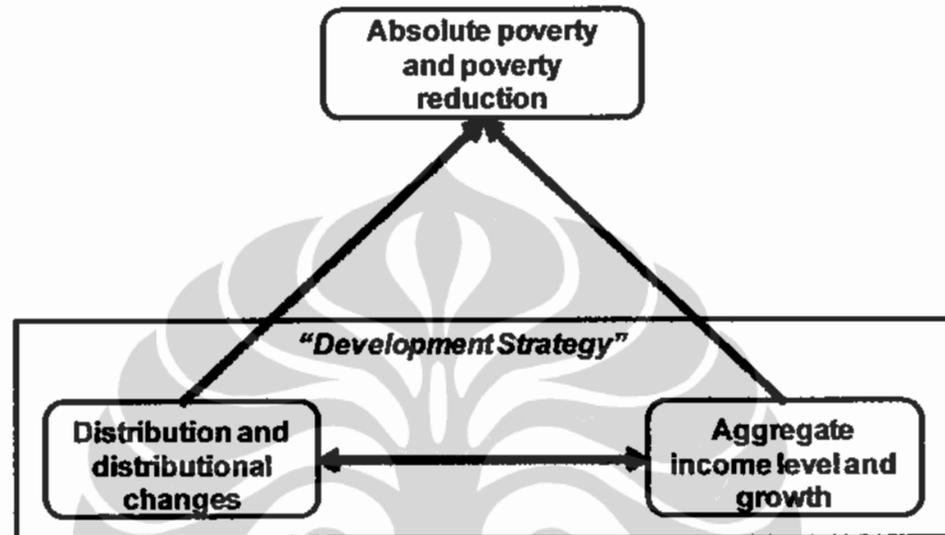
Lebih lanjut mengenai segi tiga PIG, François Bourguignon memberikan jawaban terhadap dilema strategi pembangunan dalam dua pernyataan: (a) pengurangan kemiskinan absolut dengan cepat,

Hall International, Inc., 1997), hal. 156-162

⁵¹ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *op cit.*, hal. 20

⁵² Ernesto M. Pernia, "Pro-poor Growth: What is It and How is It Important?" *ERD Policy Brief No. 17* (Juni 2003), hal. 2, Asian Development Bank; François Bourguignon, *op cit.*, hal. 2

dalam bentuk apapun, merupakan suatu tujuan sangat berarti bagi pembangunan, (b) untuk mencapai tujuan mengurangi kemiskinan absolut dengan cepat dibutuhkan kekuatan dan kebijakan pemerintah yang mengkombinasikan strategi pertumbuhan dan pemerataan.



Sumber : François Bourguignon (2003)

Gambar 2. 3
Segi Tiga Kemiskinan, Ketimpangan dan Pertumbuhan

Pembangunan yang dapat mengurangi kesenjangan, melepaskan dari lingkaran setan kemiskinan menuju pertumbuhan yang tinggi disebut pembangunan yang pro poor. Berdasarkan konsep ini pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak hanya sekedar menghasilkan angka-angka statistik yang dibanggakan, tetapi bahwa pertumbuhan benar-benar dapat dinikmati oleh orang miskin.

2.6. Studi Sejenis

Studi-studi tentang kemiskinan sangat sering dilakukan, baik oleh instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah atas kerja sama dengan berbagai organisasi internasional terutama Bank Dunia dan UNDP. Instansi pemerintah yang secara rutin melakukan analisis kemiskinan di Indonesia adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Perhitungan kemiskinan oleh BPS pertama kali dilakukan pada tahun 1984 yang mencakup periode 1976-1981.

Sumber data yang digunakan oleh BPS berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang terdiri dari Susenas Modul Konsumsi dan Susenas Kor.

Metode analisis menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam penentuan garis kemiskinan. Pada level individu penduduk yang memiliki nilai konsumsi lebih rendah dari garis kemiskinan dinyatakan miskin. Sedangkan pada level agregat BPS BPS menggunakan indeks Foster-Greer-Thorbecke (FGT) yang terdiri dari *Head Count Index*, *Poverty Gap Index*, dan *Poverty Severity Index* untuk ukuran kemiskinan dan *Gini Ratio* untuk ukuran ketimpangan. Selain ukuran-ukuran kuantitatif tersebut, BPS juga menerbitkan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berisi karakteristik rumah tangga berdasarkan kondisi sosial demografi, kesehatan, pendidikan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan dan lain-lain.⁵³

Pada tahun 2000 BPS juga melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM) untuk mengetahui karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah *stepwise logistic regression*. Hasil SPKM menunjukkan bahwa ada delapan faktor yang sangat terkait dengan fenomena kemiskinan dengan tingkat kepercayaan 99 %. Adapun kedelapan faktor tersebut adalah : (1) luas lantai per kapita; (2) jenis lantai; (3) air minum/ketersediaan air bersih; (4) jamban/wc; (5) kepemilikan aset; (6) pendapatan (total pendapatan per bulan); (7) pengeluaran (persentasi pengeluaran untuk makanan); dan (8) konsumsi lauk-pauk. Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total skor dari domain rumah tangga miskin secara konseptual. Dengan demikian apabila suatu rumah tangga memiliki 5 (lima) ciri miskin maka digolongkan sebagai rumah tangga miskin.⁵⁴

⁵³ Badan Pusat Statistik, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2006, *op cit.*, hal. 29-30

⁵⁴ *Ibid*, hal. 16-18

Penelitian lainnya yang berhubungan, dilaksanakan oleh Tim LPEM-FEUI⁵⁵ yang menggunakan data Susenas 1990. Penelitian ini menjelaskan bahwa profil kemiskinan membantu keberhasilan dari program pembangunan melalui ketepatan indentifikasi target group dan target area. Menurut Tim LPEM-UI kemiskinan rumah tangga dapat dilihat dari 5 karakteristik, masing-masing: (a) karakteristik lokasi geografis; (b) karakteristik demografis; (c) karakteristik ekonomi, terdiri dari jabatan/pekerjaan, sumber penghasilan, pola konsumsi; (d) karakteristik sosial budaya; dan (e) karakteristik sistem ekonomi, berupa kriteria-kriteria khusus yang berhubungan dengan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada saat itu, yakni asumsi dasar (keswadayaan, bantuan modal, organisasi kelompok), kegiatan ekonomi sasaran IDT (petani gurem, buruh tani, nelayan dan perambah hutan), dan cara bertahan hidup yakni kondisi ketergantungan pada pihak lain.

Penelitian kemiskinan pada skala provinsi pernah dilakukan oleh Abdhul Aziiz Usman⁵⁶ untuk Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan data Susenas Kor Tahun 2002. Metode pengolahan data adalah Indeks FGT dan Regresi Logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: (a) karakteristik geografis daerah (desa atau kota); (b) karakteristik sosial dan demografi, terdiri dari usia kepala rumah tangga, kepala rumah tangga wanita, rasio ketergantungan dan jumlah anak, jaringan sosial, konsumsi makanan berprotein tinggi; (c) karakteristik pendidikan terdiri dari literasio, jenjang pendidikan orang tua; (d) karakteristik ketenagakerjaan, terdiri dari jenis lapangan usaha dan status pekerjaan kepala rumah tangga, jumlah jam kerja kepala rumah tangga, istri dan anak bekerja, (e) karakteristik perumahan, terdiri dari kondisi lantai, kondisi sumber air minum, kondisi tempat buang air besar, dan konsumsi bahan bakar.

⁵⁵ Tim LPEM-FEUI, *Profil dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta, 1994), hal. 4-11

⁵⁶ Abdhul Aziiz Usman, "Identifikasi Karakteristik Rumah Tangga Miskin yang Mempengaruhi Kemiskinan di Sumatera Barat", Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Jakarta: 2006, hal. 89-90

BAB III

DATA DAN METODOLOGI

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dua jenis yakni Data Potensi Desa (Podes) Provinsi Gorontalo dan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor Provinsi Gorontalo. Data-data tersebut dikumpulkan secara periodik oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Data Podes adalah data keruangan (spasial) yang menekankan pada penggambaran situasi wilayah (regional) dan pendekatan sektoral, lebih khusus tentang kemampuan atau daya/kekuatan yang dimiliki wilayah otonomi desa yang memungkinkan untuk dikembangkan. Nara sumber dalam Podes adalah Kepala Desa/Lurah, staf yang ditunjuk atau nara sumber lain yang relevan. Data yang dikumpulkan dalam Podes antara lain keterangan umum desa/kelurahan, kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan, sosial budaya, angkutan, komunikasi dan informasi, penggunaan lahan, dan ekonomi. Objek survey dalam Podes meliputi seluruh populasi atau seluruh desa/kelurahan atau nama lain (nagari) di Wilayah Republik Indonesia termasuk Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan Pemukiman Masyarakat Tertinggal (PMT). Podes dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan Sensus dan mendahului satu tahun sebelum sensus.

Sedangkan data Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas. Data yang dikumpulkan antara lain menyangkut bidang-bidang pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan, sosial ekonomi lainnya, kegiatan sosial budaya, konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, perjalanan, dan pendapat masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangganya. Susenas terbagi atas Susenas Modul

dan Susenas Kor. Susenas Modul terdiri dari 3 paket yakni modul konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, modul sosial budaya dan pendidikan, serta modul kesehatan dan perumahan yang dilaksanakan secara bergilir setiap tahun. Untuk memenuhi kebutuhan penghitungan tingkat kemiskinan setiap tahun, maka pada tahun-tahun dimana dilaksanakan modul Susenas bukan konsumsi dan pengeluaran, pengumpulan data dilakukan secara panel yaitu mencacah kembali rumah tangga terpilih modul konsumsi tahun sebelumnya tetapi dengan jumlah sampel yang lebih kecil.

Susenas Kor merupakan pengumpulan data-data pokok yang berhubungan dengan aspek sosial ekonomi, yang dilaksanakan setiap tiga tahun. Data yang dikumpulkan dengan kuesioner Kor mencakup antara lain : keterangan umum anggota rumah tangga, keterangan suku bangsa kepala rumah tangga, keterangan tentang kematian, keterangan tentang kesehatan, keterangan pendidikan, keterangan kegiatan ketenagakerjaan, keterangan fertilitas dan KB, keterangan perumahan, keterangan tentang rata-rata konsumsi/pengeluaran rumah tangga dan sumber penghasilan utama rumah tangga, dan keterangan luas lahan pertanian yang dikuasai.

Disamping data-data Susenas Kor dan Podes, analisa dilengkapi pula dengan informasi lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. Data pelengkap ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan serta dari berbagai unit kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo yang terkait. Sumber data ini dapat berupa laporan, hasil penelitian maupun kebijakan yang berhubungan dengan masalah kemiskinan. Data-data tersebut diharapkan dapat memperdalam kajian tentang faktor determinan kemiskinan sekaligus memberikan gambaran yang lebih luas tentang Provinsi Gorontalo.

3.2. Ruang Lingkup dan Pemanfaatan Data

Penelitian ini mengambil obyek di Provinsi Gorontalo dengan menganalisa Data Susenas Kor tahun 2002, 2005 dan 2006 serta Data Podes SE2006. Data Susenas Kor Provinsi Gorontalo tahun 2002

mencakup 7.840 sampel individu dan 2.016 sampel rumah tangga, sedangkan untuk tahun 2006 terdiri dari 12.651 sampel individu, 3.356 sampel rumah tangga. Sementara Data Podes SE2006 Provinsi Gorontalo meliputi seluruh desa di Provinsi Gorontalo sebanyak 450 desa/kelurahan/UPT. Sebaran sampel selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 3. 1
Sebaran Sampel Data Susenas 2002, 2005, 2006, dan Podes SE2006
Provinsi Gorontalo

No.	Data dan Observasi	Populasi	Sampel	Proporsi (%)
1	SUSENAS KOR 2002 *)			
	- Kabupaten/Kota	3	3	100,00
	- Kecamatan	21	21	100,00
	- Desa/kelurahan	373	120	32,17
	- Rumah tangga	227823	2016	0,88
	- Individu (ART)	855057	7840	0,92
2	SUSENAS KOR 2005 **)			
	- Kabupaten/Kota	5	5	100,00
	- Kecamatan	40	40	100,00
	- Desa/kelurahan	450	166	36,89
	- Rumah tangga	254692	2713	1,07
	- Individu (ART)	909083	10640	1,17
3	SUSENAS KOR 2006 **)			
	- Kabupaten/Kota	5	5	100,00
	- Kecamatan	40	40	100,00
	- Desa/kelurahan	454	204	44,93
	- Rumah tangga	239829	3356	1,40
	- Individu (ART)	941398	12651	1,34
4	PODES SE2006 **)			
	- Kabupaten/Kota	5	5	100,00
	- Kecamatan	40	40	100,00
	- Desa/kelurahan	450	450	100,00

*) Menurut Kode Daerah BPS Tahun 2000

***) Menurut Kode Daerah BPS Tahun 2004

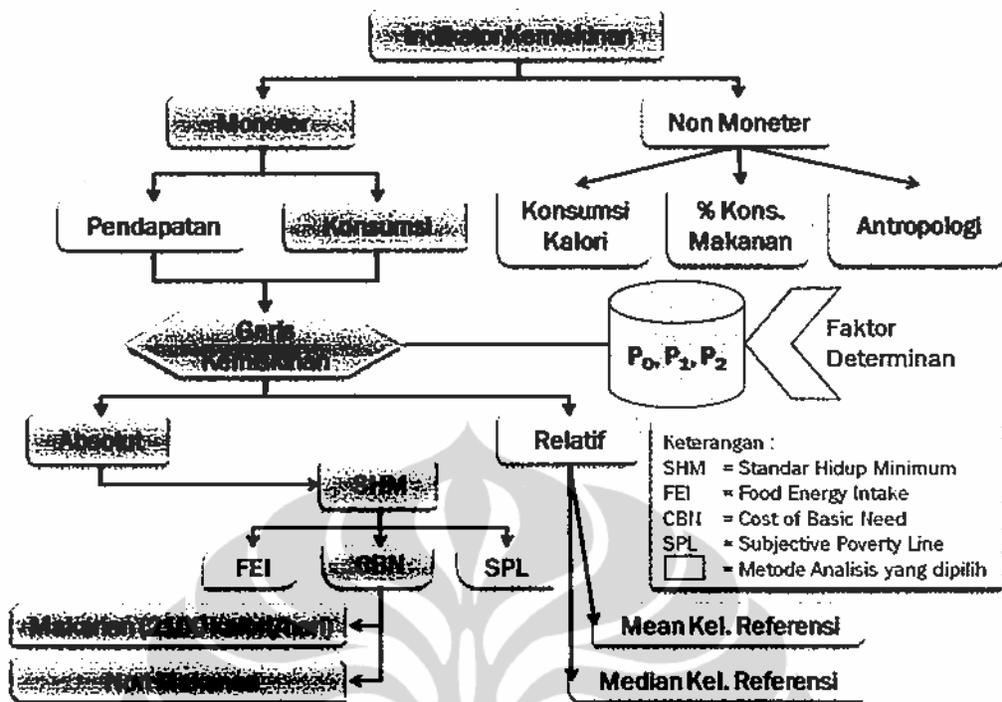
Data Susenas Kor Tahun 2002 dan 2006 diperlukan untuk mendapatkan ukuran kemiskinan pada tahun tersebut, sedangkan ukuran ketimpangan menggunakan data Susenas Kor Tahun 2002, 2005 dan 2006. Ukuran distribusi perubahan tingkat kesejahteraan dihitung dengan menggunakan data Susenas 2002 dan 2006 secara bersama-sama. Bagian terpenting pada data Susenas yang

dipergunakan sebagai data utama dalam perhitungan tingkat kemiskinan, ketimpangan dan distribusi perubahan tingkat kesejahteraan adalah tingkat konsumsi rata-rata rumah tangga per bulan sebagai pendekatan dalam pengukuran tingkat kesejahteraan. Penggunaan pendekatan konsumsi rumah tangga dalam analisis kemiskinan telah di jelaskan pada Bab II, khususnya sub bab 2.2.1. tentang Indikator Kemiskinan.

Untuk mencari faktor determinan kemiskinan digunakan kompilasi data Susenas Kor 2006 dan data Podes SE2006. Pemanfaatan data baik Susenas Kor maupun Podes tidak mencakup seluruh variabel yang tersedia, tetapi terbatas pada variabel-variabel tertentu secara selektif yang ditentukan sebagai variabel penelitian yang semuanya merupakan data non moneter. Khusus untuk pemanfaatan Data Podes SE2006, juga tidak mencakup semua observasi (desa), tetapi hanya desa-desa yang terpilih sebagai sampel pada Susenas kor 2006.

3.3. Metode Analisis

Analisis dalam penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan terdahulu. Untuk memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan digunakan Index Foster-Greer-Thorbecke (FGT), ukuran ketimpangan dianalisa dengan Koefisien Gini dan Kurva Lorenz, perubahan distribusi pendapatan diukur dengan Growth Incidence Curve, sedangkan untuk menghitung faktor determinan kemiskinan digunakan Metode Logit. Kerangka analisis dalam penelitian tesis ini disusun sebagaimana Gambar 3.1.



Gambar 3. 1
Kerangka Analisis Kemiskinan

3.3.1. Indeks Foster-Greer-Thorbecke (FGT)

Index FGT merupakan ukuran yang paling sering dipakai untuk mengukur kemiskinan secara agregat. Untuk menggunakan metode ini dibutuhkan data konsumsi per kapita dan garis kemiskinan dengan asumsi bahwa sampel yang digunakan dapat merepresentasikan populasi secara acak sederhana. Indeks FGT terdiri dari tiga macam ukuran agregat tentang kemiskinan masing-masing *Head Count Index*, *Poverty Gap Index*, dan *Poverty Severity Index*, yang secara umum diformulasikan sebagai berikut¹:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{G_i}{z} \right)^{\alpha} \dots\dots\dots (3. 1)$$

¹ Foster, James, J. Greer and Eric Thorbecke. "A Class of Decomposable Poverty Measures," *Econometrica*, LII,3 (1984), hal. 761-765 dalam World Bank Institute (2005), *Introduction to Poverty Analysis*, hal. 69 dan 74. Diakses 5 Agustus 2007 dari World Bank.
<http://siteresources.worldbank.org/PGLP/Resources/PovertyManual.pdf>

Dimana:

- α = Parameter yang bernilai 0, 1 atau 2
 - 0 = Poverty Head Count
 - 1 = Poverty Gap
 - 2 = Poverty Severity
- G_i = Poverty Gap sampel ke-i
- z = garis kemiskinan
- N = total populasi atau sampel

Sedangkan *Poverty Gap* dinyatakan dengan rumus:

$$G_i = (z - y_i) \cdot I(y_i < z) \dots \dots \dots (3. 2)$$

- G_i = Poverty Gap
- y_i = pengeluaran sampel ke i
- z = garis kemiskinan
- $I(.)$ = indikator yang bernilai 1 jika syarat yang berada dalam kurung benar, dan 0 jika salah

Aplikasi rumus Indeks FGT dalam penelitian ini dihitung dengan bantuan software Stata SE 8.2 for Windows.

a. Head Count Index

Headcount index disimbolkan dengan P_0 , secara khusus dapat juga dirumuskan sebagai berikut :

$$P_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I(y_i < z) \dots \dots \dots (3. 3)$$

Dimana:

- P_0 = *Headcount Index*
- N = total populasi atau sampel
- y_i = pengeluaran sampel ke i
- z = garis kemiskinan
- $I(.)$ = indikator yang bernilai 1 jika syarat yang berada dalam kurung benar, dan 0 jika salah, jadi jika pengeluaran (y_i)

kurang dari garis kemiskinan maka $I(.) = 1$, dan individu tersebut dinyatakan miskin

Dengan lebih sederhana rumus tersebut dapat ditulis:

$$P_0 = \frac{N_p}{N} \dots\dots\dots(3.4)$$

dimana N_p = jumlah orang miskin.

Angka yang dihasilkan merupakan angka persentasi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Nilai P_0 berkisar antara 0 sampai dengan 1. Sebagai contoh jika nilai $P_0 = 0,2$ maka berarti 20 % penduduk hidup dibawah garis kemiskinan.

Kemudahan penghitungan P_0 menjadikan metode ini sangat banyak digunakan untuk mengetahui persentasi penduduk miskin pada suatu negara atau daerah tertentu. Walaupun demikian P_0 tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kemiskinan karena beberapa alasan² berikut: (a) angka tersebut tidak dapat membedakan intensitas kemiskinan di suatu daerah dengan daerah lainnya; (b) tidak dapat menggambarkan berapa dalam kemiskinan yang dialami oleh masyarakat miskin tersebut, serta tidak dapat menjelaskan pergeseran tingkat pendapatan atau konsumsi orang yang hidup dibawah garis kemiskinan; (c) satuan dalam estimasi kemiskinan adalah individu (tidak dapat melakukan estimasi kemiskinan dalam satuan rumah tangga), padahal persentasi rumah tangga miskin tidak selalu sama dengan persentasi individu miskin.

b. Poverty Gap Index

Berdasarkan rumus umum FGT diatas, *Poverty Gap Index* atau indeks kedalaman kemiskinan yang disimbolkan dengan P_1 , dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

² World Bank Institute (2005), *Introduction to Poverty Analysis*, hal. 70-71. Diakses 5 Agustus 2007 dari World Bank.
<http://siteresources.worldbank.org/PGLP/Resources/PovertyManual.pdf>

$$P_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{G_i}{z} \dots\dots\dots (3.5)$$

Dimana:

- P_1 = *Poverty Gap Index*
- N = total populasi atau sampel
- G_i = *Poverty Gap*
- z = garis kemiskinan

Nilai P_1 merupakan rata-rata proporsional *Poverty Gap* (kesenjangan pengeluaran penduduk) terhadap garis kemiskinan dimana kesenjangan pengeluaran penduduk tidak miskin adalah nol. Dengan mengetahui kesenjangan konsumsi dapat dilakukan penghitungan biaya minimum yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan. Angka tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan anggaran belanja untuk menaikkan tingkat konsumsi orang miskin sehingga mencapai garis kemiskinan, misalnya melalui subsidi dengan asumsi bahwa dana tersebut dapat terdistribusi sesuai target.

Seperti P_0 , P_1 juga memiliki kelemahan. Kelemahan P_1 adalah bahwa nilai indeks tersebut tidak peka terhadap kesenjangan tertinggi dalam kelompok sampel/populasi yang diteliti. Dengan kata lain P_1 tidak dapat merefleksikan kesenjangan konsumsi/pendapatan diantara orang miskin itu sendiri.

c. Poverty Severity Index

Rumus *Poverty Severity Index* atau indeks keparahan kemiskinan (P_2) adalah sebagai berikut:

$$P_2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{G_i}{z} \right)^2 \dots\dots\dots (3.6)$$

Dimana:

- P_2 = *Poverty Severity Index*
- N = total populasi atau sampel
- G_i = *Poverty Gap*
- z = garis kemiskinan

P_2 secara relatif dapat membandingkan ukuran kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin pada suatu daerah dengan daerah lainnya. Semakin tinggi nilai P_2 maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Walaupun demikian angka P_2 sulit diinterpretasi, oleh karena itu jarang digunakan secara luas.

3.3.2. Kurva Lorenz dan Koefisien Gini

Kurva Lorenz (*Lorenz Curve*)³ adalah kurva frekuensi kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu misalnya pendapatan atau konsumsi terhadap distribusi rata sebagai gambaran kesetaraan. Untuk menggambarkan Kurva Lorenz terlebih dahulu sampel atau populasi yang diteliti diurutkan menurut pendapatan atau konsumsi dari yang terendah kemudian dipisahkan secara merata ke dalam 5 atau 10 kelompok atau masing-masing 20% atau 10%. Kemudian dihitung jumlah pendapatan pada masing-masing kelompok untuk selanjutnya dikonversi pada angka persentasi. Kurva Lorenz dibentuk dengan menghubungkan titik-titik koordinat persentasi kumulatif penduduk pada sumbu horizontal dan persentasi kumulatif pendapatan pada sumbu vertikal sehingga menghasilkan grafik seperti pada Gambar 3.2. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna.

Koefisien Gini dihitung berdasarkan batasan $A/(A+B)$. Jika $A=0$ maka Koefisien Gini bernilai 0, yang berarti pemerataan sempurna. Sebaliknya jika $B=0$ maka Koefisien Gini bernilai 1, artinya ketimpangan sempurna. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Gini} = 1 - \sum_{i=1}^N (x_i - x_{i-1})(y_i + y_{i-1}) \dots\dots\dots (3. 7)$$

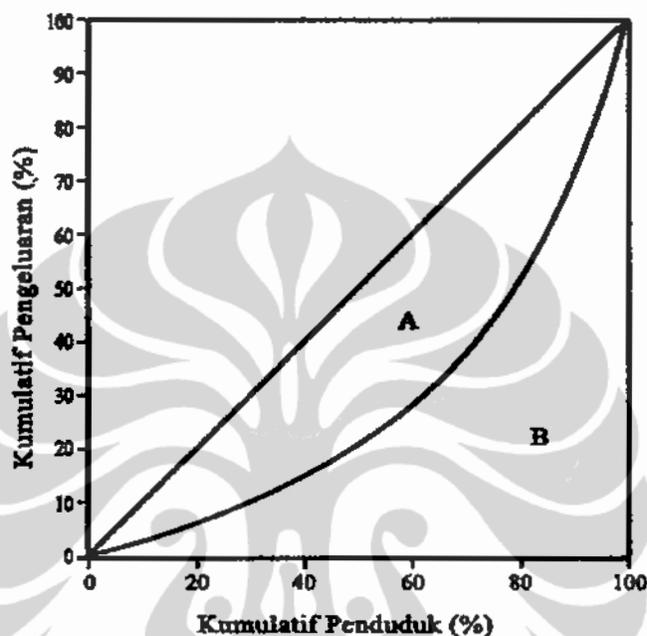
³ Badan Pusat Statistik, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2005 (Jakarta: BPS, 2005), hal. 34 dan 26

Dimana:

x_i = nilai pada sumbu horisontal pada kelompok i

y_i = nilai pada sumbu vertikal pada kelompok i

N = jumlah kelompok



Gambar 3. 2
Koefisien Gini menurut Kurva Lorenz

Pembuatan Kurva Lorenz dan penghitungan Koefisien Gini dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan software Stata SE 8.2 for Windows.

3.3.3. Growth Incidence Curve

Growth Incidence Curve (GIG) adalah kurva yang menghubungkan antara pertumbuhan konsumsi atau pendapatan kelompok penduduk menurut persentil dengan garis median pertumbuhan sebagai patokan rata-rata. Kurva ini berguna untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan penduduk menguntungkan orang miskin (*pro poor*) atau tidak.

Untuk membuat GIG dibutuhkan data konsumsi atau pendapatan dalam dua periode waktu. Data pada kedua periode harus

merupakan nilai konsumsi riil yang telah di-inflate untuk menghilangkan dampak inflasi. Data masing-masing periode dikelompokkan menjadi beberapa group (biasanya 100 grup atau persentil), kemudian dihitung pertumbuhan pada masing-masing persentil dengan rumus⁴:

$$g_t(p) = [y_t(p) / y_{t-1}(p)] - 1 \dots\dots\dots (3. 8)$$

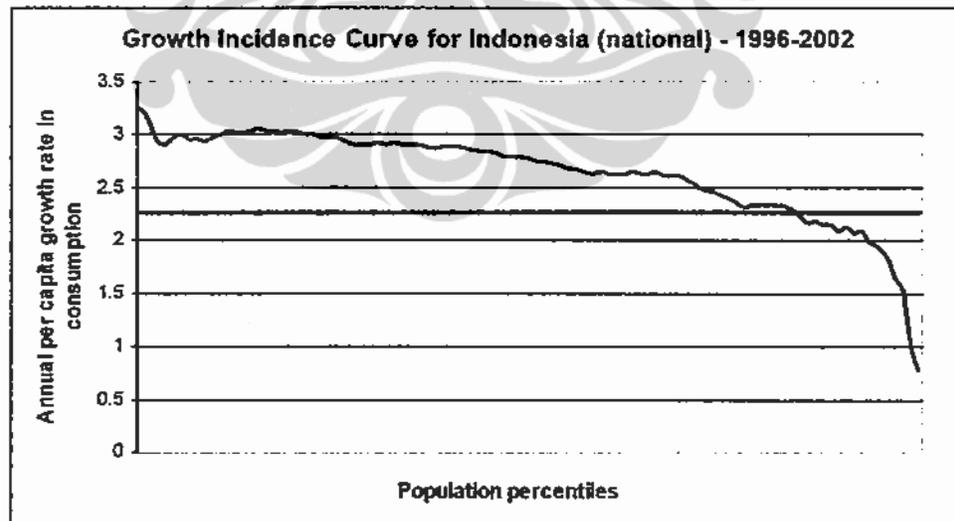
Dimana

$g_t(p)$ = pertumbuhan pada persentil ke p

$y_t(p)$ = total konsumsi atau pendapatan pada persentil p tahun t

$y_{t-1}(p)$ = total konsumsi atau pendapatan pada persentil p tahun t-1

Nilai pertumbuhan ditempatkan pada sumbu vertikal dan nilai persentil pada sumbu horisontal. Kurva GIC yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat tingkat pertumbuhan tingkat pertumbuhan pada masing-masing persentil seperti contoh GIC Indonesia Tahun 1996-2002 pada Gambar 3.3.



Sumber: C. Peter Timmer

Gambar 3. 3
GIC Indonesia Tahun 1996-2002

⁴ Martin Ravallion dan Shaobua Chen, "Measuring Pro-Poor Growth", *Policy Research Working Paper No. 2666* (August 2001), The World Bank Development Research Group Poverty

Untuk penelitian ini digunakan data konsumsi per kapita penduduk Provinsi Gorontalo pada Susenas Kor Tahun 2002 dan 2006. Data tahun 2006 akan dikonversi kedalam nilai konsumsi riil melalui proses *inflate* untuk menghilangkan dampak inflasi pada periode tersebut. Pengolahan dilakukan dengan bantuan software Stata SE 8.2 for Windows.

3.3.4. Metode Logit

Metode logit atau regresi logistik merupakan model Ekonometrika yang bersifat khusus dimana variabel terikatnya (*dependent*) berupa data kategorik atau kualitatif yang bersifat dikotomi (*dichotomous*) yang memiliki nilai satu atau nol, disebut juga skala biner (*binomial dummy variable*), sedangkan variabel bebas dapat berupa kombinasi data kuantitatif (*kontinyu/metrik*) atau maupun variabel kualitatif (*kategorikal/non metrik*).⁵ Sebagaimana model regresi pada umumnya, model regresi logistik juga digunakan untuk mengetahui tingkat ketergantungan suatu variabel (*variable tak bebas/dependent*) terhadap suatu variabel bebas (*variabel penjelas/explanatory/independent*). Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat juga dapat dinyatakan dalam bentuk peluang terjadinya nilai variabel terikat tertentu apabila variabel bebas memiliki nilai tertentu.

Model Logit yang dikembangkan dalam menganalisa faktor determinan kemiskinan dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Model pertama menghitung seluruh data dengan tidak memisahkan daerah perkotaan dan perdesaan, dua model lainnya menghitung data dengan memisahkan observasi berdasarkan karakteristik daerah yakni perkotaan dan perdesaan.

⁵ Damodar N. Gujarati, *Basic Econometrics, Fourth Edition, International Edition* (Singapore: McGeaw-Hill Higher Education, 2003), hal. 581

a. Estimasi Model Regresi Logistik

Estimasi model regresi logistik dengan k variabel bebas secara umum dirumuskan sebagai berikut⁶ :

$$P(Y = 1 | x_i) = \pi_i = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \dots + \beta_k x_{ki})}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \dots + \beta_k x_{ki})} \dots\dots\dots (3. 9)$$

atau

$$P(Y = 1 | x_i) = \pi_i = \frac{\exp(\sum_{j=0}^k \beta_j x_{ij})}{1 + \exp(\sum_{j=0}^k \beta_j x_{ij})}, i = 1, 2, \dots, n \dots\dots\dots (3. 10)$$

atau

$$P(Y = 1 | x_i) = \pi_i = \frac{1}{1 + \exp(-z)}, i = 1, 2, \dots, n \dots\dots\dots (3. 11)$$

dimana

$$z = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \dots + \beta_k x_{ki}$$

$$x_{i0} = 1 \text{ untuk semua } i$$

$$0 \leq \pi_i \leq 1$$

Y = variabel terikat biner (Y=1: Miskin dan Y=0: Tidak Miskin)

x_1, x_2, \dots, x_n = variabel bebas

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ = parameter koefisien regresi model logit

Berdasarkan rumus umum tersebut dengan memasukkan faktor determinan kemiskinan yang diuraikan pada Bab II maka estimasi model regresi logistik dalam penelitian ini dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

⁶ Anton Hendranata, Model Logit dan Probit, Handout Kuliah Ekonometrika Terapan MPKP FE-UI, 2007

$$P(Y = 1 | x_i) = \frac{1}{1 + \exp(-z)}, i = 1, 2, \dots, 38 \dots \dots \dots (3. 12)$$

$$z = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_{38} X_{38i} + \varepsilon$$

Dimana

P = variabel terikat biner yang menunjukkan peluang seorang individu berstatus miskin atau tidak miskin

X_1, X_2, \dots, X_{38} = variabel bebas, sebagaimana dirinci pada Tabel 3.

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{38}$ = parameter koefisien regresi model logit

Tabel 3. 2
Definisi Variabel Operasional

No.	Nama Variabel	Definisi	Nilai
x1	DES_KOT	Status daerah (kota/desa)	1 jika perdesaan, 0 jika perkotaan
x2	JRK_KAB	Jarak ke pusat kabupaten (KM)	1 jika lebih dari 10.6 KM, 0 jika kurang atau sama dengan 10.6 KM
x3	RAW_BCANA	Kerawanan bencana alam	1 jika rawan, 0 jika tidak rawan
x4	FAS_JALAS	Fasilitas jalan beraspal	1 jika permukaan jalan terluas adalah aspal/beton, 0 jika lainnya
x5	AKS_LIST	Fasilitas listrik PLN	1 jika memiliki jaringan PLN, 0 jika tidak
x6	AKS_KOM	Fasilitas Komunikasi	1 jika memiliki jaringan telepon kabel atau seluler, 0 jika tidak
x7	FAS_LKEU	Ketersediaan lembaga keuangan	1 jika cukup tersedia, 0 jika tidak
x8	AKS_PELKES	Akses terhadap pelayanan kesehatan	1 jika cukup tersedia, 0 jika tidak
x9	JRK_SEKOLAH	Jarak ke SMP terdekat	1 jika lebih dari 4KM, 0 jika kurang atau sama dengan 4 KM
x10	AKS_DIKTRAM	Akses terhadap lembaga pendidikan keterampilan	1 jika tersedia, 0 jika tidak

Tabel 3. 2 (lanjutan)

No.	Nama Variabel	Definisi	Nilai
x11	TRA_GRYONG	Tradisi Gotong-royong	1 jika ada, 0 jika tidak
x12	RAW_RUSUH	Kerawanan perkelahian massal	1 jika rawan, 0 jika tidak
x13	JUM_ART	Jumlah Anggota Rumah Tangga	1 jika jumlah ART lebih dari 5 orang, 0 jika kurang atau sama dengan 5 orang
x14	DEP_RATRT	Dependency ratio	1 Jika Dependensi Rasio lebih dari 1, 0 jika kurang dari atau sama dengan 1
x15	KRT_USMUDA	Usia kepala rumah tangga	1 jika usia KRT berusia dibawah 35 tahun, 0 jika berusia 35 tahun keatas
x16	KRT_PEREMPUAN	Jenis kelamin kepala rumah tangga	1 jika perempuan, 0 jika laki-laki
X17	APAK_RT	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Data metrik
x18	PEK_PETANI	Pekerjaan kepala rumah tangga	1 jika petani informal tanaman campuran atau tanaman khusus, 0 jika lainnya
x19	PEK_BURTAN	Pekerjaan kepala rumah tangga	1 jika buruh pertanian informal, 0 jika lainnya
x20	PEK_PETERNAK	Pekerjaan kepala rumah tangga	1 jika peternak atau buruh ternak informal , 0 jika lainnya
x21	PEK_HUTAN	Pekerjaan kepala rumah tangga	1 jika pekerja Kehutanan Informal, 0 jika lainnya
x22	PEK_PRIKANAN	Pekerjaan kepala rumah tangga	1 jika perikanan informal, 0 jika lainnya
x23	PEK_DAGANG	Pekerjaan kepala rumah tangga	1 jika Pedagang Informal, 0 jika lainnya
x24	PEK_PEMBRT	Pekerjaan kepala rumah tangga	1 jika pembantu rumah tangga dan tenaga jasa kerumahtanggaan, 0 jika lainnya
x25	PEK_BURKAS	Pekerjaan kepala rumah tangga	1 jika buruh kasar, 0 jika lainnya
X26	JUM_JAMKER	Jumlah jam kerja seminggu rata-rata anggota rumah tangga	1 jika kurang dari 7 jam seminggu
X27	AKS_KREDUS	Akses rumah tangga terhadap fasilitas kredit usaha	1 jika pernah memanfaatkan, 0 jika tidak
X28	ATAP_RUMBIA	Jenis atap rumah terluas	1 jika ijuk/rumbia atau sirap, 0 jika tidak

Tabel 3. 2 (lanjutan)

No.	Nama Variabel	Definisi	Nilai
X29	DIND_BAMBU	Jenis dinding rumah	1 jika bagian terluas adalah bambu, 0 jika tidak
X30	LANT_PERART	Luas lantai per ART m2	1 jika kurang dari 8 m ² , 0 jika lebih dari atau sama dengan 8 m ²
X31	GANG_KES	Keluhan kesehatan	1 jika ada ART yang mengalami keluhan selama 1 hari dalam sebulan, 0 jika tidak
X32	KRT_DIKSD	Pendidikan kepala rumah tangga	1 jika maksimum lulus SD sederajat, 0 jika memiliki ijazah lebih tinggi
X33	KRT_DIKSMP	Pendidikan kepala rumah tangga	1 jika memiliki ijazah SMP sederajat sebagai pendidikan tertinggi, 0 jika lainnya
X34	RAS_DIKDAS	Rasio ART dewasa yang memenuhi standar pendidikan dasar	Data Metrik
X35	APM_SDRT	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar	Data Metrik
X36	APM_SMPRT	Angka Partisipasi Murni SMP	Data Metrik
X37	AIR_BERS	Sumber Air Minum	1 jika berasal dari sumber air bersih, 0 jika tidak
X38	FAS_KLOSET	Fasilitas Buang Air Besar	1 jika menggunakan kloset, 0 jika tidak

Nilai P dalam persamaan ini menunjukkan peluang bahwa variabel terikat (Y) bernilai 1 atau peluang individu yang diobservasi adalah miskin. Dengan demikian terdapat pula kemungkinan nilai Y = 0 atau tidak miskin. Peluang untuk Y=0 dinyatakan dengan rumus:

$$1 - P = \frac{1}{1 + \exp(z)} = \frac{\exp(-z)}{1 + \exp(-z)} \dots\dots\dots (3. 13)$$

Perbandingan antara probabilitas bernilai 1 atau 0 disebut odd atau resiko, yakni perbandingan antara probabilitas terjadinya suatu

peristiwa dengan probabilitas tidak terjadinya suatu peristiwa, yang dinyatakan dengan rumus⁷:

$$\frac{P}{1-P} = \frac{1}{\frac{\exp(-z)}{1+\exp(-z)}} = \frac{1}{\exp(-z)} = \exp(z) \dots\dots\dots (3.14)$$

$$\exp(z) = \exp(\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki}) \dots\dots\dots (3.15)$$

Besar peluang atau resiko tersebut dapat diketahui melalui proses penghitungan nilai eksponensial konstanta dan masing-masing koefisien variabel dengan melakukan log terhadap odd:

$$L = \ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = z = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} \dots\dots\dots (3.16)$$

b. Estimasi Koefisien Model

Untuk mengestimasi parameter koefisien regresi model logit digunakan metode maksimum likelihood sebagai berikut:

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n P\{y_i = 1 | x_i; \beta\}^{y_i} P\{y_i = 0 | x_i; \beta\}^{1-y_i} \dots\dots\dots (3.17)$$

$$\log L(\beta) = \sum_{i=1}^n y_i \log F(x_i; \beta) + \sum_{i=1}^n (1 - y_i) \log(1 - F(x_i; \beta)) \dots\dots\dots (3.18)$$

Dengan melakukan First Order Conditions (FOC) maka maksimum likelihood di atas dapat diselesaikan dengan :

$$\frac{\partial \log L(\beta)}{\partial \beta} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{y_i - F(x_i; \beta)}{F(x_i; \beta)(1 - F(x_i; \beta))} f(x_i; \beta) \right] x_i = 0 \dots\dots\dots (3.19)$$

$$\frac{\partial \log L(\beta)}{\partial \beta} = \sum_{i=1}^n \left[y_i - \frac{\exp(x_i; \beta)}{1 + \exp(x_i; \beta)} \right] x_i = 0 \dots\dots\dots (3.20)$$

⁷ Nachrowi Djalal Nachrowi dan Hardius Usman, Penggunaan Teknik Ekonometri, Edisi Revisi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 249

dimana:

f = turunan pertama dari F (F')

Nilai koefisien regresi model logit untuk masing-masing variabel menunjukkan tingkat perubahan (naik atau turun) estimasi logit yang disebabkan oleh perubahan 1 satuan pada variabel tersebut dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Proses estimasi model dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program EViews 5 Enterprise Edition.

c. Pengujian Model Logistik

Sebelum model diaplikasikan terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian sebagai berikut:

1. Pengujian Secara parsial

Untuk mengetahui signifikansi setiap parameter seperti uji t pada regresi linier, dalam model logistik pengujian dilakukan melalui Statistik Wald atau statistik z dengan hipotesa sebagai berikut⁸:

$H_0 : \beta_k = 0$ untuk suatu k tertentu; $k=0,1,2,\dots,l$

$H_1 : \beta_k \neq 0$

Statistik uji yang digunakan adalah

$$W_k = \left[\frac{\hat{\beta}_k}{SE(\hat{\beta}_k)} \right]^2 ; k=0,1,2,\dots,l$$

Statistik ini berdistribusi Khi kuadrat dengan derajat bebas 1 atau sering ditulis $W_k \sim \chi^2$

Jika $W_k > \chi^2_{\alpha,1}$ maka H_0 ditolak, dimana α adalah tingkat signifikansi yang dipilih. Penolakan H_0 artinya parameter tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α . Secara sederhana dalam output EViews tingkat signifikansi dapat dilihat pada nilai yang ada pada kolom probabilitas.

⁸ *Ibid*, hal. 256

2. Pengujian secara keseluruhan

Pengujian signifikansi model secara keseluruhan dalam model logit dilakukan melalui Likelihood-Ratio (LR). Metode ini hampir sama dengan uji F pada regresi linier. Pengujian LR menggunakan hipotesa sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$$

artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$$H_1 : \text{sekurang-kurangnya terdapat satu } \beta_k \neq 0$$

artinya secara bersama-sama ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini sering disebut juga Uji G yang dirumuskan sebagai berikut ⁹:

$$G = -2 \ln \left[\frac{\text{likelihood (Model B)}}{\text{likelihood (Model A)}} \right]$$

Model B : model yang hanya terdiri dari konstanta saja

Model A : model yang terdiri dari seluruh variabel.

G berdistribusi KHI kuadrat dengan derajat bebas k atau $G \sim \chi^2_k$

Jika $G > \chi^2_{\alpha, k}$ maka H_0 ditolak, dimana α adalah tingkat signifikansi yang dipilih. Output EViews juga menyajikan tingkat signifikansi dapat dilihat pada nilai Probability (LR stat).

3. Goodness of Fit

Uji *Goodness of Fit* atau ketepatan perkiraan (R^2) dilakukan untuk mendeteksi ketepatan paling baik dari garis regresi. Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi R^2 merupakan besaran nilai non negatif. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan 1. Koefisien determinasi bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sebaliknya nilai koefisien determinasi 1 berarti suatu kecocokan sempurna dari ketepatan perkiraan model. Dalam model Logistik R^2 dinyatakan dengan

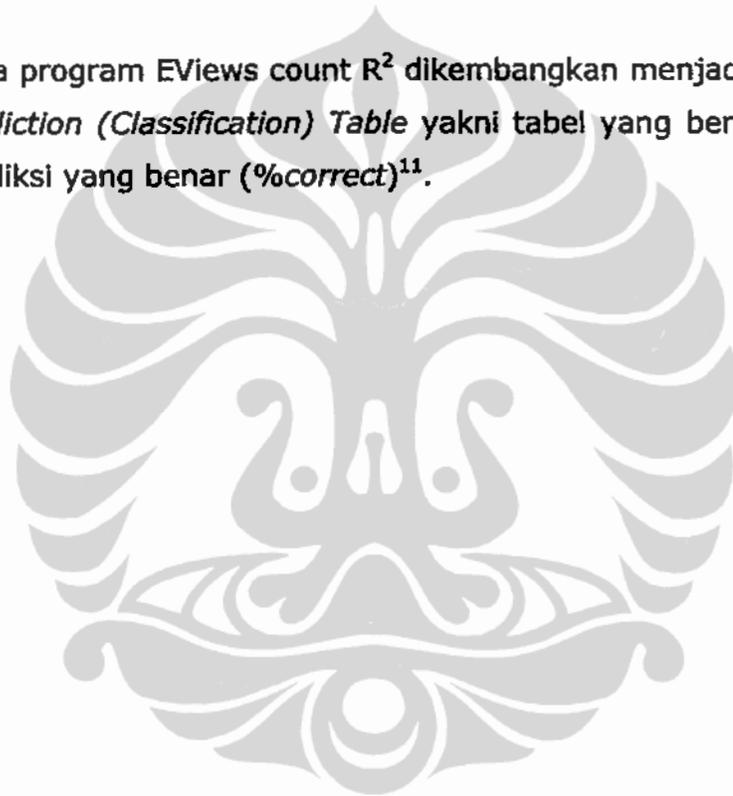
⁹ *Ibid*, hal. 255

McFadden R^2 atau *pseudo* R^2 . Semakin tinggi nilai McFadden R^2 maka model semakin baik.

Identifikasi *goodness of fit* lainnya dapat dilakukan dengan cara menghitung count R^2 yang didefinisikan¹⁰:

$$\text{count } R^2 = \frac{\text{Jumlah prediksi yang benar}}{\text{Jumlah observasi}}$$

Pada program EViews count R^2 dikembangkan menjadi *Expectation-Prediction (Classification) Table* yakni tabel yang berisi persentasi prediksi yang benar (*%correct*)¹¹.



¹⁰ Damodar N. Gujarati, *op. Cit.*, hal. 606

¹¹ Quantitative Micro Software (2004), *EViews 5 User's Guide*. hal. 626

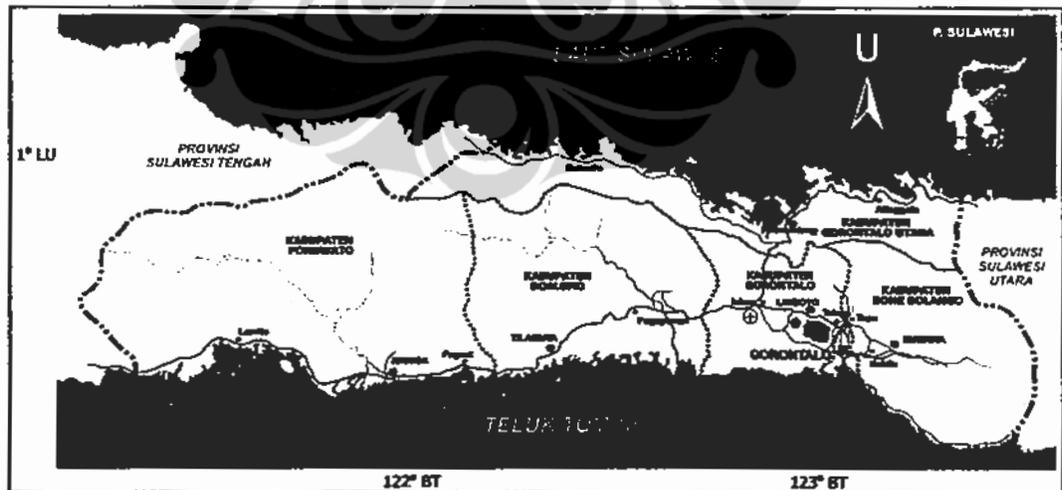
BAB IV

DESKRIPSI UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1. Kondisi Geografis dan Karakteristik Pertanian

Provinsi Gorontalo adalah salah satu provinsi di bagian utara Pulau Sulawesi yang ditetapkan dengan UU No. 38 Tahun 2000 sebagai provinsi yang terpisah dari Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah Gorontalo terbagi atas 1 Kota yakni Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi, dan 5 kabupaten masing-masing Kabupaten Gorontalo, Bonebolango, Boalemo, Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara yang baru dimekarkan dari Kabupaten Gorontalo pada bulan Desember 2006.

Posisi Gorontalo secara astronomis terletak diantara $0^{\circ}19^1-1^{\circ}15^1$ Lintang Utara dan $121^{\circ}23^1-123^{\circ}43^1$ Bujur Timur, hampir tepat di garis katulistiwa. Secara geografis diapit oleh Laut Sulawesi di sebelah Utara, Teluk Tomini di sebelah Selatan, Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur, dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat.



Gambar 4. 1
Peta Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo memiliki wilayah daratan seluas 12.215,44 km² (0,64 % luas Indonesia) dan lautan seluas 50.500 km². Panjang garis pantai di bagian Utara dan Selatan \pm 590 km. Topografi

Gorontalo didominasi oleh perbukitan dengan ketinggian 100-500 m di atas permukaan laut meliputi 45% luas daratan dan daerah curam (kemiringan 15-40%) meliputi 39% luas daratan, sebagaimana dirinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1
Rincian Luas Lahan di Provinsi Gorontalo
Berdasarkan Kemiringan Tahun 2005

No.	Tingkat Kemiringan	Luas (ha)	Persentasi
1	Datar (0-2%)	282,499	24 %
2	Bergelombang (2-15%)	66,824	6 %
3	Curam (15-40%)	457,150	39 %
4	Sangat Curam (>40%)	378,206	32 %

Sumber : PSIPD BAPPEDA Provinsi Gorontalo

Tabel 4. 2
Rincian Luas Lahan di Provinsi Gorontalo
Berdasarkan Ketinggian Tahun 2005

No.	Ketinggian di atas permukaan laut (m)	Luas (ha)	Persentasi
1	0 - 50	132,293	11 %
2	50 - 100	138,001	12 %
3	100 - 500	538,153	45 %
4	500 - 1000	300,414	25 %
5	1000 - 1500	68,180	6 %
6	>1500	7,645	1 %

Sumber : PSIPD BAPPEDA Provinsi Gorontalo

Sebagaimana layaknya, lahan yang berada pada dataran yang cukup tinggi terlebih dengan struktur yang tidak rata maka sebahagian besar lahan pertanian dimanfaatkan sebagai ladang atau kebun. Hanya sebahagian kecil dari lahan pertanian di Gorontalo yang dapat dijadikan sawah yakni seluas 32.295 ha atau 1/8 dari total lahan perkebunan seluas 285.337 ha. Rincian penggunaan lahan ditunjukkan dengan Tabel 4.3.

Keadaan tanah dan pemanfaatannya mempengaruhi karakteristik pertanian di Provinsi Gorontalo. Sebahagian besar masyarakat tani di Gorontalo merupakan petani ladang. Kelangkaan lahan sawah menjadi tantangan tersendiri bagi petani untuk dapat memilikinya. Banyak diantara mereka yang terpaksa menggarap lahan dengan kemiringan yang curam dan berada di pegunungan sebagai alternatif terakhir untuk mencari nafkah. Pada umumnya lahan pertanian di pegunungan ditanami jagung, umbi-umbian, sayur-mayur, pisang dan lain-lain. Jagung merupakan tanaman yang paling banyak dipilih oleh petani Gorontalo dalam bercocok tanam. Luas panen jagung pada tahun 2005 mencapai 107.752 ha dengan produksi 400.045,99 ton atau rata-rata produksinya 37,13 kuintal per ha. Sedangkan Luas panen padi sawah pada tahun 2005 adalah 37.841 ha dengan produksi mencapai 164.210 ton atau rata-rata produksi 43,39 kuintal per ha. Komoditi pertanian utama di Gorontalo untuk kelompok sayur-sayuran adalah cabe dan tomat, sedangkan untuk tanaman perkebunan yang paling dominan adalah tanaman kelapa dalam, kakao, cengkeh, kemiri, dan aren.

Tabel 4. 3
Rincian Penggunaan Lahan di Provinsi Gorontalo Tahun 2005

No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentasi
1	Sawah	32,295	2.7%
2	Pekarangan/ Bangunan & Halaman	36,202	3.1%
3	Tegal/Kebun	17,967	9.9%
4	Ladang/Huma	57,722	4.9%
5	Penggembalaan/Padang Rumput	16,919	1.4%
6	Rawa tidak ditanami padi	5,486	0.5%
7	Tambak/Kolam/Tebat/Empang	2,533	0.2%
8	Sementara tidak diusahakan	57,697	4.9%
9	Hutan Rakyat	46,679	3.9%
10	Hutan Negara	75,062	48.5%
11	Perkebunan	09,648	9.2%
12	Lain-lain	27,961	10.8%

Sumber: Gorontalo Dalam Angka Tahun 2006, BPS Provinsi Gorontalo

4.2. Dinamika Sosial Budaya dan Demografi

Penduduk Gorontalo pada tahun 2005 berjumlah 909.083 jiwa, jika dibandingkan dengan luas wilayah maka dapat diperoleh tingkat kepadatan penduduk sebesar 74 jiwa per km². Daerah terpadat adalah Kota Gorontalo dengan tingkat kepadatan 2.414 jiwa per km². Tingkat kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 4
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Per Km² Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo
Tahun 2005

No.	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Tingkat Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Kabupaten Boalemo	2,248.24	106,790	47
2	Kabupaten Gorontalo	3,426.98	416,224	121
3	Kabupaten Pohuwato	4,491.03	106,379	24
4	Kabupaten Bone Bolango	1,984.40	123,300	62
5	Kota Gorontalo	64.79	156,390	2,414
	Provinsi Gorontalo	12,215.44	909,083	74

Sumber: Gorontalo Dalam Angka Tahun 2006, BPS Provinsi Gorontalo

Dengan kepadatan penduduk yang rendah dan ritme aktivitas yang tidak terlalu tinggi maka masyarakat Gorontalo dapat menjalin komunikasi sosial dengan baik. Umumnya penduduk pada suatu desa masih dapat saling mengenal, bahkan memiliki hubungan keluarga satu sama lainnya. Hubungan persaudaraan dan kekerabatan merupakan perekat sosial yang dipelihara sejak zaman dahulu yang diperkuat dengan doktrin nilai-nilai religius yang bersumber dari Agama Islam sebagai agama kerajaan pada masa itu. Implementasi nilai-nilai sosial-religius pada masyarakat Gorontalo dilakukan dalam bentuk saling membantu, gotong-royong, saling silaturahmi, membagi masakan kepada tetangga dan sebagainya.

Kehidupan yang begitu bersahaja juga ditunjukkan dalam hubungan sosial ekonomi dengan munculnya berbagai sub sistem sosial yang khas. Menurut Alim S. Niode¹ dalam kehidupan masyarakat Gorontalo terdapat 13 sub sistem sosial, 9 diantaranya menggambarkan susasana kekeluargaan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi secara bersama-sama dan selebihnya menyangkut etika kekeluargaan dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesembilan sub sistem sosial yang dimaksudkan adalah sebagai berikut : (1) *hulunga*, yakni melakukan pekerjaan secara bersama-sama secara sukarela dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial dan tidak mengharapkan imbalan sama sekali; (2) *huyula*, artinya melakukan pekerjaan secara bersama secara timbal balik diantara sekelompok anggota masyarakat, misalnya dalam membangun rumah; (3) *himbunga*, perhimpunan beberapa orang anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha secara bersama-sama dan membagi hasilnya secara merata, misalnya membuka dan mengelola lahan pertanian; (4) *palita*, hampir sama dengan *himbunga*, tetapi setiap orang ditentukan pembagian hak milik sehingga hasil yang dinikmati masing-masing akan berbeda sesuai pembatasan hak milik tersebut, (5) *tiayo*, permintaan bantuan seorang penduduk kepada tetangga, kenalan, atau kaum kerabat untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan sendiri, warga yang membantu tidak diberikan imbalan terkecuali sajian makan siang oleh pemilik pekerjaan; (6) *dembulo*, sumbangan berupa barang dalam kegiatan upacara pernikahan dan perkabungan dengan tidak mengharapkan imbalan, (7) *depita*, saling memberi antar tetangga, kenalan dan kawan kerabat pada saat seseorang baru melakukan panen atau memperoleh hasil pertanian yang berlebih; (8) *timoa*, sumbang-menyumbang berupa benda di kalangan pemuda yang akan menikah dengan ketentuan harus dibalas kembali ketika penyumbang tersebut akan menikah kelak; dan (9) *heiya*, sumbang-

¹ Alim S. Niode, Gorontalo, Perubahan Nilai-nilai dan Pranata Sosial (Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press, 2007), hal. 95-96

menyumbang berupa uang dalam pelaksanaan hajatan seperti pesta pernikahan dan sebagainya.

Nilai-nilai sosial tersebut mengikat masyarakat Gorontalo untuk maju secara bersama-sama, saling peduli dan menekan kesenjangan diantara mereka. Akan tetapi nilai-nilai demikian sudah mengalami proses erosi sosial, tradisi *huyula*, *timoa*, *tiayo* dan sebagainya tinggal menjadi strategi untuk bertahan hidup (*survival strategic*) pada masyarakat marginal, tidak lagi menjadi spirit sosial yang membentuk sistem nilai budaya. Masyarakat Gorontalo berada pada sebuah realitas dimana sistem makna sosial budaya sedang mengalami krisis.²

4.3. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Gorontalo tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang pesat, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003 sebesar 6,88 %, meningkat menjadi 6,93 % pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 mencapai 7,06 %. Sementara PDRB Per Kapita per tahun pada tahun 2003 senilai Rp. 2.008.029,-, tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 2.111.334,- dan tahun 2005 berada pada level Rp. 2.226.474,-.

Dalam struktur perekonomian Provinsi Gorontalo, sektor pertanian memiliki peranan yang cukup besar. Pada tahun 2005 sektor pertanian memberi kontribusi sebesar 30,5% terhadap total PDRB, diikuti sektor jasa-jasa sebesar 16,9% dan perdagangan 13,8%. Komposisi PDRB tahun 2005 ditunjukkan dengan tabel 4.5. Dilihat dari struktur ketenagakerjaan masyarakat Gorontalo, lapangan usaha pertanian juga cukup dominan. Pada tahun 2005 lapangan usaha pertanian, kehutanan perburuan dan perikanan menjadi pilihan 52,3% pekerja di Gorontalo, disusul oleh jasa-jasa (15,5%) serta perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel (12,6%). Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha disajikan pada Tabel 4.6.

² *Ibid.* hal. 4

Tabel 4. 5
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Gorontalo
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005
Atas Dasar Harga Konstan 2000

No.	Lapangan Usaha	Jumlah (juta Rp.)	Komposisi (%)
1	Pertanian, Kehutanan Perburuan dan Perikanan	617,383	30.5
2	Pertambangan dan Penggalian	19,122	0.9
3	Industri	192,882	9.5
4	Listrik, Gas dan Air Minum	12,446	0.6
5	Bangunan/Konstruksi	149,000	7.4
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	278,933	13.8
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	204,781	10.1
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	207,983	10.3
9	Jasa-Jasa	342,793	16.9
	Total	2,025,323	

Sumber: Gorontalo Dalam Angka Tahun 2006, BPS Provinsi Gorontalo

Tabel 4. 6
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha/Sektor di Provinsi Gorontalo
Tahun 2005

No.	Lapangan Usaha	Jumlah (jiwa)	Komposisi (%)
1	Pertanian, Kehutanan Perburuan dan Perikanan	179,925	52.3
2	Pertambangan dan Penggalian	4,592	1.3
3	Industri	22,330	6.5
4	Listrik, Gas dan Air Minum	458	0.1
5	Bangunan/Konstruksi	12,308	3.6
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	43,197	12.6
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	23,480	6.8
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	3,694	1.1
9	Jasa-Jasa	53,497	15.5
10	Lainnya	661	0.2
	Total	344,142	

Sumber: Gorontalo Dalam Angka Tahun 2006, BPS Provinsi Gorontalo

Perbandingan nilai PDRB pada setiap lapangan usaha dengan jumlah orang yang bekerja pada lapangan usaha yang sama dapat digunakan untuk mengetahui PDRB perkapita pekerja pada setiap sektor. Analisis dengan pendekatan ini menunjukkan bahwa sumbangan PDRB perkapita terendah diberikan oleh pekerja pada lapangan usaha pertanian dengan nilai secara rata-rata Rp. 285.945,- per pekerja per bulan. Sedangkan sumbangan PDRB perkapita tertinggi diberikan oleh pekerja pada lapangan usaha keuangan dan jasa perusahaan sebesar Rp. 4.691.910,- per pekerja per bulan. Rendahnya PDRB perkapita pekerja pada lapangan usaha pertanian di Provinsi Gorontalo dapat mengindikasikan kemungkinan bahwa pekerja pada sektor tersebut rentan terhadap kemiskinan.

4.4. Aspek Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan

Pembentukan Provinsi Gorontalo telah menjadi momentum penting bagi seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk memberi perhatian lebih terhadap penyelenggaraan pembangunan. Dalam usianya yang masih sangat muda pemerintah Provinsi Gorontalo mampu menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada provinsi lainnya, misalnya sebagai satu-satunya penerima penghargaan tertib administrasi keuangan tahun 2007, penerima penghargaan ketahanan pangan selama tiga tahun berturut-turut (2003-2006), sebagai pelaksana *Good Governance* terbaik di Indonesia menurut penelitian UGM, dan sebagainya.

Tingginya konsentrasi penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Gorontalo didukung dengan peningkatan anggaran yang cukup tinggi. Pada tahun 2001 nilai APBD Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 77.696.211.940 terus meningkat menjadi Rp. 442.229.890.710 pada tahun 2006, atau terjadi peningkatan nominal 469.18 % dalam kurun waktu 5 tahun. Khusus untuk penanggulangan kemiskinan Pemerintah Provinsi Gorontalo secara rutin mengalokasikan anggaran yang cukup besar. Pada tahun 2005 alokasi APBD untuk penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 4.896.000.000 dan

meningkat menjadi Rp. 8.034.337.500 pada tahun 2006. Sementara dana penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBN berjumlah Rp. 68.834.997.000 pada tahun 2005 menjadi Rp. 278.531.268.000 pada tahun 2006. Anggaran penanggulangan kemiskinan tersebut dimanfaatkan antara lain melalui pembangunan rumah layak huni dan peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan dengan pembentukan Badan Pelaksana Kesehatan Mandiri (Bapelkesman).

Sebagai hasil dari kerja keras dan semangat kolektif antara masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan maka angka kemiskinan Provinsi Gorontalo turun drastis dalam kurun waktu yang relatif pendek. Tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo sebelum pemekaran mendekati level 73 % turun menjadi 29,68% pada tahun 2006 setelah enam tahun berdiri sebagai provinsi sendiri.³

³ Pemerintah Provinsi Gorontalo, LKPJ Gubernur Gorontalo Periode 2001-2006 dan LKPJ Tahun 2006

BAB V

FAKTOR DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO

5.1. Kondisi Kemiskinan, Ketimpangan dan Perubahan Distribusi Pendapatan

Kemiskinan merupakan fakta sosial ekonomi yang selalu menjadi masalah hampir pada setiap satuan spasial dan periode. Walaupun kemiskinan dipahami secara umum sebagai keterbatasan ekonomi tetapi dalam pendekatan yang lebih spesifik karakteristik kemiskinan akan menunjukkan kondisi yang berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Analisa di bawah ini akan merinci ciri yang bersifat khusus bagi penduduk miskin di Provinsi Gorontalo.

5.1.1. Indeks Kemiskinan

Kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2002 dihitung berdasarkan garis kemiskinan sebesar Rp. 88.974,- per bulan di perdesaan dan Rp. 107.405,- per bulan di perkotaan¹. Data yang diolah berjumlah 7.840 observasi individu yang diberi bobot (*weight*) yang berbeda sesuai sebaran sampel. Dengan menggunakan data tersebut pada perhitungan Indeks Foster Greer Thorbecke (FGT) diperoleh nilai indeks P_0 sebesar 0,4096873 yang berarti bahwa tingkat kemiskinan (penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan) di Provinsi Gorontalo pada tahun 2002 sebesar 40,97%.

Metode yang sama juga diterapkan untuk menghitung 12.651 observasi individu dari data Susenas 2006, tetapi dengan nominal garis kemiskinan yang berbeda. Garis kemiskinan yang digunakan dalam analisis ini adalah garis kemiskinan sementara yang diperoleh dari proses *inflate* terhadap garis kemiskinan Provinsi Gorontalo tahun 2002. Proses *inflate* dalam hal ini dilakukan dengan mengalikan garis kemiskinan tahun 2002 Nilai inflasi dalam periode 2002 sampai 2006

¹ Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kemiskinan di Indonesia: Perkembangan Data dan Informasi Mutakhir (Jakarta: TKPK, 2005), hal. 17

sebesar 45,66%. Nilai inflasi itu sendiri dihitung dari nilai IHK tahun 2006 sebesar 145,66 dengan harga dasar tahun 2002 (BPS Provinsi Gorontalo).

Penggunaan garis kemiskinan sementara (hasil *inflate*) ini didasarkan pada asumsi bahwa pola konsumsi rumah tangga di Provinsi Gorontalo pada periode 2002-2006 tidak berubah sehingga faktor yang berpengaruh pada nilai konsumsi masing-masing rumah tangga hanya terbatas pada pengaruh inflasi saja. Penggunaan garis kemiskinan tahun 2002 dilakukan berhubungan dengan periode yang di analisis. Lebih dari itu garis kemiskinan tahun 2002 dihitung berdasarkan Susenas Modul Konsumsi tahun tersebut. Susenas Modul Konsumsi merupakan survey yang dilaksanakan setiap 3 tahun dan menjadi standar perhitungan garis kemiskinan oleh BPS.

Berdasarkan proses *inflate* terhadap garis kemiskinan tahun 2002 diperoleh garis kemiskinan sementara Provinsi Gorontalo tahun 2006 sebesar Rp. 156.446,- per bulan untuk daerah perkotaan dan Rp. 129.600,- per bulan untuk daerah perdesaan. Dengan menggunakan garis kemiskinan tersebut maka diperoleh nilai P_0 pada tahun 2006 sebesar 0,3995526 yang berarti bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo adalah 39,96 % turun sebesar 1,01% dari tingkat kemiskinan tahun 2002 sebesar 40,97 %. Angka tingkat kemiskinan sebesar 39,96 % memberi makna bahwa secara statistik dengan derajat kepercayaan 95%, 376.138 jiwa dari 941.398 jiwa penduduk Provinsi Gorontalo pada tahun 2006 berstatus miskin. Dengan membedakan nilai P_0 di perdesaan dan perkotaan dapat diketahui pula bahwa dalam periode 2002-2006 tingkat kemiskinan di perkotaan berkurang sedangkan tingkat kemiskinan di perdesaan meningkat. Lihat Tabel 5.1.

Tabel 5. 1
Indeks Foster Greer Thorbecke
Provinsi Gorontalo Tahun 2002 dan 2006

Klasifikasi Wilayah	2002			2006		
	P0	P1	P2	P0	P1	P2
Desa	0,4735	0,1003	0,0303	0,5187	0,1312	0,0460
Kota	0,2370	0,0438	0,0117	0,0656	0,0124	0,0030
Kota dan Desa	0,4097	0,0850	0,0253	0,3996	0,1000	0,0347

Sumber : Susenas Kor 2002 dan 2006, diolah

Bila dipisahkan menurut kabupaten/kota maka daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2006 adalah Kabupaten Gorontalo Utara (74,92%) dan terendah Kota Gorontalo (3,80%) sebagaimana Tabel 5.2. Tetapi penyumbang jumlah penduduk miskin terbesar terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo adalah Kabupaten Gorontalo (13,35%) dan terendah Kota Gorontalo (0,64%), lihat Tabel 5.3. Sementara analisa berdasarkan klasifikasi wilayah memperkuat pendapat bahwa orang miskin lebih banyak tinggal di perdesaan daripada yang tinggal di perkotaan. Penduduk miskin yang tinggal di perdesaan sebanyak 359.894 jiwa (95,68%) sedangkan di perkotaan hanya sebanyak 16.244 jiwa (4,32%).

Tabel 5. 2
Indeks Foster Greer Thorbecke
Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2002 dan 2006

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2002			Tahun 2006		
		P0	P1	P2	P0	P1	P2
1	Kab. Boalemo	0,4771	0,1027	0,0323	0,5352	0,1485	0,0550
2	Kab. Gorontalo	0,4524	0,0923	0,0269	0,3789	0,1017	0,0372
3	Kab. Pohuwato	0,3677	0,0572	0,0134	0,4428	0,1036	0,0359
4	Kab. Bone Bolango	0,4142	0,0950	0,0299	0,4754	0,1161	0,0398
5	Kab. Gorontalo Utara	0,6158	0,1489	0,0454	0,7492	0,1623	0,0471
6	Kota Gorontalo	0,1703	0,0304	0,0096	0,0380	0,0069	0,0018

Sumber : Susenas Kor 2002 dan 2006, diolah

*) Data 5 kecamatan yang dipisahkan dari data Kabupaten Gorontalo

Tabel 5. 1 dan Tabel 5. 2 diatas juga memperlihatkan variasi nilai P_1 dan P_2 di Provinsi Gorontalo. P_1 menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan atau rata-rata proporsional kesenjangan pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan, sedangkan dan P_2 merupakan ukuran keparahan kemiskinan atau tingkat kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri. Dengan memperhatikan angka-angka yang ada, dapat diketahui bahwa antara tahun 2002 dan 2006 tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan di daerah perdesaan di Provinsi Gorontalo meningkat, sedangkan di daerah perkotaan mengalami penurunan. Tingkat kedalaman kemiskinan tertinggi pada tahun 2006 adalah Calon Kabupaten Gorontalo Utara (0,1623) dan terendah Kota Gorontalo (0,0069). Daerah dengan tingkat keparahan kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Boalemo (0,0550) dan terendah Kota Gorontalo (0,0018).

Tabel 5. 3
Distribusi Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2006

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentasi Penduduk Miskin	
				Terhadap Kab./Kota	Terhadap Provinsi
1	Kab. Boalemo	118.082	63.200	53,52%	6,71%
2	Kab. Gorontalo	331.796	125.707	37,89%	13,35%
3	Kab. Pohuwato	109.822	48.633	44,28%	5,17%
4	Kab. Bone Bolango	126.956	60.358	47,54%	6,41%
5	Kab. Gorontalo Utara *)	96.390	72.216	74,92%	7,67%
6	Kota Gorontalo	158.352	6.024	3,80%	0,64%
	Provinsi Gorontalo	941.398	376.138	39,96%	39,96%

Sumber : Susenas Kor 2006, diolah

*) Data 5 kecamatan yang dipisahkan dari data Kabupaten Gorontalo

5.1.2. Karakteristik Umum Penduduk Miskin

Kemiskinan ditandai dengan tingkat konsumsi yang rendah dan proporsi pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran yang tinggi (Hukum Engel). Indikator tersebut berlaku bagi penduduk miskin di Provinsi Gorontalo. Melalui analisa khusus penduduk miskin dengan membagi dalam 5 kuintil menurut total konsumsi dapat diketahui nilai rata-rata konsumsi per kapita pada kuintil 1 sebesar

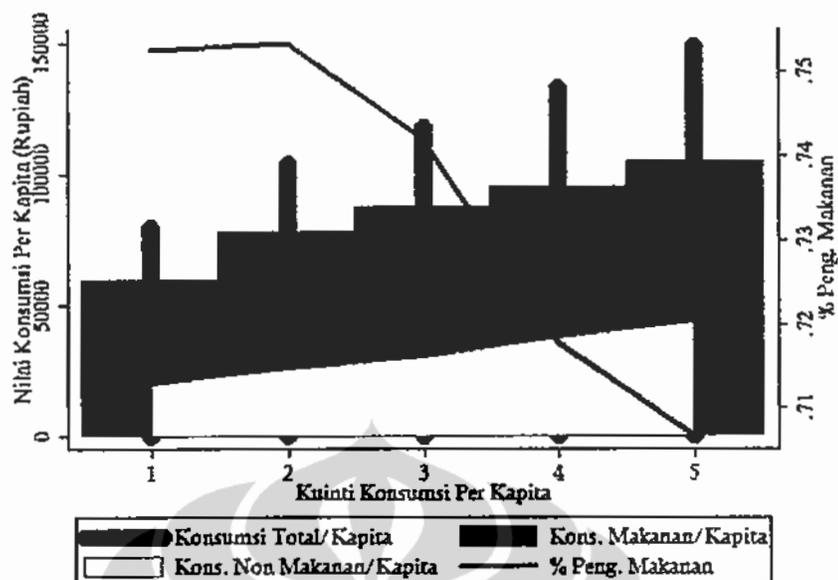
Rp. 79.663,- per bulan dan kuintil 5 sebesar Rp. 148.131,- per bulan. Konsumsi makanan penduduk miskin mencakup 70,67% sampai dengan 75,27% dari total konsumsi. Baik konsumsi makanan maupun konsumsi non makanan menunjukkan perubahan yang berbanding lurus dengan perubahan total konsumsi, tetapi proporsi konsumsi makanan menunjukkan penurunan pada setiap kenaikan total konsumsi atau berbanding terbalik. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5. 4 dan Gambar 5. 1.

Ditinjau dari aspek ketenagakerjaan, penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 72,32 % menggantungkan hidupnya pada lapangan usaha pertanian sebagai sumber penghasilan utama keluarga, sebagaimana Tabel 5.5. Sementara secara keseluruhan penduduk Provinsi Gorontalo yang memiliki penghasilan utama dari sektor pertanian yang berjumlah 464.285 jiwa pada tahun 2006 sebanyak 272.014 jiwa (58.59%) diantaranya berstatus miskin.

Tabel 5. 4
Nilai Rata-rata Konsumsi Total, Konsumsi Makanan, Konsumsi Non Makanan dan Proporsi Konsumsi Makanan terhadap Konsumsi Total Per Kuintil Masyarakat Miskin di Provinsi Gorontalo Tahun 2006

Kuintil	Total Konsumsi/Kapita (Rp.)	Konsumsi Makanan/Kapita (Rp.)	Konsumsi Non Makanan/Kapita (Rp.)	Proporsi Konsumsi Makanan (%)
1	79.663	59.966	19.697	75,27%
2	103.679	78.122	25.557	75,35%
3	117.839	87.459	30.380	74,22%
4	132.534	95.134	37.400	71,78%
5	148.131	104.681	43.450	70,67%

Sumber : Susenas Kor 2006, diolah



Gambar 5. 1
Nilai Rata-rata Konsumsi Total, Konsumsi Makanan, Konsumsi Non Makanan dan Proporsi Konsumsi Makanan terhadap Konsumsi Total Per Kuintil Masyarakat Miskin di Provinsi Gorontalo Tahun 2006

Tabel 5. 5
Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Menurut Jenis Pekerjaan Utama

No	Sumber Penghasilan Utama	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentasi (%)
1	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, dan Perburuan	272.014	72,32
2	Pertambangan dan Penggalian	16.609	4,42
3	Industri Pengolahan	27.778	7,39
4	Listrik, Gas, dan Air	306	0,08
5	Konstruksi Bangunan	15.873	4,22
6	Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	14.153	3,76
7	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	18.767	4,99
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	817	0,22
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	9.311	2,48
10	Lain-lain	510	0,14
	Jumlah	376.138	100,00

Sumber : Susenas Kor 2006, diolah

Aspek pendidikan juga sangat relevan untuk mendeskripsikan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Sebanyak 64,02% penduduk miskin tidak mampu menamatkan pendidikan SD, memiliki ijazah SD sebanyak 26,76%, dan yang memiliki ijazah SMP sebanyak 6,02%. Dengan demikian 96,80% penduduk miskin tidak mampu memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dari standar pendidikan dasar. Kondisi ini potensial untuk menciptakan kemiskinan antar generasi.

Tabel 5. 6
Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo
Tahun 2006 Menurut Klasifikasi Wilayah
dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki

No.	Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Kota	Desa	Total	Persentasi (%)
1	Tidak memiliki Ijazah SD	10.095	230.719	240.814	64,02
2	SD sederajat	4.396	96.250	100.646	26,76
3	SMP Sederajat	746	21.900	22.646	6,02
4	SMA/SMK Sederajat	773	10.265	11.038	2,93
5	Diploma I/II/III	117	537	654	0,17
6	S1/Diploma IV	117	223	340	0,09
	Total	16.244	359.894	376.138	100,00

Sumber : Susenas Kor 2006, diolah

Dari aspek kesehatan data menunjukkan bahwa sebahagian penduduk miskin merupakan masyarakat yang rentan terhadap keluhan kesehatan yakni sebanyak 145.098 (38,58%). Diantara penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tersebut 110.120 jiwa (75,89%) juga mengalami hambatan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari sebagai akibat penyakit yang dideritanya.

Tabel 5. 7
Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo
Tahun 2005 Menurut Status Keluhan Kesehatan

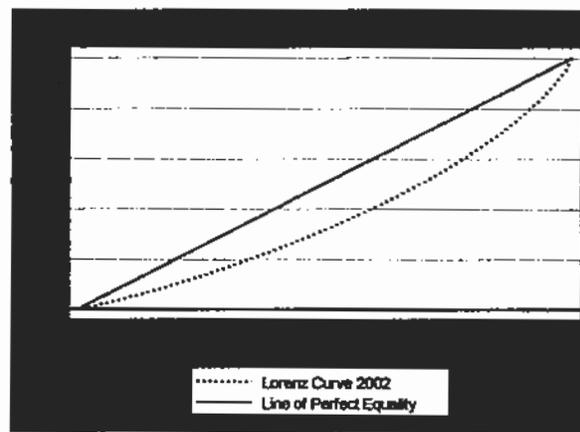
Status Keluhan Kesehatan	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentasi (%)
Tidak Pernah	231.040	61,42%
Pernah dan Mengganggu Pekerjaan/ Kegiatan Rutin	110.120	29,28%
Pernah tetapi Tidak Mengganggu Pekerjaan/ Kegiatan Rutin	34.978	9,30%
Jumlah	376.138	100,00%

Sumber : Susenas Kor 2006, diolah

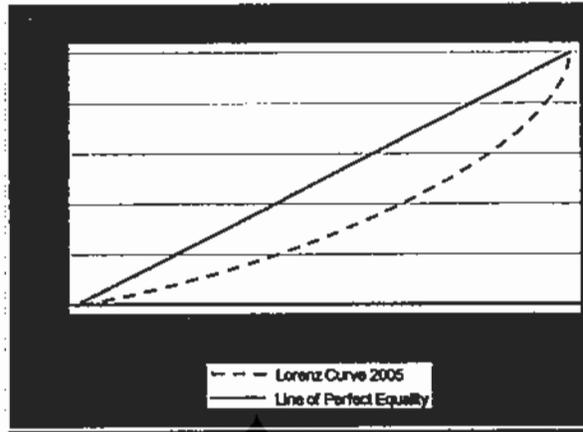
5.1.3. Ukuran Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran pendapatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan nilai konsumsi per kapita dengan pemberian bobot tertentu terhadap individu sampel. Berdasarkan perhitungan terhadap nilai konsumsi per kapita per bulan, dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Gorontalo tergolong rendah pada tahun 2002 dengan Indeks Gini sebesar 0,27. Tetapi angka tersebut meningkat menjadi 0,36 pada tahun 2005, kemudian turun lagi menjadi 0,31 pada tahun 2006. Klasifikasi ketimpangan konsumsi per kapita Provinsi Gorontalo pada tahun 2005 dan 2006 termasuk pada kategori moderat. Visualisasi tingkat ketimpangan tahun 2002, 2005 dan 2006 ditunjukkan dengan Kurva Lorenz pada Gambar 5.2 sampai Gambar 5.5. Pelebaran Kurva Lorenz pada posisi mendekati ujung garis diagonal menunjukkan bahwa ketimpangan yang cukup besar terjadi pada kuintil 4 dan 5 terkaya.

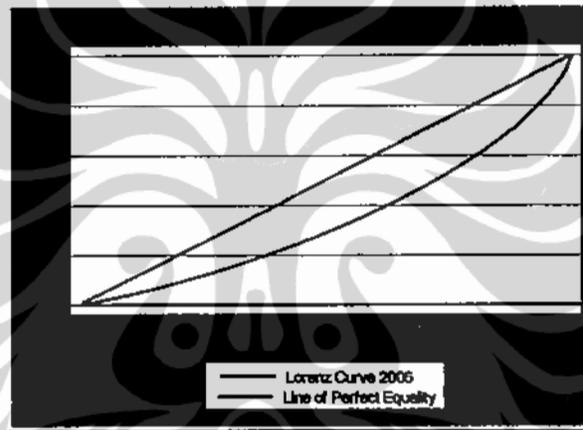
Untuk mengetahui kontribusi wilayah perdesaan dan perkotaan terhadap peningkatan ketimpangan pada tahun 2006 dilakukan perhitungan Indeks Gini secara terpisah. Perhitungan menghasilkan 0,30 pada daerah perkotaan dan 0,29 pada daerah perdesaan. Dengan demikian peningkatan ketimpangan di Provinsi Gorontalo lebih banyak disebabkan oleh peningkatan ketimpangan pendapatan penduduk pada daerah perkotaan.



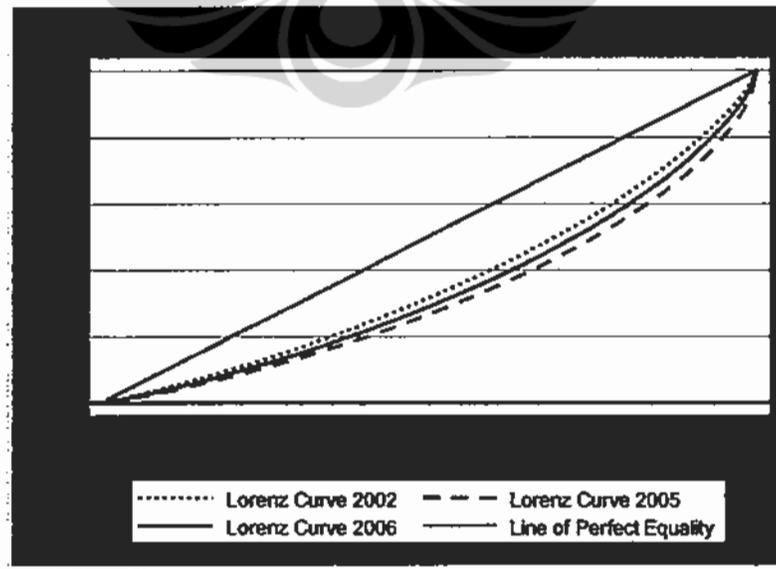
Gambar 5. 2
Kurva Lorenz provinsi Gorontalo Tahun 2002



Gambar 5. 3
Kurva Lorenz Provinsi Gorontalo Tahun 2005



Gambar 5. 4
Kurva Lorenz Provinsi Gorontalo Tahun 2006



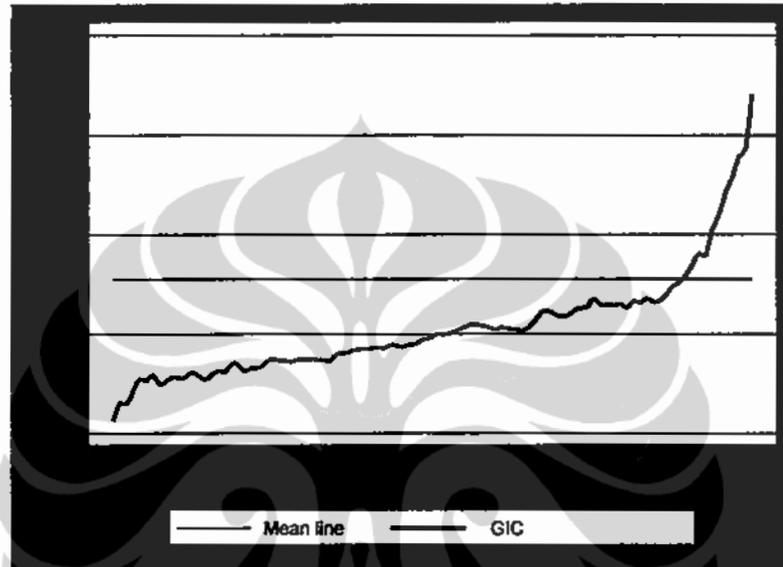
Gambar 5. 5
Kurva Lorenz Provinsi Gorontalo Gabungan tahun 2002, 2005 dan 2006

5.1.4. Distribusi Perubahan Tingkat Kesejahteraan

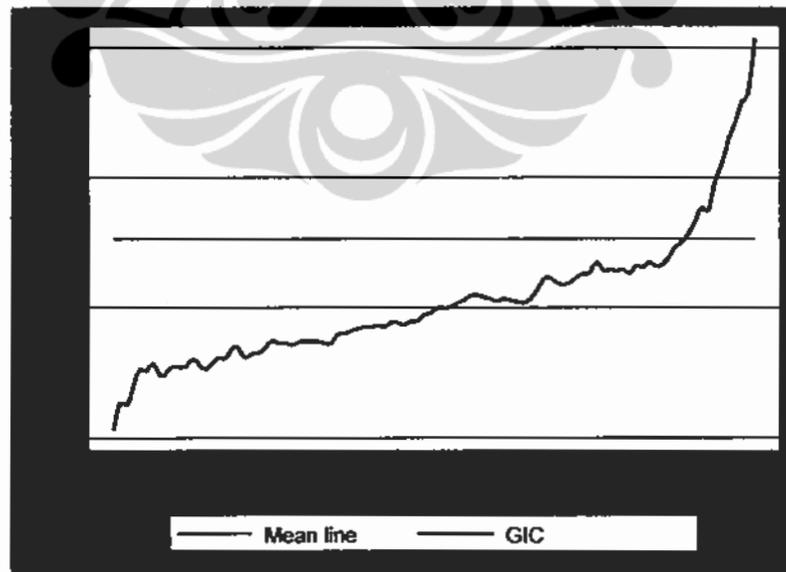
Analisa lebih jauh terhadap ketimpangan pendapatan dapat dilakukan melalui Growth Incidence Curve (GIC). GIC menunjukkan tingkat pertumbuhan pada masing-masing kelompok konsumsi dari 100 kelompok yang diurutkan dari penduduk termiskin sampai terkaya pada periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan bobot individu. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan data tahun 2002 dan 2006.

Pengolahan data dengan menggunakan program Stata 8.2 SE pada tingkat kepercayaan 95% menghasilkan grafik seperti pada Gambar 5.6 dan Gambar 5.7. GIC tiga tahun pada periode 2002-2006 (Gambar 5.7) menunjukkan grafik yang menaik dari kiri ke kanan. Grafik ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo tidak dapat dinikmati oleh penduduk miskin. Terlihat pada grafik bahwa sebelum persentil ketiga (60%) GIC berada di bawah sumbu horizontal artinya kurang lebih 50% penduduk termiskin dalam periode tersebut mengalami pertumbuhan negatif. Antara persentil ketiga dan pertengahan persentil kelima menunjukkan pertumbuhan yang semakin tinggi dengan derajat kemiringan landai, tetapi pada setelah pertengahan persentil kelima derajat kemiringannya semakin curam. Pada pertengahan persentil kelima juga terjadi perpotongan antara GIC dengan garis pertumbuhan rata-rata. Hal ini dapat diartikan bahwa total pertumbuhan pendapatan kurang lebih 10 % masyarakat terkaya sebanding dengan total pertumbuhan 90 % masyarakat lainnya. Apabila dinyatakan dengan angka nominal maka tambahan nilai konsumsi orang kaya jelas akan menunjukkan perbedaan yang sangat jauh dengan tambahan nilai konsumsi orang miskin karena *baseline* yang berbeda pula, dimana nilai konsumsi penduduk miskin pada tahun 2002 yang digunakan sebagai acuan pasti lebih rendah daripada nilai konsumsi penduduk kaya. Dengan demikian pertumbuhan pendapatan penduduk pada tahun 2002 sampai 2006 sangat ekstrim menguntungkan orang kaya.

Gambar 5.7 yang merupakan GIC rata-rata per tahun dalam kurun waktu 2002-2006 juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Grafik ini dibentuk dengan membagi nilai pertumbuhan setiap persentil dengan angka 4 untuk mengetahui tingkat pertumbuhan per tahunnya.



Gambar 5. 6
Growth Incidence Curve Provinsi Gorontalo
Selang Tahun 2002 s.d. 2006



Gambar 5. 7
Growth Incidence Curve Rata-rata Per Tahun Provinsi Gorontalo
Selang Tahun 2002 s.d. 2006

5.2. Faktor-faktor Determinan dan Tingkat Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan

Sebagaimana telah diuraikan di depan, perhitungan faktor determinan kemiskinan rumah tangga dalam penelitian ini menggunakan Model Logit. Variabel terikat dalam model adalah variabel *dummy* "MISKIN" dengan nilai 1 jika berstatus miskin dan 0 jika tidak miskin. Sedangkan variabel bebas sebanyak 38 variabel yang terdiri dari variabel numeric dan variabel *dummy*, dengan jumlah observasi yang tersedia sebanyak 3.356 rumah tangga. Data dan variabel tersebut dipilih dari gabungan data Susenas KOR 2006 dan PODES SE 2006 yang dikumpulkan oleh BPS.

Analisis kemiskinan dilakukan melalui tiga model dengan membedakan data observasi kedalam kelompok perdesaan, perkotaan, serta gabungan perdesaan dan perkotaan. Masing-masing pemodelan dilakukan dalam dua tahap. Model tahap pertama digunakan untuk menguji hubungan masing-masing variabel terhadap kemiskinan sedangkan model tahap kedua digunakan untuk mencari faktor determinan kemiskinan dan menghasilkan model yang dapat memprediksi status rumah tangga (miskin atau tidak miskin).

Berbeda dengan perhitungan sebelumnya yang memberi bobot tertentu terhadap setiap observasi, dalam analisis ini setiap observasi memiliki yang sama. Dalam model ini korelasi antara kemiskinan dan variabel bebas tidak selalu menyatakan hubungan kausalitas secara linier, karena dalam kehidupan nyata kemiskinan dapat dipandang sebagai akibat dari gejala keterbatasan indikator-indikator sosial ekonomi masyarakat tetapi kemiskinan juga dapat dipandang sebagai penyebabnya.

Setelah melakukan estimasi terhadap 38 indikator (variabel) yang diperkirakan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada tahap pertama sebagian koefisien regresi menunjukkan hasil yang tidak memiliki hubungan kausal yang logis menurut teori sehingga variabel tersebut dibuang atau diabaikan dalam model. Pada tahap kedua untuk mencapai tingkat signifikansi

pada taraf nyata (α) = 0,2 dan *goodness of fit* yang lebih baik beberapa variabel yang tidak signifikan juga dikeluarkan dari model. Atas dasar tahapan pemilihan model dan variabel tersebut maka analisis determinan kemiskinan di wilayah perkotaan, perdesaan dan gabungan keduanya menghasilkan model yang berbeda.

Ukuran *goodness of fit* melalui pendekatan McFadden R-squared (Pseudo-R²) menunjukkan nilai yang tidak terlalu tinggi. Pada model tahap pertama masing-masing untuk kemiskinan perdesaan 0,213570, perkotaan 0,344670 dan gabungan perdesaan dan perkotaan senilai 0,312055. Dalam regresi linier nilai R-squared diinterpretasikan sebagai persentasi total variasi variabel miskin yang dapat dijelaskan oleh model (seluruh variabel bebas), misalnya 21,4%, 34,5%, 31,2% dan sebagainya sedangkan sisanya disebabkan oleh variabel lain diluar model. Dalam model logistik tidak dapat diinterpretasikan demikian, McFadden R-squared hanya digunakan untuk membandingkan atau melihat perbedaan spesifikasi dalam model yang sama, bukan untuk membandingkan suatu model dengan model lainnya yang memiliki rangkaian variabel yang berbeda.²

Ukuran *goodness of fit* lainnya yang digunakan untuk menguji model tahap kedua adalah *Prediction Evaluation* atau *Percent Correct (% correct) Predictions* atau PCP yang disertakan dalam EViews. Nilai PCP menunjukkan kemungkinan model memprediksi secara benar. Dari hasil pengujian model tahap kedua dengan *cut off* 0,5 diketahui bahwa masing-masing model dengan taraf nyata (α) = 0,2 memiliki kemampuan memprediksi dengan benar sebesar 73,70% untuk model perdesaan, 93,93% model perkotaan, dan 78,96% model gabungan perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan pengujian ini maka ketiga model dianggap cukup untuk menjelaskan faktor determinan kemiskinan rumah tangga dan memprediksi status rumah tangga pada wilayah perdesaan, perkotaan, serta gabungan perdesaan dan perkotaan di Provinsi Gorontalo.

² Kamarul Imam, *The Logistic Regression Model*. Diakses 27 Agustus 2007 dari Web Kuliah Universitas Jember.
http://elearning.unej.ac.id/courses/MAA01/document/Regresi_Logistik.pdf

Output EViews untuk masing-masing model secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3 sampai dengan Lampiran 11, sedangkan ringkasan estimasi koefisien regresi model tahap pertama disajikan dalam Tabel 5. 8.

Tabel 5. 8
Koefisien Regresi, Probabilitas dan Odd Ratio
Model Logit Kemiskinan Tahap Pertama di Provinsi Gorontalo
Dirinci Menurut Kategori Perdesaan, Perkotaan,
serta Gabungan Perdesaan dan Perkotaan

No.	Variable	Kota			Desa			Desa dan Kota		
		Coeff.	Prob.	Odd Rat.	Coeff.	Prob.	Odd Rat.	Coeff.	Prob.	Odd Rat.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	C	-1.2278	0.5102	0.2925	0.0349	0.9404	1.0355	-2.1146	0.0000	0.1207
1	DES KOT	ta	ta	ta	ta	ta	ta	1.8592	0.0000	6.4184
2	JRK KAB	1.1290	0.0701	3.0924	0.4799	0.0002	1.6159	0.5308	0.0000	1.7004
3	RAW BCANA	ta	ta	ta	0.1244	0.2209	1.1325	0.1095	0.2669	1.1157
4	FAS JALAS	-1.4446	0.2417	0.2358	-0.0793	0.4694	0.9238	-0.0774	0.4775	0.9256
5	AKS LIST	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta
6	AKS KOM	ta	ta	ta	-0.2538	0.0288	0.7759	-0.2285	0.0474	0.7957
7	FAS LKEU	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta
8	AKS PELKES	-1.3175	0.0440	0.2678	ta	ta	ta	ta	ta	ta
9	JRK SEKOLAH	0.2414	0.6119	1.2730	0.0366	0.7190	1.0372	0.0534	0.5870	1.0549
10	AKS DIKTRAM	-0.6195	0.3215	0.5382	-0.4033	0.0735	0.6681	-0.4939	0.0154	0.6102
11	TRA GRYONG	-0.6524	0.2630	0.5208	ta	ta	ta	ta	ta	ta
12	RAW RUSUH	ta	ta	ta	0.3265	0.3628	1.3861	0.4031	0.2608	1.4965
13	JUM ART	0.8703	0.1492	2.3875	0.9257	0.0000	2.5236	0.8971	0.0000	2.4524
14	DEP RATRT	1.8137	0.0001	6.1333	0.5726	0.0000	1.7728	0.6656	0.0000	1.9456
15	KRT USMUDA	ta	ta	ta	0.3902	0.0001	1.4773	0.3623	0.0003	1.4368
16	KRT PEREMPUAN	0.9119	0.1206	2.4890	-0.1157	0.5193	0.8907	-0.0323	0.8502	0.9682
17	APAK RT	-1.6056	0.0500	0.2008	-1.0824	0.0000	0.3388	-1.1122	0.0000	0.3288
18	PEK PETANI	0.4068	0.6986	1.5020	0.5347	0.0000	1.7070	0.5728	0.0000	1.7733
19	PEK BURTAN	2.3885	0.0026	10.8973	0.5025	0.0017	1.6529	0.5815	0.0002	1.7887
20	PEK PETERNAK	ta	ta	ta	-0.4965	0.7065	0.6087	-0.5210	0.6874	0.9539
21	PEK HUTAN	ta	ta	ta	0.0966	0.8951	1.1014	0.1510	0.8363	1.1630
22	PEK PRIKANAN	1.4041	0.0520	4.0718	-0.0982	0.6676	0.9065	0.1172	0.5847	1.1244
23	PEK DAGANG	1.3655	0.0318	3.9177	-0.2880	0.3681	0.7498	-0.0307	0.9131	0.9698
24	PEK PEMBRT	ta	ta	ta	0.6164	0.1611	1.8523	0.4487	0.2770	1.5663
25	PEK BURKAS	ta	ta	ta	0.2255	0.7886	1.2529	-0.0512	0.9435	0.9501
26	JUM JAMKER	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta
27	AKS KREDUS	-0.9210	0.4003	0.3981	-0.3927	0.1336	0.6752	-0.4501	0.0719	0.6378
28	ATAP RUMBIA	0.4798	0.5134	1.6157	0.4083	0.0012	1.5043	0.4190	0.0007	1.5205
29	DIND BAMBU	1.2266	0.0247	3.4096	0.5397	0.0000	1.7155	0.5719	0.0000	1.7718
30	LANT PERART	0.9748	0.0436	2.6507	0.9183	0.0000	2.5050	0.9077	0.0000	2.4786
31	GANG KES	ta	ta	ta	0.2420	0.0130	1.2738	0.1916	0.0431	1.2111
32	KRT DIKSD	1.1810	0.0876	3.2577	0.6536	0.0092	1.9224	0.6760	0.0052	1.9661
33	KRT DIKSMP	0.8532	0.3225	2.3471	0.5926	0.0314	1.8086	0.6039	0.0223	1.8292
34	RAS DIKDAS	ta	ta	ta	-0.3294	0.2717	0.7194	-0.3424	0.2368	0.7101
35	APM SDRT	ta	ta	ta	-1.1173	0.0003	0.3272	-0.9173	0.0009	0.3996
36	APM SMPRT	-0.5400	0.4790	0.5828	-0.5172	0.0019	0.5962	-0.4997	0.0020	0.6067
37	AIR BERS	-0.4786	0.4583	0.6196	ta	ta	ta	ta	ta	ta
38	FAS KLOSET	ta	ta	ta	-0.2356	0.0230	0.7901	-0.2365	0.0190	0.7894
Observasi		816			2.540			3.356		
LR statistic		(22 df) 94.0735			(31 df) 743.0583			(32 df) 1342.2240		
Probability(LR stat)		0.000000			0.000000			0.000000		
McFadden R-squared		0.340391			0.21357			0.312055		

Sumber : Diolah dari data Susenas 2006 dan PODES SE2006

Tabel di atas juga menyertakan nilai odd ratio masing-masing variabel pada setiap model yang diperoleh dengan menghitung eksponensial nilai koefisien regresi sesuai dengan rumus (3. 16). Nilai

odd dalam model ini dapat disebut juga resiko miskin yakni angka yang menunjukkan perbandingan probabilitas termasuk dalam kategori miskin dengan probabilitas tidak miskin. Dalam pengertian ini nilai odd juga dapat dikatakan sebagai indikator kecenderungan seseorang menjadi miskin. Selain itu nilai odd dapat digunakan untuk membandingkan tingkat pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat.

5.2.1. Faktor Determinan Kemiskinan pada Daerah Gabungan Perdesaan dan Perkotaan

Model logit kemiskinan tahap pertama gabungan daerah perdesaan dan perkotaan di Provinsi Gorontalo menempatkan 32 variabel yang memiliki hubungan secara logis terhadap kemiskinan. Diantara 32 variabel tersebut 14 variabel signifikan pada taraf nyata (α) = 0,01; 5 variabel signifikan pada taraf nyata (α) = 0,05; dan 1 variabel signifikan pada taraf nyata (α) = 0,10. Hubungan masing-masing variabel dengan kemiskinan di Provinsi Gorontalo dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Status Daerah (signifikan pada $\alpha = 0,01$)

Variabel status daerah (DES_KOT) yang membagi wilayah desa/kelurahan kedalam klasifikasi perdesaan (1) atau perkotaan (0) memiliki koefisien dengan nilai 1,8592, maka kemungkinan miskin bagi rumah tangga yang tinggal di pedesaan dapat dihitung:

$$\begin{aligned} P(\text{MISKIN} = 1 \mid x_i) &= \frac{1}{1 + \exp(-z)} \\ &= \frac{1}{1 + \exp(-1,8592)} \\ &= \frac{1}{1 + 0,1558} = 0,8652 \text{ atau } 86,52\% \end{aligned}$$

Sedangkan kemungkinan tidak miskin adalah:

$$P(\text{MISKIN} = 0 \mid x_i) = 1 - P = \frac{1}{1 + \exp(z)} = \frac{\exp(-z)}{1 + \exp(-z)}$$

$$= \frac{\exp(-z)}{1 + \exp(-z)} = \frac{\exp(-1,8592)}{1 + \exp(-1,8592)}$$

$$= \frac{0,1558}{1,1558} = 0,1348 \text{ atau } 13,48\%$$

Sementara nilai *odd ratio* dihitung dengan membandingkan $P(\text{MISKIN}=1)$ terhadap $P(\text{MISKIN}=0)$ atau:

$$\frac{P}{1-P} = \frac{0,8652}{0,1348} = 6,42$$

Nilai tersebut sama dengan $\exp(1,8592)$ atau eksponen koefisien regresi variabel DES_KOT. Dengan cara yang sama diperoleh nilai *odd* variabel lainnya seperti pada kolom 11 Tabel 5. 8. Angka 6,42 bermakna bahwa rumah tangga yang berada di pedesaan memiliki resiko menjadi miskin sebanyak 6,42 kali bila dibandingkan dengan rumah tangga yang tinggal di perkotaan. Dengan kata lain resiko rumah tangga di pedesaan lebih tinggi daripada rumah tangga di perkotaan.

Kriteria penetapan klasifikasi pedesaan dan perkotaan oleh BPS dalam hal ini didasarkan pada tiga variabel utama yakni kepadatan penduduk, persentasi rumah tangga pertanian, dan akses terhadap fasilitas umum³. Kepadatan penduduk yang rendah di pedesaan dapat menyebabkan mobilitas perekonomian yang rendah pula. Akibatnya peluang untuk menciptakan lapangan usaha baru sangat kurang karena tidak mencapai skala ekonomi yang menguntungkan. Dalam keadaan demikian pertanian menjadi pilihan pekerjaan utama, walaupun perkembangannya sangat lamban. Kurang memadainya ketersediaan akses yang terhadap infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan raya dan angkutan umum, listrik, lembaga keuangan, dan pasar di pedesaan biasanya akan mendorong peningkatan resiko miskin bagi warga pedesaan. Secara akumulatif keadaan tersebut dapat menjadi penyebab sulitnya penduduk pedesaan untuk keluar dari jerat kemiskinan.

³ Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat (*Welfare Statistics*) 2005 (Jakarta: BPS Jakarta, 2006), hal. 8

Dengan mengetahui pengaruh status daerah ini maka akan membantu pengambil kebijakan dalam rangka memperbaiki kondisi wilayah perdesaan agar penduduknya bisa mengejar ketertinggalannya dari penduduk di wilayah perkotaan.

2. Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota (signifikan pada $\alpha = 0,01$)

Variabel jarak dari desa tempat tinggal sampel ke ibukota kabupaten/kota (JRK_KAB) didefinisikan sebagai variabel dummy dengan nilai 1 apabila lebih dari 10,6 Km dan 0 apabila kurang dari jarak tersebut. Angka 10,6 merupakan rata-rata kuintil ke-2 jarak desa ke ibukota kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Angka tersebut diperoleh dengan mengelompokkan jarak ke ibukota masing-masing dari 20% terdekat (kuintil pertama) sampai 20% terjauh (kuintil kelima). Kemudian dengan menghitung rata-rata jarak pada kelompok 20% kedua (kuintil kedua) diperoleh angka 10,6 yang digunakan sebagai *cut off*. Angka tersebut dianggap representatif untuk membedakan karakteristik jauh dan dekatnya jarak ke ibukota kabupaten/kota.

Koefisien variabel JRK_KAB bertanda positif dengan nilai 0,5308 dan nilai *odd ratio* 1,7004. Artinya rumah tangga yang tinggal di daerah dengan jarak tempuh lebih dari 10,6 Km ke ibukota memiliki resiko menjadi miskin sebesar 1,70 kali bila dibandingkan dengan rumah tangga yang berada pada jarak lebih dekat atau dibawah angka tersebut.

Secara umum ibukota kabupaten/kota disamping berkembang sebagai pusat pemerintahan juga berkembang sebagai pusat jasa, perdagangan dan pusat kegiatan perekonomian. Penduduk yang dekat dengan ibukota akan memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan pemerintah, lebih mudah dalam melakukan mobilisasi atau transaksi barang dan jasa serta akses terhadap informasi. Disisi lain faktor-faktor tersebut dapat menjadi suatu hal yang sangat mahal harganya bagi masyarakat yang jauh dari ibukota. Dalam konteks ini inisiatif pemerintah dalam rangka mendekatkan

pelayanan kepada masyarakat akan berdampak positif terhadap pengurangan penduduk miskin.

3. Kerawanan terhadap bencana alam

Variabel kerawanan bencana alam (RAW_BCANA) memiliki nilai *odd ratio* 1,1157. Walaupun signifikansinya rendah tetapi model menunjukkan bahwa rumah tangga yang tinggal pada daerah rawan bencana alam memiliki resiko lebih tinggi daripada penduduk yang tinggal pada daerah yang tidak rawan.

Menurut data Podes SE 2006 desa rawan bencana di provinsi Gorontalo sebanyak 155 desa (34,44%). Bencana alam yang sering melanda desa-desa tersebut adalah: banjir 123 (79,35%); abrasi pantai 22 desa (14,19%); tanah longsor 19 desa (12,26%); banjir bandang 10 desa (6,45%); dan gempa bumi 5 desa (3,23%).

4. Fasilitas Jalan Raya

Variabel Fasilitas Jalan Raya (FAS_JALAS) didefinisikan berdasarkan permukaan jalan terluas di desa tempat tinggal responden. Apabila permukaan jalan terluas di desa tersebut adalah aspal atau beton maka FAS_JALAS diberi nilai 1 dan 0 jika tidak. Variabel ini memiliki koefisien sebesar -0,0774 dan *odd ratio* 0,9256. Dengan model tahap pertama gabungan perdesaan dan perkotaan ini variabel FAS_JALAS memiliki probabilitas 0,4775, tetapi koefisien bertanda negatif membuktikan pentingnya jalan raya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jalan raya merupakan infrastruktur utama bagi mobilitas manusia dan barang. Apabila tersedia jalan beraspal yang cukup maka arus barang konsumsi dari kota ke desa akan semakin lancar, dan sebaliknya komoditas pertanian di pedesaan dengan mudah dapat dipasarkan di kota. Kemudahan tersebut dapat diukur dari aspek waktu serta biaya transportasi yang dibutuhkan. Apabila pemanfaatan waktu bisa dilakukan dengan baik dan biaya lebih efisien maka pendapatan rata-rata penduduk yang tinggal di

perdesaan bisa meningkat sehingga mengurangi peluang mereka untuk menjadi miskin.

5. Akses terhadap Fasilitas Listrik PLN

Variabel Akses terhadap Fasilitas Listrik PLN (AKS_LIST) diberi nilai 1 bila di desa tempat tinggal responden memiliki jaringan PLN dan 0 jika tidak. Variabel ini dikeluarkan dari model karena nilai koefisiennya tidak menunjukkan hubungan kausal yang logis menurut teori.

Data Podes SE 2006 menunjukkan bahwa sebanyak 433 (96,22%) desa di Provinsi Gorontalo telah memiliki jaringan listrik. Sedangkan akses PLN rumah tangga menurut data SUSENAS 2006 mencapai 64,54%. Apabila dipisahkan menurut status kemiskinan maka 20,97% rumah tangga yang menggunakan listrik PLN berstatus miskin dan 79,03 adalah penduduk tidak miskin. Rendahnya signifikansi variabel AKS_LIST berhubungan juga pola pemanfaatan listrik di Provinsi Gorontalo yang pada umumnya hanya dipakai untuk penerangan saja sehingga manfaatnya terhadap perekonomian tidak terlalu besar. Data menunjukkan bahwa pelanggan PLN masih sangat didominasi oleh rumah tangga sebesar 92,5% seperti ditunjukkan oleh Tabel 5. 9.

Tabel 5. 9
Jumlah Pelanggan PLN Per Kelompok Pelanggan
di Provinsi Gorontalo s.d. Juni 2007

Kelompok/Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Persentasi (%)
Rumah Tangga (S1,R1,R2,R3)	96,298	92.75%
Bisnis (B1,B2,B3)	3,644	3.51%
Industri (I1,I2,I3)	81	0.08%
Publik / Umum (S2,S3,P1,P2,P3)	3,798	3.66%
Jumlah	103,821	100.00%

Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo

6. Akses terhadap Fasilitas Komunikasi (signifikan pada $\alpha = 0,05$)

Akses terhadap Fasilitas Komunikasi (AKS_KOM) diukur berdasarkan ketersediaan jaringan telepon kabel atau seluler, 1 jika memiliki jaringan dan 0 jika tidak. Hasil regresi menunjukkan bahwa akses terhadap fasilitas komunikasi memiliki hubungan negatif secara signifikan pada kemiskinan. Rumah tangga yang tinggal pada daerah yang memiliki jaringan telepon memiliki resiko miskin sebesar 0,80 kali (lebih kecil) daripada rumah tangga pada daerah yang tidak memiliki jaringan telepon. Hal ini sangat logis karena penggunaan fasilitas komunikasi dapat menghemat biaya transportasi dan mengurangi waktu yang terbuang pada saat melakukan perjalanan untuk melakukan komunikasi secara konvensional. Dengan demikian alat komunikasi modern dapat mendorong produktivitas rumah tangga.

7. Ketersediaan Lembaga Keuangan

Variabel Ketersediaan Lembaga Keuangan (FAS_LKEU) dianggap cukup (bernilai 1) apabila pada desa tempat tinggal responden paling kurang terdapat salah satu lembaga keuangan berupa bank umum, BPR, LKM, atau Pegadaian atau paling kurang terdapat 2 buah koperasi yang melayani kebutuhan pembiayaan bagi masyarakat setempat. Hasil perhitungan terhadap variabel ini tidak menunjukkan hubungan kausal yang logis menurut teori. Hal ini memungkinkan untuk dijadikan indikator kontribusi lembaga keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Bila keberadaan lembaga keuangan dapat meningkatkan akses penduduk terhadap perkreditan maka selayaknya masyarakat disekitarnya akan mengalami peningkatan kesejahteraan juga. Tetapi bila hal tersebut tidak terjadi maka kemungkinan penyebabnya dapat berupa adanya hambatan untuk mengakses fasilitas kredit karena tidak sanggup memenuhi persyaratan yang berlaku, misalnya masalah jaminan, proses administrasi yang sulit, atau pengenaan tingkat bunga diatas kemampuan usaha

masyarakat setempat. Kemungkinan lainnya dapat berupa keengganan masyarakat sendiri untuk bertransaksi dengan lembaga keuangan, atau tingkat efisiensi pengelolaan kredit usaha yang rendah pada kalangan nasabah sendiri.

8. Akses terhadap Pelayanan Kesehatan

Variabel Akses terhadap Pelayanan Kesehatan (AKS_PELKES) didefinisikan sebagai kemudahan menjangkau fasilitas kesehatan. Penetapan nilainya dilakukan berdasarkan total bobot kemudahan. Akses pelayanan kesehatan dianggap cukup apabila jumlah bobot yang diperoleh paling rendah bernilai 7, dimana bobot yang diberikan jika mudah mencapai sarana kesehatan adalah: 3 untuk rumah sakit; -2 untuk rumah bersalin; serta 1 masing-masing untuk Puskesmas, Puskesmas pembantu, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, Posyandu, dan pondok bersalin desa (Polindes). Pada prinsipnya akses terhadap pelayanan kesehatan dianggap semakin baik apabila penduduk semakin memiliki alternatif yang lebih banyak dalam menentukan layanan kesehatan yang dimanfaatkan.

Variabel AKS_PELKES pada model kemiskinan gabungan perdesaan dan perkotaan tidak menunjukkan hubungan kausal yang logis menurut teori. Hal ini memiliki indikasi yang mirip dengan variabel FAS_LKEU. Walaupun fasilitas pelayanan kesehatan berada di tengah pemukiman tetapi tidak menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan misalnya dari sisi masyarakat terdapat budaya yang tidak mendukung pemanfaatan fasilitas kesehatan modern atau dari sisi lain pelayanan kesehatan mungkin saja tidak optimal, atau tidak sesuai kebutuhan.

9. Jarak ke Sekolah Terdekat

Variabel Jarak ke Sekolah Terdekat (JRK_SEKOLAH) diukur dengan jarak ke gedung SMP terdekat. Jika jarak ke gedung SMP

terdekat dari desa tempat tinggal responden lebih dari 4 Km maka variabel diberi nilai 1, jika kurang atau sama dengan 4 Km atau desa tempat tinggal responden memiliki gedung SMP sendiri maka diberi nilai 0.

Jarak ke sekolah penting untuk dimasukkan kedalam model karena faktor jarak memiliki pengaruh terhadap partisipasi sekolah dan tingkat biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh rumah tangga dalam menyekolahkan ART usia sekolah. Dalam jangka panjang hal tersebut akan berhubungan dengan tingkat pendidikan ART dan kemampuan memasuki dunia kerja.

Perhitungan menghasilkan *odd ratio* sebesar 1,0549 yang berarti bahwa rumah tangga yang tinggal pada desa yang tidak memiliki gedung SMP dan berjarak lebih dari 4 Km ke gedung SMP terdekat memiliki resiko kemiskinan sebesar 1,06 kali daripada penduduk yang lebih dekat dengan gedung SMP. Nilai *odd ratio* tersebut sekaligus menunjukkan bahwa jarak ke sekolah tidak terlalu signifikan terhadap kemiskinan, tetapi angka tersebut dapat membuktikan bahwa jarak sekolah dan kemiskinan berkorelasi positif.

10. Akses terhadap lembaga pendidikan keterampilan (signifikan pada $\alpha = 0,05$)

Akses terhadap lembaga pendidikan keterampilan (AKS_DIKTRAM) didefinisikan sebagai ketersediaan lembaga penyelenggara pendidikan keterampilan di desa tempat tinggal responden. Variabel AKS_DIKTRAM diberi nilai 1 apabila paling kurang terdapat salah lembaga keterampilan yang menyelenggarakan kursus bahasa, akuntansi, komputer, memasak, menjahit, kecantikan, montir atau elektronik, dan 0 jika tidak ada.

Hasil estimasi menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,4939 dan *odd ratio* 0,6102. Hal ini berarti penduduk yang tinggal pada wilayah yang memiliki paling kurang satu lembaga penyelenggara kursus keterampilan memiliki resiko menjadi miskin sebesar 0,61

kali daripada penduduk yang tinggal di desa/kelurahan tanpa lembaga kursus. Dengan perkataan lain, rumah tangga yang tinggal di desa/kelurahan tanpa lembaga kursus memiliki resiko miskin lebih besar.

Pendidikan keterampilan merupakan salah satu modal bagi masyarakat untuk memasuki dunia kerja dan meningkatkan produktivitas. Apabila lembaga keterampilan berada di wilayah setempat maka biaya yang diperlukan untuk mendapatkan tambahan keahlian teknis yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pekerjaan menjadi lebih murah sehingga masyarakat akan lebih mudah memperolehnya. Disamping itu sebahagian besar lowongan pekerjaan formal secara eksplisit menjadikan ijazah kursus tertentu sebagai persyaratan lamaran pekerjaan.

Dengan mengetahui pengaruh keberadaan lembaga penyelenggara pendidikan keterampilan maka pengambil kebijakan dapat mendorong peningkatan lembaga-lembaga tersebut baik dalam hal pembinaan kualitas, kuantitas maupun pembiayaan.

11. Tradisi Gotong-Royong

Variabel Tradisi Gotong Royong (TRA_GRYONG) bernilai 1 apabila penduduk di desa tempat tinggal responden mempunyai tradisi gotong-royong, dan 0 jika tidak. Menurut hasil estimasi variabel ini tidak menunjukkan hubungan kausal yang logis menurut teori terhadap kemiskinan.

12. Kerawanan Terhadap Perkelahian Massal

Dengan nilai *odd ratio* 1,4965 dan koefisien regresi 0,4031 untuk variabel RAW_RUSUH maka resiko rumah tangga yang tinggal di daerah yang memiliki karakteristik tersebut sebesar 1,50 kali jika dibandingkan dengan daerah yang tidak rawan kerusuhan atau perkelahian massal. Kategori rawan dalam hal ini apabila pernah terjadi peristiwa perkelahian massal dalam satu tahun yang lalu.

Daerah yang sering dilanda konflik sosial atau kerusuhan maka mungkin saja berdampak pada kurang nyamannya interaksi sosial dan mengganggu konsentrasi kerja. Tidak jarang perkelahian massal juga mengakibatkan kehilangan aset-aset penting bagi kegiatan produksi. Akibat selanjutnya adalah menurunnya produktivitas sehingga peluang menjadi miskin meningkat.

Dalam keadaan tertentu dapat terjadi sebaliknya. Kemiskinan yang disertai kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi dapat menjadi pemicu perkelahian massal. Jadi kemiskinan dan kesenjangan sangat dekat dengan konflik sosial.

13. Jumlah Anggota Keluarga (signifikan pada $\alpha = 0,01$)

Variabel Jumlah Anggota Keluarga pada penelitian ini dikonversi ke dalam *dummy variabel* dengan nilai 1 jika jumlah anggota keluarga atau jumlah anggota rumah tangga (ART) lebih dari 5 orang, dan 0 jika kurang dari orang atau sama dengan 5 orang. Nilai koefisien regresi menunjukkan angka 0,8971 dan *odd ratio* 2,4524. Artinya rumah tangga yang memiliki ART lebih dari 5 orang memiliki resiko miskin sebesar 2,45 kali dibandingkan penduduk yang memiliki jumlah ART 5 orang atau lebih sedikit.

Jumlah ART yang banyak mengandung konsekwensi semakin tingginya kebutuhan keluarga yang harus disediakan. Apabila keluarga tidak mampu meningkatkan pendapatan maka sebahagian kebutuhan akan dikorbankan. Bila pengeluaran yang harus dikorbankan adalah kebutuhan yang sangat penting seperti makanan, kesehatan atau pendidikan maka akibatnya dalam jangka panjang akan semakin menurunkan tingkat kesejahteraan keluarga. Pada rumah tangga agraris jumlah anggota keluarga yang banyak memungkinkan untuk menjadi masalah besar dalam perekonomian keluarga. Walaupun seluruh anggota keluarga yang termasuk angkatan kerja bisa bekerja tetapi produktivitas mereka akan dibatasi oleh luas lahan perkapita keluarga yang makin

menurun. Akibatnya pendapatan perkapita juga menurun, sehingga resiko menjadi miskin semakin besar.

Dalam skala agregat jumlah penduduk yang besar berpengaruh pada penurunan pemenuhan layanan publik per penduduk atau ART. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan kenaikan pada permintaan layanan publik. Apabila peningkatan kapasitas tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk maka distribusi pelayanan publik akan terganggu. Pengurangan pemenuhan kebutuhan layanan publik per ART akan lebih terasa pada layanan yang berbasis rumah tangga.

14. Rasio Ketergantungan (signifikan pada $\alpha = 0,01$)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah salah satu indikator demografis yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun (usia muda), ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas (usia tua) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif).⁴ Dalam penelitian ini variabel DEP_RATRT diberi nilai 1 jika angka ketergantungan pada level keluarga bernilai lebih dari 1 atau jumlah ART usia muda dan usia tua lebih besar dari jumlah ART usia produktif. Nilai koefisien regresi sebesar 0,6656 dan *odd ratio* sebesar 1,9456 bermakna bahwa rumah tangga dengan rasio ketergantungan lebih dari 1 atau (100%) memiliki resiko miskin sebesar 1,95 kali rumah tangga lainnya.

Semakin tingginya persentasi *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentasi *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

⁴ Badan Pusat Statistik, Rasio Ketergantungan. Diakses 4 September 2007 dari Data Statistik Indonesia.

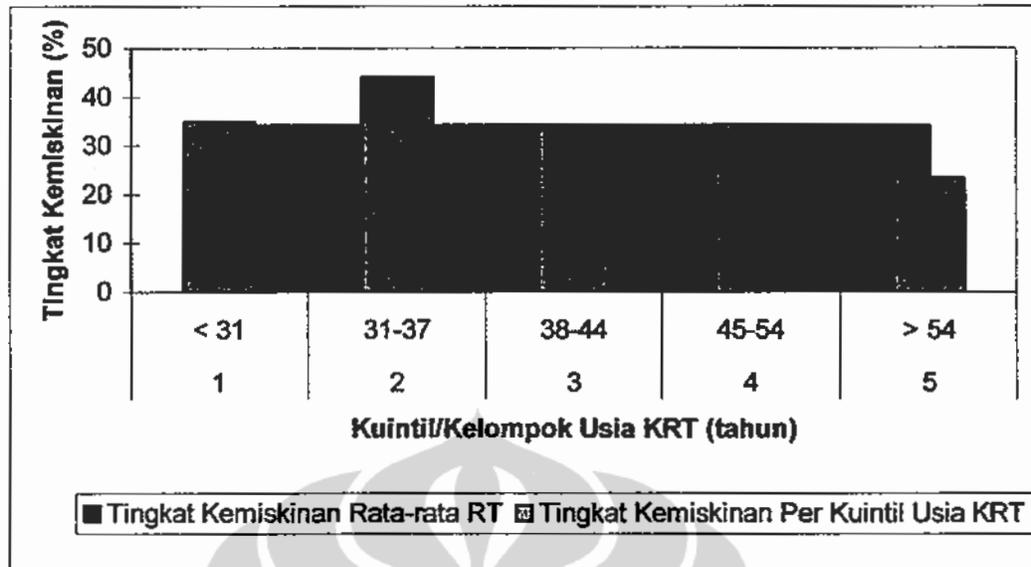
<http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/212/212/1/1/>

15.Usia Kepala Rumah Tangga (signifikan pada = 0,01)

Berdasarkan estimasi koefisien regresi, usia kepala rumah tangga (KRT) memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan, dengan kata lain semakin besar usia KRT maka resiko kemiskinan akan berkurang. Melalui pembatasan variabel KRT_USMUDA dengan memberi nilai 1 bila usia kurang dari 35 tahun dan 0 jika sebaliknya diperoleh nilai koefisien regresi 0,3623 dan *odd ratio* 1,4366 yang berarti bahwa resiko kemiskinan bagi keluarga dengan KRT berusia kurang dari 35 tahun adalah 1,44 kali resiko kemiskinan rumah tangga dengan KRT berusia 35 tahun keatas.

Usia 35 tahun merupakan angka median dalam kelompok usia produktif sehingga dapat dianggap sebagai pembatas produktivitas bagi kelompok rumah tangga produktif berusia muda dan berusia tua. Semakin dewasa usia kepala rumah tangga maka semakin tinggi kemampuan untuk mencapai posisi ekonomi keluarga yang mapan. Dalam ini diasumsikan bahwa kemapanan keluarga mulai dicapai setelah KRT berusia 35 tahun. Dengan demikian semakin cepat keputusan untuk menikah dan berrumah tangga maka semakin panjang waktu bagi keluarga untuk berada pada rumah tangga usia muda dengan tingkatan ekonomi yang belum mapan.

Kemungkinan ini agak relevan dengan fakta bahwa 31,68 % penduduk dengan KRT berusia 35 tahun keatas berstatus miskin sedangkan tingkat kemiskinan pada KRT dengan usia kurang dari 35 tahun lebih tinggi 6,87%, yakni berada pada level 38,55%. Apabila dikelompokkan menurut kuintil usia KRT, maka tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada 20% rumah tangga termuda kedua (kuintil 2) seperti pada Gambar 5.8.



Gambar 5. 8
Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Gorontalo
Tahun 2006 Menurut Kuintil Usia KRT

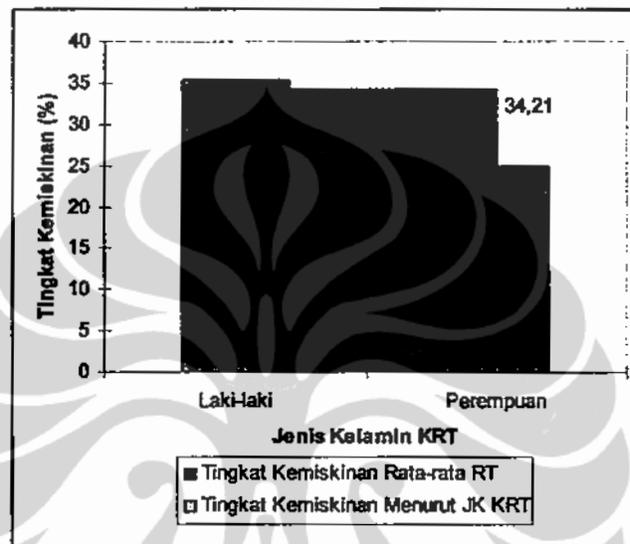
16. Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga

Variabel ini dimasukkan antara lain untuk mengetahui pengaruh *gender* terhadap kemiskinan. Pada umumnya di berbagai negara berkembang, yang paling menderita kemiskinan adalah wanita dan anak-anak. Fenomena kemiskinan kaum wanita terjadi antara lain karena rendahnya kesempatan dan kapasitas mereka untuk memiliki pendapatan sendiri, rendahnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak di sektor formal, dan sebagainya. Hal inilah yang memposisikan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan sebagai segmen masyarakat termiskin di Dunia Ketiga.⁵

Hasil estimasi pada model logit kemiskinan tahap pertama di Provinsi Gorontalo menunjukkan fakta yang sedikit berbeda. Dengan memasukkan variabel KRT_PEREMPUAN dengan nilai 1 jika kepala rumah tangga adalah perempuan dan 0 jika laki-laki diperoleh hasil bahwa variabel ini tidak signifikan dan memiliki koefisien bertanda negatif. Dengan demikian rumah tangga dengan KRT perempuan atau laki-laki menghadapi resiko kemiskinan yang

⁵ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan Jilid 1, terj. Haris Munandar dan Puji A.L. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004) hal. 256

hampir sama, bahkan resiko kemiskinan bagi KRT perempuan sedikit lebih rendah yakni sebesar 0,97 kali KRT laki-laki. Demikian pula proporsi rumah tangga miskin menurut jenis kelamin KRT, rumah tangga dengan KRT perempuan hanya 24,94% yang berstatus miskin, sedangkan yang KRT-nya laki-laki sebesar 35,31% (Gambar 5.9).



Gambar 5. 9
Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Gorontalo
Tahun 2006 Menurut Jenis Kelamin KRT

Hal ini terjadi karena antara KRT perempuan dan KRT laki-laki relatif memiliki tingkat pendidikan yang tidak jauh berbeda. Sebanyak 31,65% KRT wanita memperoleh ijazah yang lebih tinggi dari pendidikan SD, sedikit lebih tinggi daripada KRT laki-laki yakni 31,41%.

Dari sisi akses terhadap pasar tenaga kerja, data menunjukkan bahwa proporsi angkatan kerja perempuan yang bekerja masih lebih rendah daripada proporsi pekerja laki-laki tetapi selisihnya tidak terlalu besar. Angkatan kerja perempuan yang bekerja adalah sebesar 79,56% sedangkan proporsi pekerja laki-laki adalah 91,21%. Walaupun demikian angka 79,56% sudah cukup tinggi.

17. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (signifikan pada $\alpha = 0,01$)

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah angka yang menunjukkan bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti atau tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan.⁶

Variabel APAK_RT memiliki nilai koefisien -1,1122 dan odd 0,3288. Angka ini bermakna bahwa setiap kenaikan 1 persen (0,01) APAK pada level rumah tangga akan mengakibatkan perubahan pada resiko kemiskinan sebesar 0,33 kali. Dapat dikatakan pula bahwa semakin tinggi nilai APAK maka semakin rendah resiko kemiskinan. Kecenderungan ini sangat logis karena aktivitas bekerja merupakan harapan utama untuk memperoleh penghasilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Data ini penting bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan upaya mendorong masyarakat usia kerja untuk berusaha atau memasuki pasar kerja. Pendekatan yang dilakukan dapat melalui sisi penawaran, sisi permintaan maupun kombinasi sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja.

18. Jenis Pekerjaan KRT (PEK_PETANI dan PEK_BURTAN signifikan pada $\alpha = 0,01$)

Dari 8 jenis pekerjaan yang dimasukkan dalam model hanya 2 jenis pekerjaan memiliki pengaruh signifikan terhadap status miskin atau tidak miskin yakni pekerjaan sebagai petani informal (PEK_PETANI) dan buruh tani informal (PEK_BURTAN), masing-masing dengan nilai koefisien 0,5728 dan 0,5815 serta *odd ratio* 1,7733 dan 1,7887. Dengan demikian rumah tangga yang dikepalai oleh petani informal baik sebagai petani pemilik maupun sebagai

⁶ Badan Pusat Statistik, Angka Partisipasi Angkatan Kerja. Diakses 4 September 2007 dari Data Statistik Indonesia.
<http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/802/802/>

buruh tani sama-sama memiliki resiko menjadi miskin mendekati 2 kali lipat dari pada jenis pekerjaan lainnya.

Pertanian secara umum merupakan sektor yang sulit diandalkan untuk mendorong kesejahteraan penduduk yang bekerja pada sektor tersebut (petani). Perkembangan tingkat kesejahteraan petani dari tahun ke tahun bergerak sangat lamban. Kondisi kesejahteraan petani di Indonesia hanya naik 6,27% dalam kurun waktu tahun 1993 sampai tahun 2007, yang ditunjukkan dengan NTP nasional bulan Agustus 2007 sebesar 106,27 (Tahun dasar 1993)⁷. Walaupun data tersebut tidak memasukkan Provinsi Gorontalo sebagai sampel tetapi dapat dianggap cukup untuk dijadikan referensi.

Rendahnya NTP disebabkan oleh tingginya biaya produksi dan penambahan modal yang dibutuhkan pada kegiatan pertanian sedangkan nilai jual komoditi yang dihasilkan semakin rendah. Akibatnya insentif bagi pekerja pada sektor pertanian, semakin rendah. Walaupun demikian sektor pertanian tidak dapat ditinggalkan karena sektor ini menghidupi 49.32 % atau 464,285 penduduk Gorontalo pada tahun 2006. Lebih dari itu pertanian harus dapat mempertahankan ketahanan pangan nasional dan daerah. Oleh karena itu hal penting yang harus dilakukan adalah meningkatkan insentif atau pendapatan petani melalui kombinasi kebijakan subsidi dan non subsidi.

Pekerjaan lainnya yang memiliki resiko kemiskinan lebih dari 1 kali (lebih berpeluang miskin) adalah pekerja informal kehutanan (PEK_HUTAN), pekerja pada sektor perikanan (PEK_PRIKANAN), dan pembantu rumah tangga dan tenaga jasa kerumahtanggaan (PEK_PEMBRT). Sedangkan pekerja peternak atau buruh ternak informal (PEK_PETERNAK), pedagang informal (PEK_DAGANG), dan

⁷ Badan Pusat Statistik (2007). "Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga Produsen Gabah Dan Upah Buruh," Berita Resmi Statistik No. 57/11/Th. X, 1 November 2007. Diakses 19 Nopember 2007 dari BPS.
<http://www.bps.go.id/releases/files/ntp-01nop07.pdf?>

buruh kasar (PEK_BURKAS) cenderung tidak miskin tetapi resiko kemiskinannya masih mendekati 1.

19. Jumlah Jam Kerja

Variabel jumlah jam kerja (JUM_JAMKER) didefinisikan dari jumlah jam kerja seminggu rata-rata anggota rumah tangga. Jika kurang dari 7 jam seminggu maka variabel diberi nilai 1, jika 7 jam atau lebih maka diberi nilai 0. Variabel ini tidak menunjukkan hubungan kausal yang logis menurut teori terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa jumlah jam kerja tidak berpengaruh terhadap peluang menjadi miskin atau tidak miskin. Data menunjukkan bahwa jumlah jam kerja rata-rata rumah tangga keluarga miskin adalah 11,79 jam per minggu sedangkan keluarga tidak miskin memiliki jam kerja rata-rata 17,06 jam per minggu atau hanya berselisih 5,27 jam lebih lama.

20. Akses Terhadap Kredit Usaha (signifikan pada $\alpha = 0,10$)

Variabel kredit usaha (AKS_KREDUS) diukur dengan akses responden terhadap kredit usaha dalam satu tahun yang lalu, baik yang bersumber dari kredit program pemerintah seperti PPK dan P2KP maupun yang bersumber dari bank, koperasi, perorangan dan sumber lainnya. Keluarga yang pernah memanfaatkan diberi nilai 1 dan yang tidak menerima diberi angka 0. Nilai *odd ratio* sebesar 0,6376 dapat menjelaskan penurunan resiko kemiskinan jika rumah tangga memiliki akses terhadap kredit usaha. Dalam pengertian lain adanya fasilitas kredit yang mudah diakses dapat menyebabkan resiko kemiskinan menjadi rendah.

Penyediaan fasilitas kredit yang mudah diakses dan tingkat bunga yang rendah sangat penting bagi untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat karena kekurangan modal merupakan masalah yang selalu dialami oleh masyarakat. Dalam hal ini kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan karena variabel Ketersediaan Lembaga keuangan tidak signifikan dalam model.

Ini mungkin untuk diinterpretasikan bahwa keberadaan lembaga keuangan di desa-desa belum mencapai tingkat pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di sekitarnya.

21. Karakteristik Perumahan (signifikan pada $\alpha = 0,01$)

Karakteristik perumahan dalam penelitian ini diwakili oleh tiga indikator, masing-masing: (a) karakteristik atap (ATAP_RUMBIA), 1 jika bagian terluas atap rumah adalah ijuk atau rumbia, 0 jika lainnya; (b) karakteristik dinding (DIND_BAMBU), 1 jika Jenis dinding terluas adalah bambu; dan (c) luas lantai per ART (LANT_PERART), 1 jika kurang dari 8 m^2 0 jika 8 m^2 atau lebih.

Sebagaimana Tabel 5. 8 ketiga variabel memiliki koefisien positif, artinya berpengaruh positif terhadap peningkatan peluang miskin. Dengan membandingkan nilai *odd ratio* diketahui pula bahwa diantara ketiga variabel tersebut variabel luas lantai per ART memiliki pengaruh tertinggi yakni dengan nilai resiko 2,48 kali jika dibandingkan dengan resiko miskin bagi rumah tangga yang memiliki luas per ART dibawah 8 m^2 .

Rumah bagi keluarga sangat penting artinya selain fungsinya secara langsung sebagai tempat berlindung yang memiliki hubungan dengan tingkat kesehatan ART. Rumah yang baik juga memberikan kenyamanan dan efektivitas waktu istirahat dalam memulihkan tenaga ART di dalamnya yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kerja pada hari berikutnya. Selain itu rumah juga dapat mendukung performa penghuninya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat sekitar dalam melakukan interaksi sosial ekonomi. Secara formal rumah dengan syarat tertentu juga dapat dijadikan agunan untuk memperoleh kredit usaha. Dengan logika ini maka rumah yang layak akan mengurangi resiko kemiskinan bagi penghuninya.

22. Keluhan Kesehatan (signifikan pada $\alpha = 0,05$)

Keluhan kesehatan (GANG_KES) memiliki hubungan positif terhadap resiko kemiskinan. Apabila ada anggota keluarga yang pernah mengalami gangguan kesehatan paling kurang 1 hari dalam sebulan berupa panas, diare, batuk, sakit kepala berulang, pilek, sakit gigi, atau asma, maka keluarga tersebut memiliki resiko miskin 1,21 kali daripada rumah tangga yang tidak pernah mengalami gangguan.

23. Pendidikan (KRT_DIKSD, APM_SDRT, dan APM_SMPRT signifikan pada $\alpha = 0,01$, KRT_DIKSMP signifikan pada $\alpha = 0,05$)

Dalam model ini faktor pendidikan diwakili oleh 5 variabel masing-masing: (a) pendidikan kepala rumah tangga (KRT_DIKSD) 1 jika tidak memiliki ijazah atau hanya memiliki ijazah SD, 0 jika lainnya; (b) pendidikan kepala rumah tangga (KRT_DIKSMP) 1 jika ijazah tertinggi adalah SMP, 0 jika lainnya; (c) rasio ART dewasa yang memenuhi standar pendidikan dasar 9 tahun terhadap seluruh ART dewasa (RAS_DIKDAS), angka persen bernilai 0-1; (d) Angka Partisipasi Murni SD (APM_SDRT), rasio jumlah ART usia SD yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan SD terhadap total ART yang berada pada kelompok usia SD (7-12); dan (e) Angka Partisipasi Murni SMP (APM_SMPRT) jumlah ART usia SMP yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan SMP dibagi jumlah ART yang berada pada kelompok usia SMP (13-15). Hasilnya menunjukkan bahwa kepala keluarga dengan tingkat pendidikan lulus SD ke bawah dan pendidikan tertinggi SMP sama-sama memiliki resiko miskin mendekati 2 kali resiko rumah tangga dengan pendidikan lebih tinggi. Sedangkan Angka partisipasi murni memiliki koefisien negatif sehingga nilai *odd ratio*-nya dibawah 1. Artinya semakin tinggi nilai APM maka perbandingan resiko miskin semakin turun. Demikian pula dengan Variabel Rasio Pendidikan Dasar, semakin tinggi nilai rasio maka resiko miskin semakin rendah. Signifikannya kelima variabel tersebut membuktikan bahwa

pendidikan baik bagi kepala rumah tangga, anak-anak dan anggota rumah tangga lainnya memiliki korelasi dengan kemiskinan.

24. Akses terhadap Air Bersih

Variabel Akses terhadap Air Bersih (AIR_BERS) didefinisikan berdasarkan Sumber Air Minum. Jika bersumber dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air terlindungi diberi nilai 1, dan 0 jika dari sumber lainnya. Variabel ini menurut perhitungan tidak menunjukkan hubungan kausal yang logis menurut teori dengan kemiskinan. 64,60% rumah tangga miskin memiliki akses terhadap air bersih sementara 17,97% rumah tangga tidak miskin tidak memiliki akses terhadap air bersih.

25. Fasilitas Buang Air Besar

Variabel Fasilitas Buang Air Besar (FAS_KLOSET) diberi nilai 1 apabila menggunakan kloset berupa leher angsa, cemplung/cubluk atau plengsengan, 0 jika tidak menggunakan kloset. Dari hasil estimasi koefisien diperoleh angka -0,2365 dan *odd ratio* 0,7894. Dengan demikian jika rumah tangga menggunakan kloset memiliki resiko miskin lebih rendah daripada resiko miskin bagi rumah tangga yang tidak memiliki kloset. Kloset penting untuk dijadikan variabel karena fasilitas ini dapat digunakan sebagai tolok ukur standar sanitasi keluarga yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan dan seterusnya.

Selanjutnya untuk mencari faktor determinan kemiskinan maka dilakukan pemilihan variabel yang signifikan pada taraf nyata (α) = 0,2. Konstruksi Model logit kemiskinan tahap kedua untuk gabungan perdesaan dan perkotaan menghasilkan 22 variabel yang signifikan sebagaimana Tabel 5. 10.

Tabel 5. 10
Koefisien Regresi, Probabilitas dan Odd Ratio
Model Logit Kemiskinan Tahap Kedua
Gabungan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi Gorontalo

No.	Variabel	Koefisien	Probabilitas	Odd Ratio
	C	-2,1643	0,0000	0,1148
1	DES KOT	1,8484	0,0000	6,3495
2	JRK KAB	0,6075	0,0000	1,8358
3	FAS JALAS	-0,1378	0,1858	0,8713
4	AKS DIKTRAM	-0,4448	0,0272	0,6409
5	RAW RUSUH	0,5767	0,0961	1,7801
6	JUM ART	0,9021	0,0000	2,4649
7	DEP RATRT	0,6645	0,0000	1,9435
8	KRT USMUDA	0,3597	0,0002	1,4329
9	APAK RT	-1,0976	0,0000	0,3337
10	PEK PETANI	0,5701	0,0000	1,7685
11	PEK BURTAN	0,5311	0,0004	1,7008
12	AKS KREDUS	-0,4493	0,0713	0,6381
13	ATAP RUMBIA	0,4027	0,0010	1,4959
14	DIND BAMBU	0,5777	0,0000	1,7819
15	LANT PERART	0,9236	0,0000	2,5185
16	GANG KES	0,1723	0,0668	1,1880
17	KRT DIKSD	0,6535	0,0066	1,9222
18	KRT DIKSMP	0,5728	0,0294	1,7733
19	RAS DIKDAS	-0,4008	0,1624	0,6698
20	APM SDRT	-0,9284	0,0008	0,3952
21	APM SMPRT	-0,4892	0,0024	0,6131
22	FAS KLOSET	-0,2615	0,0087	0,7699
Observasi				3.356
LR statistic			(22 df)	1334,35
Probability(LR stat)				0,000000
McFadden R-squared				0,310224

Sumber : Diolah dari data Susenas 2006 dan PODES SE2006

Sesuai dengan nilai probabilitas pada Tabel 5. 10 tersebut berarti bahwa secara parsial masing-masing variabel dapat menjelaskan variasi variabel "MISKIN" pada derajat kepercayaan 80%. Secara keseluruhan model juga signifikan pada derajat kepercayaan 99% dimana nilai probabilitas (*likelihood ratio statistic*) adalah 0,0000. Artinya variabel bebas secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi perubahan kecenderungan penduduk berstatus miskin atau tidak miskin pada derajat kepercayaan 99%.

Berdasarkan tingkat signifikansinya maka ke-22 variabel dalam model ini dengan pendekatan regresi logistik dianggap sebagai faktor determinan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Dari 22 variabel bebas dalam model 14 variabel memiliki koefisien bernilai positif dan 8 lainnya bernilai negatif. Tanda koefisien regresi sangat penting artinya

untuk melakukan prediksi nilai peluang seseorang berstatus miskin atau tidak miskin apabila karakteristik variabel yang berhubungan dengan penduduk tersebut diketahui.

Dengan memasukkan variabel dan nilai koefisien regresi pada Tabel 5. 10 kedalam rumus (3. 12) maka model kemiskinan pada gabungan daerah perdesaan dan perkotaan di Provinsi Gorontalo dapat ditulis sebagai berikut :

$$P(\text{MISKIN} = 1 | x_i) = \frac{1}{1 + \exp(-z)}, i = 1, 2, \dots, 22$$

dimana

P = variabel terikat biner yang menunjukkan peluang seorang individu berstatus miskin (MISKIN =1) atau tidak miskin (MISKIN=0)

sedangkan

$$z = - 2.1643 + 1.8484 \text{ DES_KOT} \\ + 0.6075 \text{ JRK_KAB} - 0.1378 \text{ FAS_JALAS} \\ - 0.4448 \text{ AKS_DIKTRAM} + 0.5767 \text{ RAW_RUSUH} \\ + 0.9021 \text{ JUM_ART} + 0.6645 \text{ DEP_RATRT} \\ + 0.3597 \text{ KRT_USMUDA} - 1.0976 \text{ APAK_RT} \\ + 0.5701 \text{ PEK_PETANI} + 0.5311 \text{ PEK_BURTAN} \\ - 0.4493 \text{ AKS_KREDUS} + 0.4027 \text{ ATAP_RUMBIA} \\ + 0.5777 \text{ DIND_BAMBU} + 0.9236 \text{ LANT_PERART} \\ + 0.1723 \text{ GANG_KES} + 0.6535 \text{ KRT_DIKSD} \\ + 0.5728 \text{ KRT_DIKSMP} - 0.4008 \text{ RAS_DIKDAS} \\ - 0.9284 \text{ APM_SDRT} - 0.4892 \text{ APM_SMPRT} \\ - 0.2615 \text{ FAS_KLOSET} + \epsilon$$

Nilai intersep (C) sebesar -2,1643 mengandung arti bahwa pada saat semua variabel bernilai 0 (nol) maka kemungkinan berstatus miskin adalah 10,30% yang dapat diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut :

$$P(\text{MISKIN} = 1 | x_i) = \frac{1}{1 + \exp(-z)} \\ = \frac{1}{1 + \exp(2,1643)} = \frac{1}{1 + 8,7088} = 0,1030$$

Dengan demikian faktor determinan kemiskinan pada gabungan daerah perdesaan dan perkotaan di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik Regional

1. Status daerah perdesaan, memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Rumah tangga yang berada di perdesaan memiliki resiko menjadi miskin sebanyak 6.35 kali bila dibandingkan dengan rumah tangga yang tinggal di perkotaan.
2. Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota, memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Rumah tangga yang tinggal di daerah dengan jarak tempuh lebih dari 10,6 Km ke ibukota kabupaten/kota memiliki resiko menjadi miskin sebesar 1,84 kali bila dibandingkan dengan rumah tangga yang berada pada jarak lebih dekat atau dibawah angka tersebut.

b. Karakteristik Komunitas

1. Fasilitas jalan raya, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Rumah tangga yang tinggal pada desa dengan permukaan jalan terluas adalah aspal atau beton memiliki resiko miskin sebesar 0,87 kali penduduk desa dengan permukaan jalan terluas bukan aspal/beton.
2. Akses terhadap lembaga pendidikan keterampilan, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penduduk yang tinggal pada wilayah yang memiliki paling kurang satu lembaga penyelenggara kursus keterampilan memiliki resiko menjadi miskin sebesar 0,64 kali daripada penduduk yang tinggal di desa/kelurahan tanpa lembaga kursus.
3. Kerawanan Terhadap Perkelahian Massal, berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Resiko rumah tangga yang tinggal di daerah yang rawan perkelahian massal adalah sebesar 1,67 kali jika dibandingkan dengan daerah yang tidak rawan kerusuhan atau perkelahian massal.

c. Karakteristik rumah tangga dan individu

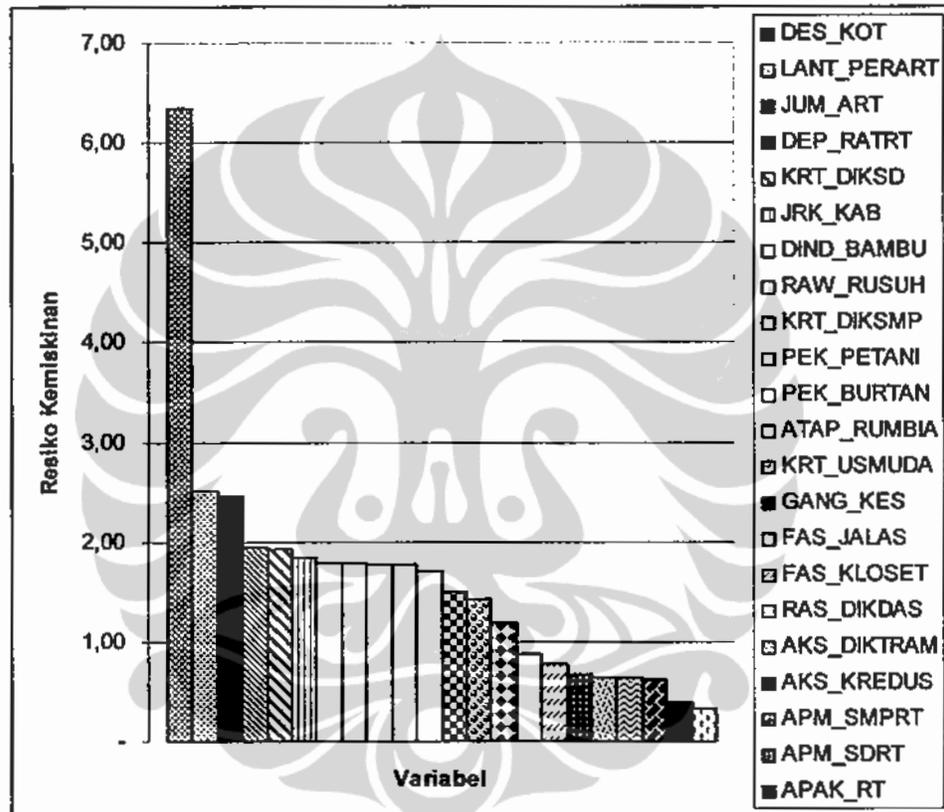
1. Jumlah Anggota Keluarga, berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Rumah tangga yang memiliki ART lebih dari 5

- orang memiliki resiko miskin sebesar 2,46 kali dibandingkan penduduk yang memiliki jumlah art 5 orang atau lebih sedikit.
2. Rasio Ketergantungan, berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Rumah tangga dengan rasio ketergantungan lebih dari 1 atau (100%) memiliki resiko miskin sebesar 1,94 kali rumah tangga lainnya.
 3. Usia Kepala Rumah Tangga. Keluarga dengan KRT berusia kurang dari 35 tahun memiliki resiko kemiskinan 1,43 kali resiko kemiskinan rumah tangga dengan KRT berusia 35 tahun keatas.
 4. Angka Partisipasi Angkatan Kerja, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Semakin tinggi nilai APAK maka semakin rendah resiko kemiskinan.
 5. Jenis Pekerjaan KRT.
 - Apabila pekerjaan kepala rumah tangga adalah sebagai petani informal maka rumah tangga tersebut memiliki resiko kemiskinan sebesar 1,77 kali dibandingkan dengan rumah tangga dengan pekerjaan lainnya.
 - Apabila kepala rumah tangga bekerja sebagai buruh tani informal maka resiko kemiskinan adalah sebesar 1,70 kali.
 6. Akses Terhadap Kredit Usaha, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Rumah tangga yang pernah memperoleh kredit usaha yang bersumber dari kredit program pemerintah seperti PPK dan P2KP maupun yang bersumber dari bank, koperasi, perorangan dan sumber lainnya memiliki resiko miskin sebesar 0,64 kali rumah tangga yang tidak pernah memperoleh kredit usaha.
 7. Karakteristik Perumahan.
 - Rumah tangga yang memiliki rumah dengan atap terbuat dari bahan ijuk atau rumbia memiliki resiko miskin sebesar 1,50 kali.
 - Rumah tangga yang memiliki rumah dengan dinding terbuat dari bambu memiliki resiko miskin sebesar 1,78 kali.

- Rumah tangga yang memiliki rumah dengan luas lantai per ART kurang dari 8 m² memiliki resiko miskin sebesar 2,52 kali.
8. Keluhan Kesehatan, berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Apabila ada anggota keluarga yang pernah mengalami gangguan kesehatan paling kurang 1 hari dalam sebulan berupa panas, diare, batuk, sakit kepala berulang, pilek, sakit gigi, atau asma, maka keluarga tersebut memiliki resiko miskin 1,19 kali daripada rumah tangga yang tidak pernah mengalami gangguan.
9. Pendidikan.
- Jika kepala rumah tangga jika tidak memiliki ijazah atau hanya memiliki ijazah SD maka resiko kemiskinan sebesar 1,92 dibandingkan rumah tangga dengan pendidikan KRT lebih tinggi.
 - Rumah tangga dengan yang dikepalai oleh seorang lulusan SMP memiliki resiko miskin sebesar 1,77 kali rumah tangga lainnya.
 - Semakin tinggi Rasio ART dewasa yang memenuhi standar pendidikan dasar 9 tahun terhadap seluruh ART dewasa maka resiko kemiskinan semakin rendah
 - Semakin tinggi Angka Partisipasi Murni SD maka resiko kemiskinan semakin rendah
 - Semakin tinggi Angka Partisipasi Murni SMP resiko kemiskinan semakin rendah.
10. Fasilitas Buang Air Besar. Apabila fasilitas buang air besar yang dipakai oleh anggota rumah tangga menggunakan kloset berupa leher angsa, cemplung/cubluk atau plengsengan, resiko miskin sebesar 0,77 kali dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak menggunakan kloset.

Dari seluruh faktor determinan yang dijelaskan diatas diketahui bahwa resiko tertinggi menjadi miskin adalah rumah tangga yang berada di

perdesaan dengan resiko 6,35 kali, sedangkan faktor determinan dengan resiko kemiskinan terkecil adalah angka partisipasi angkatan kerja. Tingkatan resiko kemiskinan berdasarkan model tersebut disajikan pada Gambar 5.10. Tingkatan resiko kemiskinan ini penting untuk dijadikan dasar dalam penyusunan prioritas kebijakan penanggulangan kemiskinan dimana rasio tertinggi merupakan prioritas tertinggi pula.



Gambar 5. 10
Faktor Determinan Kemiskinan pada Gabungan Daerah Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi Gorontalo Menurut Tingkatan Resiko Kemiskinan

5.2.2. Faktor Determinan Kemiskinan pada Daerah Perdesaan

Sesuai dengan Tabel 5. 8 variabel bebas model logit tahap pertama kemiskinan pada wilayah perdesaan di Provinsi Gorontalo yang memiliki hubungan kausal yang logis menurut teori terhadap kemiskinan berjumlah 31 variabel signifikan pada taraf nyata (α) = 0,01; 4 variabel signifikan pada taraf nyata (α) = 0,05; dan 3 variabel signifikan pada taraf nyata (α) = 0,20. Hubungan antara variabel-

variabel yang diuji pada model kemiskinan tahap pertama daerah perdesaan menunjukkan tanda koefisien yang sama dengan model gabungan perdesaan dan perkotaan walaupun nilainya berbeda. Kesamaan hubungan variabel tersebut berarti bahwa karakteristik perdesaan mendominasi sebahagian besar wilayah Provinsi Gorontalo. Hal ini cukup beralasan karena 83,78% desa/kelurahan di Provinsi Gorontalo dikategorikan sebagai perdesaan.

Model logit kemiskinan tahap kedua untuk daerah perdesaan menghasilkan 23 variabel yang signifikan pada taraf nyata ($\alpha = 0,20$). Variabel tersebut pada umumnya juga sama dengan Model tahap kedua kemiskinan pada gabungan daerah perdesaan dan perkotaan, terkecuali masuknya variabel berikut :

1. Kerawanan terhadap bencana alam, berpengaruh positif terhadap resiko kemiskinan. Rumah tangga yang tinggal pada daerah rawan bencana alam memiliki resiko 1,14 kali lebih tinggi daripada penduduk yang tinggal pada daerah yang tidak rawan.
2. Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Apabila kepala rumah tangga bekerja sebagai pembantu rumah tangga maka rumah tangga tersebut memiliki resiko kemiskinan sebesar 1,79 kali dibandingkan dengan rumah tangga dengan pekerjaan lainnya.

Koefisien regresi dan odd ratio selengkapnya sebagaimana Tabel 5. 11. Dengan melihat Nilai probabilitas diketahui bahwa variabel bebas secara keseluruhan mampu menjelaskan variasi perubahan kecenderungan penduduk berstatus miskin atau tidak miskin di wilayah perdesaan di Provinsi Gorontalo pada taraf nyata (α) = 0,2.

Tabel 5. 11
Koefisien Regresi, Probabilitas dan Odd Ratio
Model Logit Kemiskinan Tahap Kedua
Daerah Perdesaan di Provinsi Gorontalo

No.	Variabel	Koefisien	Probabilitas	Odd Ratio
	C	-0,1768	0,6930	0,8379
1	JRK KAB	0,5842	0,0000	1,7935
2	RAW BCANA	0,1276	0,2072	1,1361
3	FAS JALAS	-0,1413	0,1766	0,8682
4	AKS DIKTRAM	-0,3400	0,1263	0,7118
5	RAW RUSUH	0,4757	0,1730	1,6091
6	JUM ART	0,9416	0,0000	2,5640
7	DEP RATRT	0,5616	0,0000	1,7535
8	KRT USMUDA	0,4020	0,0001	1,4948
9	APAK RT	-1,0916	0,0000	0,3357
10	PEK PETANI	0,6015	0,0000	1,8248
11	PEK BURTAN	0,5286	0,0006	1,6966
12	PEK PEMBRT	0,5846	0,1710	1,7942
13	AKS KREDUS	-0,3961	0,1281	0,6729
14	ATAP RUMBIA	0,3920	0,0017	1,4800
15	DIND BAMBU	0,5445	0,0000	1,7238
16	LANT PERART	0,9412	0,0000	2,5630
17	GANG KES	0,2254	0,0199	1,2528
18	KRT DIKSD	0,6143	0,0139	1,8484
19	KRT DIKSMP	0,5586	0,0417	1,7481
20	RAS DIKDAS	-0,3851	0,1951	0,6804
21	APM SDRT	-1,1285	0,0002	0,3235
22	APM SMPRT	-0,4974	0,0028	0,6081
23	FAS KLOSET	-0,2389	0,0206	0,7875
Observasi				2.540
LR statistic			(23 df)	736,2943
Probability(LR stat)				0,000000
McFadden R-squared				0,211626

Sumber : Diolah dari data Susenas 2006 dan PODES SE2006

Mengacu pada nilai estimasi koefisien korelasi pada Tabel 5. 11 model kemiskinan di daerah perdesaan Provinsi Gorontalo dapat dirumuskan :

$$P(\text{MISKIN} = 1 | x_i) = \frac{1}{1 + \exp(-z)}, i = 1, 2, \dots, 23$$

dimana

P = variabel terikat biner yang menunjukkan peluang seorang individu berstatus miskin (MISKIN =1) atau tidak miskin (MISKIN=0)

Dari tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa karakteristik rumah tangga dengan resiko tertinggi menjadi miskin adalah rumah tangga yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 orang (2,56 kali), rumah tangga dengan luas lantai perkapita kurang dari 8 m² (2,56 kali), rumah tangga yang KRT-nya tidak memiliki atau hanya memiliki ijazah SD (1,85 kali), dan seterusnya.

5.2.3. Faktor Determinan Kemiskinan pada Daerah Perkotaan

Hubungan variabel bebas dengan kemiskinan pada model kemiskinan tahap pertama di daerah perkotaan Provinsi Gorontalo seperti pada Tabel 5. 8 memiliki banyak perbedaan dengan model perdesaan atau gabungan perdesaan dan perkotaan. Variabel yang memiliki hubungan berbeda adalah sebagai berikut :

a. Variabel dengan koefisien bertanda negatif di perdesaan tetapi bertanda positif di perkotaan

1. Jenis pekerjaan kepala rumah tangga (PEK_DAGANG signifikan pada $\alpha = 0,05$, PEK_PRIKANAN signifikan pada $\alpha = 0,10$)

Jenis pekerjaan yang memiliki tanda koefisien berbeda adalah pedagang informal (PEK_DAGANG) dan pekerja sektor perikanan (PEK_PRIKANAN). Pada model kemiskinan perdesaan variabel ini bertanda negatif tetapi pada model perkotaan bertanda positif. Bekerja sebagai pedagang informal di perkotaan menanggung resiko kemiskinan lebih dari 3,9 kali daripada pekerja pada jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan pekerja pada sektor perikanan memiliki resiko miskin 4,0 kali dibandingkan dengan rumah tangga yang KRT-nya memilih jenis pekerjaan lainnya. Hal ini berbeda dengan karakteristik kemiskinan di perdesaan dimana kedua pekerjaan tersebut memiliki resiko miskin di bawah 0, artinya nelayan dan pedagang di perdesaan cenderung tidak miskin. Kondisi tersebut diduga disebabkan oleh kurangnya penduduk perdesaan yang bekerja sebagai pedagang informal. Rendahnya populasi pedagang di perdesaan karena penduduk desa yang jarang

sehingga tingkat transaksi sangat rendah membuat orang kurang tertarik untuk berusaha pada jenis pekerjaan ini. Adapun yang memilih jadi pedagang biasanya rumah tangga yang relatif memiliki tingkatan ekonomi yang cukup mapan sehingga tidak khawatir berbisnis dalam suasana perputaran uang yang lambat. Lain halnya dengan perkotaan. Menjadi pedagang informal mungkin saja merupakan pekerjaan yang cenderung menjadi pilihan terakhir untuk bertahan hidup bagi masyarakat miskin perkotaan. Tetapi karena populasi pedagang terlalu banyak maka usaha mereka tidak mencapai skala ekonomi yang menguntungkan.

Demikian pula dengan nelayan informal, jika berada di perdesaan maka kecenderungan miskin atau tidak miskin berimbang tetapi bila berada di perkotaan akan cenderung miskin. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya persaingan dengan nelayan formal yang memiliki alat penangkap ikan yang lebih lengkap.

2. Jenis kelamin kepala rumah tangga (KRT_PEREMPUAN)

Secara umum bias gender tidak terlalu menonjol di provinsi Gorontalo. Walaupun variabel ini bertanda positif tetapi tidak signifikan.

b. Variabel yang tidak memiliki hubungan kausal yang logis menurut teori pada perdesaan tetapi logis di perkotaan

1. Akses terhadap Air Bersih

Akses terhadap Air berhubungan negatif dengan kemiskinan. Air bersih bagi masyarakat perdesaan air benar-benar merupakan barang bebas tetapi di perkotaan air dapat digolongkan sebagai barang ekonomis karena harus dibeli. Oleh karena itu untuk memperoleh air bersih bisa jadi merupakan sesuatu yang sulit bagi rumah tangga miskin di perkotaan.

2. Tradisi Gotong-royong

Variabel ini berhubungan negatif terhadap kemiskinan. Tradisi Gotong royong disebut juga sebagai modal sosial. Dengan

adanya tradisi Gotong royong maka kepedulian sosial dan saling membantu antar sesama masyarakat akan terjalin dengan baik. Melalui tradisi seperti ini maka beban masyarakat miskin akan lebih ringan sehingga kesempatan untuk keluar dari Jerat kemiskinan semakin besar.

3. Akses terhadap pelayanan kesehatan.

Variabel ini berhubungan negatif terhadap kemiskinan. Artinya masyarakat yang tinggal di daerah yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup memiliki resiko kemiskinan yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan di perkotaan dapat berfungsi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat.

- c. Variabel yang memiliki hubungan kausal logis menurut teori pada perdesaan tetapi tidak logis pada model perkotaan
- Beberapa kemungkinan penyebab tertolaknya beberapa variabel dalam kemiskinan model antara lain: (1) variabel tersebut terdistribusi secara merata pada seluruh atau sebahagian besar responden perkotaan baik rumah tangga miskin maupun tidak miskin; (b) variabel tersebut memiliki frekuensi yang sangat kecil atau tidak muncul sebagai karakter rumah tangga di perkotaan; (c) variabel tersebut terdistribusi secara acak dan tidak memiliki korelasi dengan status miskin atau tidak miskin.

Pada taraf nyata (α) = 0,20 atau model pada tahap kedua kemiskinan pada daerah perkotaan terdapat 13 variabel yang signifikan sebagaimana tabel 5.12.

Variabel tersebut dirumuskan dalam model sebagai berikut :

$$P(\text{MISKIN} = 1 | x_i) = \frac{1}{1 + \exp(-z)}, i = 1, 2, \dots, 13$$

dimana

P = variabel terikat biner yang menunjukkan peluang seorang individu berstatus miskin (MISKIN =1) atau tidak miskin (MISKIN=0)

sedangkan

$$z = - 3.8349 \quad C \quad + 1.6559 \quad \text{JRK_KAB}$$

$$- 1.2406 \quad \text{AKS_PELKES} \quad - 0.8404 \quad \text{AKS_DIKTRAM}$$

$$+ 0.8603 \quad \text{JUM_ART} \quad + 1.7489 \quad \text{DEP_RATRT}$$

$$+ 0.9554 \quad \text{KRT_PEREMPUAN} \quad - 1.4743 \quad \text{APAK_RT}$$

$$+ 2.1450 \quad \text{PEK_BURTAN} \quad + 1.5734 \quad \text{PEK_PRIKANAN}$$

$$+ 1.1272 \quad \text{PEK_DAGANG} \quad + 1.4186 \quad \text{DIND_BAMBU}$$

$$+ 1.1875 \quad \text{LANT_PERART} \quad + 0.8566 \quad \text{KRT_DIKSD}$$

$$+ \quad \quad \quad \epsilon$$

Nilai intersep (C) dalam model kemiskinan perkotaan bernilai -3,8349 dan nilai eksponennya adalah 0,0216, artinya jika semua variabel bernilai nol maka probabilitas miskin adalah 2,16%.

Tabel 5. 12
Koefisien Regresi, Probabilitas dan Odd Ratio
Model Logit Kemiskinan Tahap Kedua
Daerah Perkotaan di Provinsi Gorontalo

No.	Variabel	Koefisien	Probabilitas	Odd Ratio
	C	-3,8349	0,0000	0,0216
1	JRK KAB	1,6559	0,0016	5,2378
2	AKS PELKES	-1,2406	0,0506	0,2892
3	AKS DIKTRAM	-0,8404	0,1534	0,4315
4	JUM ART	0,8603	0,1251	2,3638
5	DEP RATRT	1,7489	0,0001	5,7485
6	KRT PEREMPUAN	0,9554	0,0962	2,5997
7	APAK RT	-1,4743	0,0582	0,2289
8	PEK BURTAN	2,1450	0,0041	8,5422
9	PEK PRIKANAN	1,5734	0,0142	4,8228
10	PEK DAGANG	1,1272	0,0621	3,0870
11	DIND BAMBU	1,4186	0,0032	4,1312
12	LANT PERART	1,1875	0,0095	3,2790
13	KRT DIKSD	0,8566	0,0941	2,3551
Observasi				816
LR statistic			(13 df)	88,21014
Probability(LR stat)				0,000000
McFadden R-squared				0,319175

Sumber : Diolah dari data Susenas 2006 dan PODES SE2006

Perbandingan jenis dan jumlah variabel yang signifikan pada taraf nyata (α) = 0,2 menjadi bukti kuantitatif perbedaan karakteristik kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Diantara 13 karakteristik kemiskinan perkotaan terdapat 4 karakteristik yang tidak signifikan pada model kemiskinan perdesaan maupun gabungan perdesaan dan perkotaan tetapi signifikan pada model perkotaan. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Akses terhadap Pelayanan Kesehatan

Koefisien variabel *AKS_PELKES* pada model tahap kedua kemiskinan di perkotaan bernilai $-1,2406$ dan *odd ratio* $0,2892$ mengandung arti apabila fasilitas kesehatan cukup tersedia di desa atau kelurahan tempat tinggal rumah tangga responden maka resiko miskin bagi rumah tangga tersebut adalah $0,29$ kali rumah tangga lainnya yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan yang sama. Pada model perdesaan variabel ini tidak menunjukkan hubungan kausal yang logis menurut teori. Perbedaan ini dapat menjadi indikator tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan di perkotaan dan perdesaan. Pada masyarakat perkotaan berobat secara modern telah menjadi kebiasaan sehingga keberadaan fasilitas kesehatan berpengaruh terhadap kebutuhan mereka untuk berobat. Hal ini didukung pula oleh kenyataan bahwa pada tahun 2006 masyarakat perdesaan yang mengalami keluhan kesehatan hanya $52,66\%$ yang menggunakan fasilitas pengobatan modern sedangkan masyarakat perkotaan mencapai $73,09\%$.

Dengan data ini maka untuk memperbaiki tingkat kesehatan pada masyarakat perdesaan tidak cukup sekedar menyediakan fasilitas kesehatan tetapi juga adalah mekanisme atau kebijakan tertentu yang dapat mendorong mereka untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

2. Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga

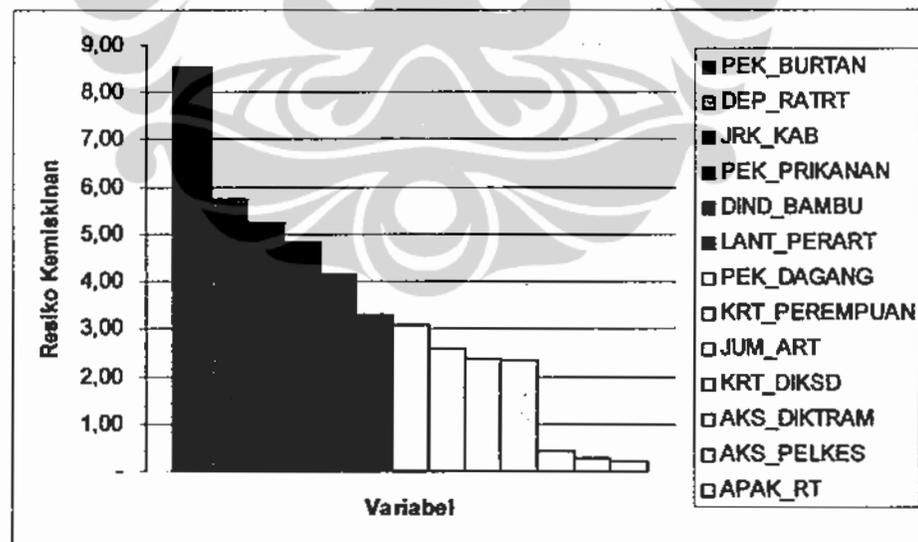
Hasil regresi menunjukkan bahwa rumah tangga dengan KRT perempuan di perkotaan memiliki resiko miskin sebesar $2,60$ kali (*odd ratio* $2,5997$) dibandingkan dengan rumah tangga dengan KRT laki-laki. Oleh karena itu jenis kelamin KRT di perkotaan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan target program penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

3. Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga

Jenis pekerjaan yang berpengaruh terhadap kemiskinan di perkotaan adalah pekerjaan pada sektor perikanan (*PEK_PRIKANAN*) dan pedagang informal (*PEK_DAGANG*).

Pekerjaan pada sektor perikanan dan pedagang informal menanggung resiko kemiskinan 4,82 kali dibandingkan dengan rumah tangga yang KRT-nya memilih jenis pekerjaan lainnya. Hal ini sangat berbeda dengan karakteristik kemiskinan di perdesaan. Bekerja sebagai pedagang di perdesaan hanya memiliki resiko kemiskinan 0,74 kali ($\alpha=0.34$) sedangkan perikanan tidak signifikan. Dengan demikian pedagang informal di perkotaan cenderung miskin tetapi cenderung tidak miskin di perdesaan. Sementara nelayan di perkotaan juga cenderung miskin sedangkan bila di perdesaan maka kecenderungan miskin atau tidak miskin berimbang.

Bila diurutkan menurut besarnya resiko kemiskinan maka resiko terbesar ditanggung oleh rumah tangga dengan KRT sebagai buruh tani (8.54 kali), disusul rumah tangga dengan rasio ketergantungan diatas 1 (5.75 kali), dan seterusnya sebagaimana Gambar 5.12.



Gambar 5. 12
Faktor Determinan Kemiskinan pada Daerah Perkotaan
di Provinsi Gorontalo Menurut Tingkatan Resiko Kemiskinan

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Gorontalo sebuah daerah kecil dengan jumlah penduduk kurang dari satu juta jiwa, tetapi memiliki nyali besar untuk berdiri sebagai provinsi sendiri atas nama kesejahteraan rakyatnya. Setelah 6 tahun meningkatkan konsentrasi dalam penyelenggaraan pembangunan, banyak hal yang kini telah menunjukkan kemajuan termasuk didalamnya penurunan tingkat kemiskinan secara akumulatif dari level 73 % sebelum berdiri sebagai provinsi menjadi 39,96% pada tahun 2006. Walaupun demikian angka kemiskinan tersebut masih cukup tinggi dan berpotensi untuk tetap menjadi masalah dalam jangka panjang dengan memperhatikan beberapa kenyataan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pergerakan tingkat kemiskinan dari tahun 2002 ke 2006 cenderung tidak berubah, sementara kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan mengalami peningkatan.
2. Tingkat kesenjangan pendapatan cukup tinggi serta distribusi perubahan tingkat kesejahteraan tidak menguntungkan penduduk miskin.
3. Karakteristik kemiskinan di Provinsi Gorontalo ditandai dengan perbedaan yang cukup tajam antara desa/kelurahan dalam kategori perdesaan dengan desa/kelurahan yang kategorikan perkotaan yang menempatkan perdesaan sebagai kontributor utama kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh tiga indikator yakni: pertama, kecenderungan menurunnya persentasi penduduk miskin di perkotaan tetapi pada daerah perdesaan justru meningkat; kedua, tingginya resiko kemiskinan bagi rumah tangga di perdesaan hingga mencapai 6,42 kali resiko kemiskinan rumah tangga di perkotaan; ketiga, adanya faktor determinan yang sangat signifikan

pada perdesaan tetapi tidak signifikan pada perkotaan, dan sebaliknya.

Disamping fakta di atas dapat disimpulkan pula faktor determinan kemiskinan di Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

a. Daerah perdesaan

1. Jarak ke ibukota kabupaten/kota, berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Semakin jauh dari ibukota Kabupaten maka resiko kemiskinan semakin tinggi.
2. Fasilitas jalan raya, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Rumah tangga yang tinggal pada desa dengan permukaan jalan terluas adalah aspal atau beton memiliki resiko miskin sebesar daripada penduduk yang tinggal di desa dengan permukaan jalan terluas bukan aspal/beton.
3. Kerawanan terhadap bencana alam, berpengaruh positif terhadap resiko kemiskinan. Rumah tangga yang tinggal pada daerah rawan bencana alam memiliki resiko miskin lebih tinggi daripada penduduk yang tinggal pada daerah yang tidak rawan.
4. Akses terhadap lembaga pendidikan keterampilan, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Mengikuti kursus berarti mengurangi resiko kemiskinan.
5. Kerawanan terhadap perkelahian massal, berpengaruh positif terhadap kemiskinan.
6. Jumlah anggota keluarga, berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Semakin banyak jumlah ART maka semakin besar kemungkinan rumah tangga menjadi miskin.
7. Rasio ketergantungan, berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Semakin besar komposisi jumlah anggota keluarga yang tidak produktif makan peluang menjadi miskin semakin meningkat.
8. Usia kepala rumah tangga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Semakin dewasa usia kepala rumah tangga maka kemungkinan miskin akan berkurang.

9. Angka partisipasi angkatan kerja, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Semakin banyak jumlah ART produktif yang masuk dalam angkatan kerja maka resiko kemiskinan akan berkurang.
10. Jenis pekerjaan KRT. Bila bekerja sebagai petani informal, buruh tani informal atau pembantu rumah tangga maka kemungkinan menjadi miskin lebih besar.
11. Akses terhadap kredit usaha, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Kredit usaha dapat menurunkan peluang menjadi miskin.
12. Karakteristik Perumahan. Jika rumah beratap rumbia, atau ber dinding bambu atau luas lantai per ART kurang dari 8 m² maka kemungkinan sangat besar untuk termasuk dalam kategori miskin.
13. Keluhan kesehatan, berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Semakin sering mengalami sakit maka semakin besar resiko menjadi miskin.
14. Pendidikan. Apabila kepala rumah tangga maksimal hanya memiliki ijazah SMP, atau lebih banyak anggota rumah tangga dewasa yang hanya meluluskan pendidikan SMP atau lebih rendah, atau semakin banyak anak usia SD dan SMP yang tidak bersekolah, maka resiko miskin semakin besar.
15. Fasilitas buang air besar. Jika menggunakan kloset selain berupa leher angsa, cemplung/cubiuk atau plengsengan maka peluang kemiskinan besar.

b. Daerah perkotaan

1. Jarak ke ibukota kabupaten/kota, berpengaruh positif terhadap kemiskinan.
2. Akses terhadap pelayanan kesehatan, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Kemudahan mencapai fasilitas pelayanan kesehatan mengurangi resiko kemiskinan.
3. Akses terhadap lembaga pendidikan keterampilan, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

4. Jumlah anggota keluarga, berpengaruh positif terhadap kemiskinan.
5. Rasio ketergantungan, berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Semakin besar komposisi jumlah anggota keluarga yang tidak produktif maka peluang menjadi miskin semakin meningkat.
6. Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga. Jika kepala rumah tangga adalah perempuan maka resiko kemiskinan lebih besar.
7. Angka partisipasi angkatan kerja, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.
8. Jenis pekerjaan KRT. Bila bekerja sebagai petani informal, bekerja pada sektor perikanan, atau sebagai pedagang informal maka kemungkinan menjadi miskin lebih besar daripada rumah tangga yang memiliki pekerjaan lainnya.
9. Karakteristik Perumahan. Jika rumah berdinding bambu atau luas lantai per ART kurang dari 8 m² maka kemungkinan sangat besar untuk termasuk dalam kategori miskin.
10. Pendidikan. Apabila kepala rumah tangga maksimal hanya memiliki ijazah SD, maka resiko miskin semakin besar.

6.2. Rekomendasi Kebijakan

Pembangunan pada dasarnya tidak hanya sekedar mengejar angka-angka agregatif yang tinggi, tetapi harus dapat mendistribusikan hasilnya secara adil untuk dinikmati oleh seluruh strata sosial ekonomi masyarakat. Semangat Otonomi Daerah perlu disikapi dan dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan kreativitas, kebijakan dan potensi lokal untuk kemaslahatan masyarakat utamanya dalam mendorong kaum lemah agar bisa berdaya dan hidup dalam kesetaraan.

Dengan tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang cukup tinggi maka dibutuhkan perhatian yang lebih serius dan pemilihan kebijakan yang tepat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan kesimpulan di atas maka direkomendasikan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara umum maka program pembangunan perlu dititikberatkan pada pengembangan infrastruktur dan perluasan lapangan usaha di perdesaan guna mendorong tumbuhnya pusat-pusat kegiatan perekonomian sebagai cikal bakal perkotaan yang baru di perdesaan.
2. Strategi penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang perlu tetap difokuskan pada pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang murah, mudah diakses, meningkatkan partisipasi, memajukan budaya dan mendorong prestasi bagi penduduk miskin, dan perbaikan struktur usia keluarga.
3. Strategi penanggulangan kemiskinan dalam jangka pendek dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan insentif petani melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang murah dan penciptaan harga komoditi pertanian yang menguntungkan petani, peningkatan aksesibilitas terhadap kredit usaha, mendorong penduduk miskin untuk memasuki dunia kerja melalui kursus keterampilan singkat khusus untuk penduduk miskin.
4. Penentuan target rumah tangga maupun individu untuk program penanggulangan kemiskinan yang bersifat sebagai bantuan langsung, dapat mempertimbangkan tingkat probabilitas miskin bagi individu atau rumah tangga tersebut berdasarkan perhitungan dengan menggunakan model kemiskinan pada masing-masing daerah (perkotaan dan perdesaan).

DAFTAR PUSTAKA

- Anker, Richard. 2007. "Poverty Lines Around The World: A New Methodology and Internationally Comparable Estimates", *International Labour Review*. Diakses 10 Agustus 2007 dari Goliath Business Knowledge on Demand. http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-6595421/Poverty-lines-around-the-world.html
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2005*. Jakarta: BPS.
- _____. 2006. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2006*. Jakarta: CV. Nario Sari.
- _____. 2006. *Statistik Kesejahteraan Rakyat (Welfare Statistics) 2005*. Jakarta: BPS Jakarta.
- _____. 2007. "Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga Produsen Gabah Dan Upah Buruh", *Berita Resmi Statistik* No. 57/11/Th. X (1 November 2007). Diakses 19 Nopember 2007 dari BPS. <http://www.bps.go.id/releases/files/ntp-01nop07.pdf>
- _____. *Angka Partisipasi Angkatan Kerja*. Diakses 4 September 2007 dari Data Statistik Indonesia. <http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/802/802/>
- _____. *Rasio Ketergantungan*. Diakses 4 September 2007 dari Data Statistik Indonesia. <http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/212/212/1/1/>
- Bedi, Tara et al. 2006. *Beyond the Numbers, Understanding the Institutions for Monitoring Poverty Reduction Strategies*. Washington D.C.: The World Bank.
- BKKBN. 2004. *Pendataan Keluarga, Selayang Pandang*. Diakses 5 Agustus 2007 dari BKKBN. http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=49
- Bourguignon, François. "The Poverty-Growth-Inequality Triangle", *Paper presented at Conference on Poverty, Inequality and Growth, in Paris* (November 13, 2003). Diakses 5 Agustus 2007 dari World bank. <http://go.worldbank.org/ZLH1L4T1Z2>
- Bradshaw, Ted K. "Theories of Poverty and Anti-Poverty Programs in Community Development", *Community Development: Journal of the Community Development Society*, Vol. 38, No. 1 (Spring 2007). The Community Development Society.
- Cahyat, Ade. "Bagaimana kemiskinan diukur? Beberapa model penghitungan kemiskinan di Indonesia", *Governance Brief*.

Number 2 (November 2004). Center for International Forestry Research.

- Foster, James, J. Greer and Eric Thorbecke. "A Class of Decomposable Poverty Measures," *Econometrica*, LII,3 (1984), dalam World Bank Institute (2005), *Introduction to Poverty Analysis*. Diakses 5 Agustus 2007 dari World Bank. <http://siteresources.worldbank.org/PGLP/Resources/PovertyManual.pdf>
- Gordon, David, et al., 2000. *Poverty and Social Exclusion in Britain*. Water End York: Joseph Rowntree Foundation.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics*. Fourth Edition, International Edition. Singapore: McGraw-Hill Higher Education.
- Hendranata, Anton. 2007. *Model Logit dan Probit, Handout Kuliah Ekonometrika Terapan MPKP FE-UI*, tidak dipublikasikan.
- Imam, Kamarul. *The Logistic Regression Model*. Diakses 27 Agustus 2007 dari Web Kuliah Universitas Jember. http://elearning.unej.ac.id/courses/MAA01/document/Regresi_Logistik.pdf
- Isidoro P. David. 2000. "Poverty Statistics and Indicators: How Often Should They Be Measured?", *United Nations Statistics Division's Electronic Documents*. Diakses 5 Agustus 2007 dari United Nations Statistics Division <http://unstats.un.org/unsd/methods/poverty/sid%20aug%202000%20povnote.pdf>
- Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2004. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta : TKPK.
- Lamberte, Exaltacion E. 2004. "Urban Poverty and Social Safety Net Program in the Philippines," *EADN Regional Project on Urban Poverty and Social Safety Net in East Asia: Final Reports*. Diakses 1 Agustus 2007 dari EADN. <http://www.eadn.org/reports/urbanweb/u04.pdf>
- Lembaga Penelitian SMERU. 2001. *Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: BKPK dan SMERU.
- Maksum, Choiril. 2004. "Official Poverty Measurement in Indonesia", Paper Presented at 2004 *International Conference on Official Poverty Statistics*. Diakses pada 6 Agustus 2007 dari NSCB Board Philippine. www.nscb.gov.ph/poverty/conference/papers/2_Indonesia.pdf
- Nachrowi , Nachrowi Djalal dan Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- _____. 2005. *Penggunaan Teknik Ekonometri*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nafziger, E. Wayne. 1997. *The Economics of Developing Countries*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- Niode, Alim S. *Gorontalo*. 2007. *Perubahan Nilai-nilai dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press.
- Pemerintah Provinsi Gorontalo. *LKPJ Gubernur Gorontalo Periode 2001-2006*.
- _____. *LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2006*.
- Pernia, Ernesto M. "Pro-poor Growth: What is It and How is It Important?" *ERD Policy Brief No. 17* (Juni 2003). Asian Development Bank
- Quantitative Micro Software. 2004. *EViews 5 User's Guide*.
- Ravallion, Martin dan Shaobua Chen. "Measuring Pro-Poor Growth", *Policy Research Working Paper No. 2666* (August 2001). The World Bank Development Research Group Poverty.
- Ravallion, Martin. "Poverty Comparisons, A Guide to Concepts and Methods", *Living Standards Measurement Study, Working Paper No. 88* (Feb. 1992). Washington D.C : The World Bank.
- _____. "Poverty Lines in Theory and Practice", *LSMS Working Paper*, Number 133 (Juli 1998). The World Bank.
- Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
- Suryahadi, Asep dan Sudarno Sumarto. "Measuring Vulnerability to Poverty in Indonesia Before and After the Economic Crisis", *Smeru Working Paper* (Mei 2001). The SMERU Research Institute.
- The Robert Gordon University. *An introduction to Social Policy*. Diakses 5 Agustus 2007 dari The Robert Gordon University. <http://www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/needf.htm>
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2005. *Kemiskinan di Indonesia: Perkembangan Data dan Informasi Mutakhir*. Jakarta: TKPK.
- Tim LPEM-FEUI. 1994. *Profil dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta.
- Todaro , Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Haris Munandar dan Puji A.L. (penerjemah). Edisi Kedelapan, Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- UN Millennium Project. 2006. *About MDGs*. Diakses 13 April 2007 dari UN Millennium Project. <http://www.unmillenniumproject.org/goals/index.htm>

- UNDP. 1997. *Human Development Report 1997*. New York: Oxford University Press
- United Nations Statistics Division. 2005. *Handbook On Poverty Statistics : Concepts, Methods And Policy Use*. Diakses 6 Agustus 2007 dari United Nations Statistics Division. http://unstats.un.org/unsd/methods/poverty/pdf/UN_Book%20FINAL%2030%20Dec%2005.pdf
- United Nations. 1995. *World Summit for Social Development Agreements, Programme of Action of the World Summit for Social Development*. Copenhagen. Diakses 5 Agustus 2007 dari United Nations. <http://www.un.org/esa/socdev/wssd/index.html>
- Usman, Abdhul Aziiz. "Identifikasi Karakteristik Rumah Tangga Miskin yang Mempengaruhi Kemiskinan di Sumatera Barat", Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, tidak dipublikasikan. Jakarta: 2006.
- Wirartha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- World Bank. 2005. *Introduction to Poverty Analysis*. Diakses 5 Agustus 2007 dari World Bank. <http://siteresources.worldbank.org/PGLP/Resources/PovertyManual.pdf>
- _____. 1990. "Poverty," *World Development Report 1990*. New York: Oxford University Press.
- _____. 2000. "Attacking Poverty," *World Development Report 2000/2001*. New York: Oxford University Press.
- _____. 2006. *Making the New Indonesia Work for the Poor*. Jakarta: The World Bank Office Jakarta
- _____. *Poverty Analysis*. Diakses 3 Agustus 2007 dari World Bank. <http://go.worldbank.org/K7LWQUT9L0>
- Zin, Ragayah Haji Mat. 2004. *Poverty Concepts and Measurements: An Overview of Theory and Practice*. Diakses 10 Agustus 2007 dari Economic Planning Unit Prime Minister's Department Malaysia <http://www.epu.jpm.my/New%20Folder/POVERTY.pdf>

LAMPIRAN 1

**OUTPUT PROGRAM STATA
PERHITUNGAN INDEKS FGT PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2002 DAN 2006**

```
-----
log: L:\MyThesis\Tesis\Complete\OlahTesisLast\FGT\HasilFGT2002&2006.log
log type: text
opened on: 11 Nov 2007, 15:10:30
-----
*
```

. * Tahun 2002;

. * 1) Desa & Kota;

. use FGT2002Res, clear;

. sepov konspkap [w=weind], p(povline);
(sampling weights assumed)

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

Survey mean estimation

pweight: weind	Number of obs =	7840
Strata: <one>	Number of strata =	1
PSU: <observations>	Number of PSUs =	7840
	Population size =	855057

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]	Deff
p0	.4096873	.0064752	.3969942 .4223805	1.359047
p1	.0850181	.0018211	.0814482 .088588	1.437827
p2	.0253098	.0007383	.0238625 .0267571	1.458162

. tab MISKIN [w=weind];
(frequency weights assumed)

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	504,751	59.03	59.03
1	350,306	40.97	100.00
Total	855,057	100.00	

. clear;

. * 2) Desa;

. use FGT2002Res, clear;
. keep if blr5=="2";
(2865 observations deleted)

. sepov konspkap [w=weind], p(povline);

(sampling weights assumed)

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

Survey mean estimation

pweight: weind	Number of obs =	4975
Strata: <one>	Number of strata =	1
PSU: <observations>	Number of PSUs =	4975
	Population size =	624306

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]	Deff
p0	.4735274	.0080144	.4578156 .4892392	1.281531
p1	.1002685	.0023368	.0956872 .1048497	1.33914
p2	.0303371	.0009653	.0284448 .0322295	1.352685

```
. tab MISKIN (w=weind);
(frequency weights assumed)
```

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	328,680	52.65	52.65
1	295,626	47.35	100.00
Total	624,306	100.00	

```
. clear;
```

```
. * 3) Kota;
. use FGT2002Res, clear;
```

```
. keep if blr5=="1";
(4975 observations deleted)
```

```
. sepov konspkap (w=weind), p(povline);
(sampling weights assumed)
```

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

```
Survey mean estimation
pweight: weind          Number of obs = 2865
Strata: <one>           Number of strata = 1
PSU: <observations>    Number of PSUs = 2865
                          Population size = 230751
```

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]	Deff
p0	.2369654	.00912	.2190829 .2548478	1.317451
p1	.0437575	.0020297	.0397777 .0477374	1.2048
p2	.0117081	.0007017	.0103323 .013084	1.055367

```
. tab MISKIN (w=weind);
(frequency weights assumed)
```

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	176,071	76.30	76.30
1	54,680	23.70	100.00
Total	230,751	100.00	

```
. clear;
```

```
. * 4) Kabupaten Boalemo;
. use FGT2002Res, clear;
```

```
. keep if blr2=="1";
(6432 observations deleted)
```

```
. sepov konspkap (w=weind), p(povline);
(sampling weights assumed)
```

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

```
Survey mean estimation
pweight: weind          Number of obs = 1408
Strata: <one>           Number of strata = 1
PSU: <observations>    Number of PSUs = 1408
                          Population size = 98659
```

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]	Deff
p0	.4770979	.0133163	.450976 .5032197	1.00007
p1	.1027155	.0039305	.0950052 .1104257	.9991884
p2	.0323046	.0017207	.0289291 .0356801	.9985671

```
. tab MISKIN [w=weind];
(frequency weights assumed)
```

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	51,589	52.29	52.29
1	47,070	47.71	100.00
Total	98,659	100.00	

```
. clear;
```

```
. * 5) Kabupaten Gorontalo;
. use FGT2002Res, clear;
```

```
. keep if blr2==2;
(6053 observations deleted)
```

```
. sepov konspkap [w=weind], p(povline);
(sampling weights assumed)
```

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

Survey mean estimation

pweight: weind Number of obs = 1787
 Strata: <one> Number of strata = 1
 PSU: <observations> Number of PSUs = 1787
 Population size = 336648

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]	Deff
p0	.4523805	.0118683	.4291033 .4756577	1.015488
p1	.0922931	.0032759	.085868 .0987182	1.040201
p2	.0269443	.0013819	.024234 .0296546	1.056374

```
. tab MISKIN [w=weind];
(frequency weights assumed)
```

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	184,355	54.76	54.76
1	152,293	45.24	100.00
Total	336,648	100.00	

```
. clear;
```

```
. * 6) Kabupaten Pohuwato;
. use FGT2002Res, clear;
```

```
. keep if blr2==3;
(6508 observations deleted)
```

```
. sepov konspkap [w=weind], p(povline);
(sampling weights assumed)
```

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

Survey mean estimation

pweight: weind Number of obs = 1332
 Strata: <one> Number of strata = 1
 PSU: <observations> Number of PSUs = 1332
 Population size = 92251

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]	Deff
p0	.3677033	.0132099	.3417888 .3936179	.998991
p1	.0572174	.002759	.0518049 .0626299	.9978286
p2	.0134277	.0008509	.0117584 .0150969	.9971944

```
. tab MISKIN [w=weind];
(frequency weights assumed)
```

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	58,330	63.23	63.23
1	33,921	36.77	100.00
Total	92,251	100.00	

```
. clear;
```

```
. * 7) Kabupaten Bone Bolango;
. use FGT2002Res, clear;
```

```
. keep if blr2==4;
(7239 observations deleted)
```

```
. sepov konspkap [w=weind], p(povline);
(sampling weights assumed)
```

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

Survey mean estimation

pweight: weind	Number of obs =	601
Strata: <one>	Number of strata =	1
PSU: <observations>	Number of PSUs =	601
	Population size =	115715

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]		Deff
p0	.4142073	.0202846	.3743699	.4540447	1.017471
p1	.0950079	.0059587	.0833053	.1067104	1.021632
p2	.0298793	.0023326	.0252983	.0344603	1.020778

```
. tab MISKIN [w=weind];
(frequency weights assumed)
```

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	67,785	58.58	58.58
1	47,930	41.42	100.00
Total	115,715	100.00	

```
. clear;
```

```
. * 8) Kabupaten Gorontalo Utara;
. use FGT2002Res, clear;
```

```
. keep if blr2==5;
(7473 observations deleted)
```

```
. sepov konspkap [w=weind], p(povline);
(sampling weights assumed)
```

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

Survey mean estimation

pweight: weind	Number of obs =	367
Strata: <one>	Number of strata =	1
PSU: <observations>	Number of PSUs =	367
	Population size =	74134

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]		Deff
p0	.6158038	.0254248	.5658068	.6658008	1
p1	.1488971	.007969	.1332264	.1645678	1
p2	.0454129	.0030865	.0393434	.0514824	1

```
. tab MISKIN [w=weind];
(frequency weights assumed)
```

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	28,482	38.42	38.42
1	45,652	61.58	100.00
Total	74,134	100.00	

```
. clear;
```

```
. * 9) Kota Gorontalo;
. use FGT2002Res, clear;
```

```
. keep if blr2==71;
(5495 observations deleted)
```

```
. sepov konspkap [w=weind], p(povline);
(sampling weights assumed)
```

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

Survey mean estimation

pweight: weind	Number of obs =	2345
Strata: <one>	Number of strata =	1
PSU: <observations>	Number of PSUs =	2345
	Population size =	137650

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]		Deff
p0	.170287	.0077589	.155072	.1855019	.9987261
p1	.0303719	.0019242	.0265986	.0341453	1.000887
p2	.0095939	.0007971	.0080308	.0111569	1.002685

```
. tab MISKIN [w=weind];
(frequency weights assumed)
```

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	114,210	82.97	82.97
1	23,440	17.03	100.00
Total	137,650	100.00	

```
. clear;
```

```
. * Tahun 2006;
```

```
. * 1) Desa & Kota;
. use FGT2006Res, clear;
```

```
. sepov konspkap [w=weind], p(povline);
(sampling weights assumed)
```

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

Survey mean estimation

pweight: weind	Number of obs =	12651
Strata: <one>	Number of strata =	1
PSU: <observations>	Number of PSUs =	12651
	Population size =	941398

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]		Deff
p0	.3995526	.0051208	.3895151	.4095901	1.382652
p1	.0999824	.0016328	.0967819	.1031828	1.364822
p2	.0347059	.0007533	.0332294	.0361825	1.346633

```
. tab MISKIN [w=weind];
(frequency weights assumed)
```

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	565,260	60.04	60.04
1	376,138	39.96	100.00
Total	941,398	100.00	

```
. clear;
```

```
. * 2) Desa;
. use FGT2006Res, clear;
```

```
. keep if blr5==2;
(3015 observations deleted)
```

```
. sepov konspkap [w=weind], p(povline);
(sampling weights assumed)
```

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

Survey mean estimation

```
pweight: weind          Number of obs = 9636
Strata: <one>           Number of strata = 1
PSU: <observations>    Number of PSUs = 9636
                        Population size = 693840
```

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]	Deff
p0	.5186988	.0059943	.5069488 .5304489	1.386743
p1	.1312151	.0020355	.127225 .1352052	1.386214
p2	.0460166	.0009775	.0441005 .0479327	1.381035

```
. tab MISKIN [w=weind];
(frequency weights assumed)
```

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	333,946	48.13	48.13
1	359,894	51.87	100.00
Total	693,840	100.00	

```
. clear;
```

```
. * 3) Kota;
. use FGT2006Res, clear;
```

```
. keep if blr5==1;
(9636 observations deleted)
```

```
. sepov konspkap [w=weind], p(povline);
(sampling weights assumed)
```

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

Survey mean estimation

```
pweight: weind          Number of obs = 3015
Strata: <one>           Number of strata = 1
PSU: <observations>    Number of PSUs = 3015
                        Population size = 247558
```

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]	Deff
p0	.0656169	.005951	.0539485 .0772854	1.740937
p1	.0124451	.0013239	.0098493 .0150409	1.853383
p2	.0030051	.0003665	.0022865 .0037236	1.81869

```
. tab MISKIN [w=weind];
(frequency weights assumed)
```

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	231,314	93.44	93.44
1	16,244	6.56	100.00
Total	247,558	100.00	

```
. clear;
```

```
. * 4) Kabupaten Boalemo;
. use FGT2006Res, clear;
```

```
. keep if blr2==01;
(10153 observations deleted)
```

```
. sepov konspkap [w=weind], p(povline);
(sampling weights assumed)
```

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

Survey mean estimation

```
pweight: weind          Number of obs   =    2498
Strata:  <one>          Number of strata =     1
PSU:    <observations> Number of PSUs   =    2498
                          Population size   =  118082
```

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]	Deff
p0	.5352213	.0099877	.5156363 .5548062	1.001305
p1	.1484912	.003632	.1413691 .1556132	.9983976
p2	.0550416	.0018482	.0514175 .0586658	.9964885

```
. tab MISKIN [w=weind];
(frequency weights assumed)
```

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	54,882	46.48	46.48
1	63,200	53.52	100.00
Total	118,082	100.00	

```
. clear;
```

```
. * 5) Kabupaten Gorontalo;
. use FGT2006Res, clear;
```

```
. keep if blr2==02;
(10601 observations deleted)
```

```
. sepov konspkap [w=weind], p(povline);
(sampling weights assumed)
```

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

Survey mean estimation

```
pweight: weind          Number of obs   =    2050
Strata:  <one>          Number of strata =     1
PSU:    <observations> Number of PSUs   =    2050
                          Population size   =  331796
```

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]	Deff
p0	.3788683	.0106852	.3579134 .3998233	.9941086
p1	.1016968	.0035733	.0946891 .1087046	.9733353
p2	.0372222	.0017124	.033864 .0405804	.9599811

```
. tab MISKIN [w=weind];
(frequency weights assumed)
```

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	206,089	62.11	62.11
1	125,707	37.89	100.00
Total	331,796	100.00	

```
. clear;
```

```
. * 6) Kabupaten Pohuwato;
```

```
. use FGT2006Res, clear;
```

```
. keep if blr2==03;
(10097 observations deleted)
```

```
. sepov konspkap [w=weind], p(povline);
(sampling weights assumed)
```

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

Survey mean estimation

```
pweight: weind      Number of obs   =   2554
Strata:  <one>      Number of strata =    1
PSU:     <observations> Number of PSUs   =  2554
                          Population size = 109822
```

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]	Deff
p0	.4428348	.0098308	.4235577 .4621119	1
p1	.1035692	.0031388	.0974143 .1097241	1
p2	.0358797	.0014362	.0330634 .038696	1

```
. tab MISKIN [w=weind];
(frequency weights assumed)
```

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	61,189	55.72	55.72
1	48,633	44.28	100.00
Total	109,822	100.00	

```
. clear;
```

```
. * 7) Kabupaten Bone Bolango;
```

```
. use FGT2006Res, clear;
```

```
. keep if blr2==04;
(10173 observations deleted)
```

```
. sepov konspkap [w=weind], p(povline);
(sampling weights assumed)
```

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

Survey mean estimation

```
pweight: weind      Number of obs   =   2478
Strata:  <one>      Number of strata =    1
PSU:     <observations> Number of PSUs   =  2478
                          Population size = 126956
```

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]	Deff
p0	.4754246	.0100334	.4557499 .4950992	.9998378
p1	.1161129	.003258	.1097242 .1225016	.9978232
p2	.0398317	.0015305	.0368306 .0428329	.9967467

```
. tab MISKIN [w=weind];
(frequency weights assumed)
```

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	66,598	52.46	52.46
1	60,358	47.54	100.00
Total	126,956	100.00	

```
. clear;
```

```
. * 8) Kabupaten Gorontalo Utara;
. use FGT2006Res, clear;
```

```
. keep if blr2==05;
(12021 observations deleted)
```

```
. sepov konspkap [w=weind], p(povline);
(sampling weights assumed)
```

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

Survey mean estimation

```
pweight: weind          Number of obs = 630
Strata: <one>           Number of strata = 1
PSU: <observations>   Number of PSUs = 630
                        Population size = 96390
```

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]	Deff
p0	.7492063	.0172836	.7152658 .7831468	1
p1	.1622869	.0057424	.1510103 .1735635	1
p2	.0470785	.0023798	.0424051 .0517518	1

```
. tab MISKIN [w=weind];
(frequency weights assumed)
```

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	24,174	25.08	25.08
1	72,216	74.92	100.00
Total	96,390	100.00	

```
. clear;
```

```
. * 9) Kota Gorontalo;
. use FGT2006Res, clear;
```

```
. keep if blr2==71;
(10210 observations deleted)
```

```
. sepov konspkap [w=weind], p(povline);
(sampling weights assumed)
```

Poverty measures for the variable konspkap: (unlabeled)

Survey mean estimation

```
pweight: weind          Number of obs = 2441
Strata: <one>           Number of strata = 1
PSU: <observations>   Number of PSUs = 2441
                        Population size = 158352
```

Mean	Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]	Deff
p0	.0380418	.003802	.0305863 .0454974	.9638329
p1	.0068721	.0008284	.0052476 .0084966	.9475344
p2	.0018145	.0002658	.0012934 .0023357	.9284607

```
. tab MISKIN [w=weind];  
(frequency weights assumed)
```

MISKIN	Freq.	Percent	Cum.
0	152,328	96.20	96.20
1	6,024	3.80	100.00
Total	158,352	100.00	

```
. clear;
```

```
. log close;
```

```
log: L:\MyThesis\Tesis\Complete\OlahTesisLast\FGT\HasilFGT2002&2006.log
```

```
log type: text
```

```
closed on: 11 Nov 2007, 15:10:40
```



LAMPIRAN 2

**OUTPUT PROGRAM STATA
PERHITUNGAN KOEFISIEN GINI PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2002, 2005 DAN 2006**

```
-----
log: L:\MyThesis\Tesis\Complete\OlahTesisLast\GiniIndex.log
log type: text
opened on: 11 Nov 2007, 16:03:34
-----
```

*** Index Gini & Ukuran Inequality Lainnya Tahun 2002;**

```
. inequal konspkap [w=weind];
(frequency weights assumed)
```

inequality measures of konspkap

```
-----
relative mean deviation .19857492
coefficient of variation .60505074
standard deviation of logs .46566785
Gini coefficient .27493695
Mehran measure .36572507
Piesch measure .22954287
Kakwani measure .06907827
Theil entropy measure .13524299
Theil mean log deviation measure .12076761
-----
```

```
. ineqerr konspkap [w=weind], reps(1);
(analytic weights assumed)
```

konspkap ----- (unlabeled)
(obs=7840)

Bootstrap statistics

Variable	Reps	Observed	Bias	Std. Err.	[95% Conf. Interval]
Gini	1	.2749474	.0000567	.	. (N)
					.2750041 .2750041 (P)
					. (BC)
Theil	1	.135243	-.0008601	.	. (N)
					.1343829 .1343829 (P)
					. (BC)
Varlogs	1	.2168463	.0011903	.	. (N)
					.2180366 .2180366 (P)
					. (BC)

N = normal, P = percentile, BC = bias-corrected

*** Index Gini & Ukuran Inequality Lainnya Tahun 2005;**

```
. inequal konspkap [w=weind];
(frequency weights assumed)
```

inequality measures of konspkap

```
-----
relative mean deviation .25992299
coefficient of variation .98488085
standard deviation of logs .58715237
Gini coefficient .36041689
Mehran measure .45857946
Piesch measure .31133564
Kakwani measure .11721101
Theil entropy measure .26487376
Theil mean log deviation measure .21252941
-----
```

. ineqerr konspkap [w=weind], reps(1);
(analytic weights assumed)

konspkap ----- (unlabeled)
(obs=10640)

Bootstrap statistics

Variable	Reps	Observed	Bias	Std. Err.	[95% Conf. Interval]
Gini	1	.3604176	-.0048433	.	. (N) .3555743 .3555743 (P) . (BC)
Theil	1	.2648738	-.0118297	.	. (N) .2530441 .2530441 (P) . (BC)
Varlogs	1	.3447475	-.0049893	.	. (N) .3397583 .3397583 (P) . (BC)

N = normal, P = percentile, BC = bias-corrected

* Index Gini & Ukuran Inequality Lainnya Tahun 2006;

* Desa dan Kota;

. inequal konspkap [w=weind];
(frequency weights assumed)

inequality measures of konspkap

relative mean deviation	.22853602
coefficient of variation	.74302827
standard deviation of logs	.53306525
Gini coefficient	.31644664
Mehran measure	.41444631
Piesch measure	.26744681
Kakwani measure	.09035016
Theil entropy measure	.18392667
Theil mean log deviation measure	.16114711

. ineqerr konspkap [w=weind], reps(1);
(analytic weights assumed)

konspkap ----- (unlabeled)
(obs=12651)

Bootstrap statistics

Variable	Reps	Observed	Bias	Std. Err.	[95% Conf. Interval]
Gini	1	.3164499	.0046275	.	. (N) .3210774 .3210774 (P) . (BC)
Theil	1	.1839267	.0042654	.	. (N) .1881921 .1881921 (P) . (BC)
Varlogs	1	.2841583	.0095416	.	. (N) .2936999 .2936999 (P) . (BC)

N = normal, P = percentile, BC = bias-corrected

. * Desa;

. drop if blr5==1;
(3015 observations deleted)

. inequal konspkap [w=weind];
(frequency weights assumed)

inequality measures of konspkap

```
-----  
relative mean deviation      .20710096  
coefficient of variation     .74365018  
standard deviation of logs   .48379605  
Gini coefficient             .28872242  
Mehran measure              .37833541  
Piesch measure              .24391593  
Kakwani measure             .07726743  
Theil entropy measure       .16235728  
Theil mean log deviation measure .13615999  
-----
```

. ineqerr konspkap [w=weind], reps(1);
(analytic weights assumed)

konspkap ----- (unlabeled)
(obs=9636)

Bootstrap statistics

Variable	Reps	Observed	Bias	Std. Err.	[95% Conf. Interval]
Gini	1	.2887253	-.001175	.	. (N)
					.2875503 .2875503 (P)
					. (BC)
Theil	1	.1623573	.0015836	.	. (N)
					.1639409 .1639409 (P)
					. (BC)
Varlogs	1	.2340583	-.002806	.	. (N)
					.2312522 .2312522 (P)
					. (BC)

N = normal, P = percentile, BC = bias-corrected

. * Kota;

. drop if blr5==2;
(9636 observations deleted)

. inequal konspkap [w=weind];
(frequency weights assumed)

inequality measures of konspkap

```
-----  
relative mean deviation      .21625365  
coefficient of variation     .62419228  
standard deviation of logs   .51588519  
Gini coefficient             .29915917  
Mehran measure              .39892221  
Piesch measure              .24927767  
Kakwani measure             .08051005  
Theil entropy measure       .15451725  
Theil mean log deviation measure .14363424  
-----
```

```
. ineqerr konspkap [w=weind], reps(1);  
(analytic weights assumed)
```

```
konspkap ----- (unlabeled)  
(obs=3015)
```

Bootstrap statistics

Variable	Reps	Observed	Bias	Std. Err.	[95% Conf. Interval]		
Gini	1	.2991884	.0059669	.	.	(N)	
					.3051553	.3051553	(P)
					.	.	(BC)
Theil	1	.1545172	.0049739	.	.	(N)	
					.1594912	.1594912	(P)
					.	.	(BC)
Varlogs	1	.2661364	.0128178	.	.	(N)	
					.2789542	.2789542	(P)
					.	.	(BC)

N = normal, P = percentile, BC = bias-corrected

```
. log close;  
  log: L:\MyThesis\Tesis\Complete\OlahTesisLast\GiniIndex.log  
  log type: text  
  closed on: 11 Nov 2007, 16:03:40
```

LAMPIRAN 3

**OUTPUT EVIEWS MODEL LOGIT KEMISKINAN
GABUNGAN DAERAH PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI PROVINSI GORONTALO
(MODEL I, VARIABEL YANG LOGIS)**

Dependent Variable: MISKIN

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 11/28/07 Time: 20:27

Sample: 1 3356

Convergence achieved after 7 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-1.227847	1.864398	-0.658576	0.5102
JRK_KAB	1.128955	0.623320	1.811197	0.0701
FAS_JALAS	-1.444573	1.233965	-1.170675	0.2417
AKS_PELKES	-1.317469	0.654244	-2.013726	0.0440
JRK_SEKOLAH	0.241408	0.475842	0.507327	0.6119
AKS_DIKTRAM	-0.619531	0.624942	-0.991341	0.3215
JUM_ART	0.870264	0.603311	1.442480	0.1492
DEP_RATRT	1.813729	0.471519	3.846567	0.0001
KRT_PEREMPUAN	0.911886	0.587505	1.552133	0.1206
APAK_RT	-1.605560	0.819049	-1.960273	0.0500
PEK_PETANI	0.406797	1.050727	0.387158	0.6986
PEK_BURTAN	2.388517	0.792181	3.015115	0.0026
PEK_PRIKANAN	1.404094	0.722720	1.942791	0.0520
PEK_DAGANG	1.365501	0.635905	2.147333	0.0318
AKS_KREDUS	-0.921013	1.095135	-0.841004	0.4003
ATAP_RUMBIA	0.479761	0.734052	0.653580	0.5134
DIND_BAMBU	1.226600	0.546029	2.246401	0.0247
LANT_PERART	0.974815	0.483134	2.017693	0.0436
KRT_DIKSD	1.181010	0.691312	1.708360	0.0876
KRT_DIKSMP	0.853188	0.862349	0.989377	0.3225
APM_SMPRT	-0.539957	0.762794	-0.707867	0.4790
AIR_BERS	-0.478625	0.645303	-0.741706	0.4583
TRA_GRYONG	-0.652411	0.582842	-1.119361	0.2630
Mean dependent var	0.040441	S.D. dependent var	0.197112	
S.E. of regression	0.172926	Akaike info criterion	0.279774	
Sum squared resid	23.71353	Schwarz criterion	0.412374	
Log likelihood	-91.14774	Hannan-Quinn criter.	0.330665	
Restr. log likelihood	-138.1845	Avg. log likelihood	-0.111701	
LR statistic (22 df)	94.07345	McFadden R-squared	0.340391	
Probability(LR stat)	6.88E-11			
Obs with Dep=0	783	Total obs	816	
Obs with Dep=1	33			

LAMPIRAN 4

**OUTPUT EIEWS MODEL LOGIT KEMISKINAN
DAERAH PERDESAAN DI PROVINSI GORONTALO
(MODEL I, VARIABEL YANG LOGIS)**

Dependent Variable: MISKIN
 Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)
 Date: 11/28/07 Time: 20:26
 Sample: 1 2540
 Included observations: 2540
 Convergence achieved after 4 iterations
 Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.034925	0.466995	0.074786	0.9404
JRK_KAB	0.479898	0.127720	3.757419	0.0002
RAW_BCANA	0.124444	0.101660	1.224119	0.2209
FAS_JALAS	-0.079308	0.109626	-0.723445	0.4694
AKS_KOM	-0.253780	0.116053	-2.186760	0.0288
JRK_SEKOLAH	0.036557	0.101618	0.359747	0.7190
AKS_DIKTRAM	-0.403260	0.225295	-1.789920	0.0735
RAW_RUSUH	0.326505	0.358742	0.910137	0.3628
JUM_ART	0.925688	0.173316	5.341042	0.0000
DEP_RATRT	0.572565	0.135025	4.240442	0.0000
KRT_USMUDA	0.390198	0.102457	3.808399	0.0001
KRT_PEREMPUAN	-0.115714	0.179570	-0.644396	0.5193
APAK_RT	-1.082420	0.189659	-5.707179	0.0000
PEK_PETANI	0.534709	0.117760	4.540673	0.0000
PEK_BURTAN	0.502508	0.160352	3.133783	0.0017
PEK_PETERNAK	-0.496500	1.318474	-0.376571	0.7065
PEK_HUTAN	0.096561	0.732597	0.131807	0.8951
PEK_PRIKANAN	-0.098157	0.228539	-0.429496	0.6676
PEK_DAGANG	-0.287986	0.319972	-0.900035	0.3681
PEK_PEMBRT	0.616437	0.439831	1.401532	0.1611
PEK_BURKAS	0.225498	0.840868	0.268173	0.7886
AKS_KREDUS	-0.392696	0.261761	-1.500209	0.1336
ATAP_RUMBIA	0.408301	0.125672	3.248956	0.0012
DIND_BAMBU	0.539679	0.130383	4.139176	0.0000
LANT_PERART	0.918281	0.107769	8.520836	0.0000
GANG_KES	0.242025	0.097494	2.482451	0.0130
KRT_DIKSD	0.653552	0.250910	2.604721	0.0092
KRT_DIKSMP	0.592553	0.275408	2.151542	0.0314
RAS_DIKDAS	-0.329406	0.299677	-1.099204	0.2717
APM_SDRT	-1.117279	0.305894	-3.652506	0.0003
APM_SMPRT	-0.517187	0.166836	-3.099979	0.0019
FAS_KLOSET	-0.235619	0.103645	-2.273323	0.0230

Mean dependent var	0.435827	S.D. dependent var	0.495962
S.E. of regression	0.427487	Akaike info criterion	1.102430
Sum squared resid	458.3253	Schwarz criterion	1.176004
Log likelihood	-1368.086	Hannan-Quinn criter.	1.129119
Restr. log likelihood	-1739.616	Avg. log likelihood	-0.538617
LR statistic (31 df)	743.0583	McFadden R-squared	0.213570
Probability(LR stat)	0.000000		

Obs with Dep=0	1433	Total obs	2540
Obs with Dep=1	1107		



LAMPIRAN 5

**OUTPUT EVIEWS MODEL LOGIT KEMISKINAN
DAERAH PERKOTAAN DI PROVINSI GORONTALO
(MODEL I, VARIABEL YANG LOGIS)**

Dependent Variable: MISKIN
 Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)
 Date: 11/28/07 Time: 20:25
 Sample: 1 816
 Included observations: 816
 Convergence achieved after 7 iterations
 Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-1.126120	1.962283	-0.573882	0.5660
JRK_KAB	1.099135	0.629562	1.745871	0.0808
FAS_JALAS	-1.455993	1.235404	-1.178556	0.2386
AKS_PELKES	-1.258077	0.663016	-1.897506	0.0578
JRK_SEKOLAH	0.167535	0.482127	0.347492	0.7282
AKS_DIKTRAM	-0.577624	0.627341	-0.920750	0.3572
JUM_ART	0.727049	0.617417	1.177566	0.2390
DEP_RATRT	1.916409	0.487468	3.931354	0.0001
KRT_USMUDA	-0.497799	0.492959	-1.009820	0.3126
KRT_PEREMPUAN	0.885368	0.602929	1.468445	0.1420
APAK_RT	-1.663035	0.946066	-1.757842	0.0788
PEK_PETANI	0.416412	1.042331	0.399501	0.6895
PEK_BURTAN	2.477291	0.806483	3.071722	0.0021
PEK_PRIKANAN	1.532212	0.744687	2.057527	0.0396
PEK_DAGANG	1.401674	0.640528	2.188308	0.0286
JUM_JAMKER	-0.256789	0.707610	-0.362896	0.7167
AKS_KREDUS	-1.008176	1.105031	-0.912351	0.3616
ATAP_RUMBIA	0.553675	0.740473	0.747731	0.4546
DIND_BAMBU	1.249524	0.545203	2.291852	0.0219
LANT_PERART	1.007914	0.490238	2.055970	0.0398
KRT_DIKSD	1.205036	0.699596	1.722473	0.0850
KRT_DIKSMP	0.892155	0.877896	1.016243	0.3095
APM_SMPRT	-0.477807	0.781813	-0.611152	0.5411
AIR_BERS	-0.417443	0.652737	-0.639527	0.5225
TRA_GRYONG	-0.712342	0.589105	-1.209194	0.2266
Mean dependent var	0.040441	S.D. dependent var	0.197112	
S.E. of regression	0.172021	Akaike info criterion	0.283226	
Sum squared resid	23.40661	Schwarz criterion	0.427357	
Log likelihood	-90.55638	Hannan-Quinn criter.	0.338543	
Restr. log likelihood	-138.1845	Avg. log likelihood	-0.110976	
LR statistic (24 df)	95.25617	McFadden R-squared	0.344670	
Probability(LR stat)	1.91E-10			
Obs with Dep=0	783	Total obs	816	
Obs with Dep=1	33			

LAMPIRAN 6

**OUTPUT EVIEWS MODEL LOGIT KEMISKINAN
GABUNGAN DAERAH PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI PROVINSI GORONTALO
(MODEL II, TARAF NYATA (α) = 0,2)**

Dependent Variable: MISKIN

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 11/28/07 Time: 20:27

Sample: 1 3356

Included observations: 3356

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-2.164338	0.453931	-4.767986	0.0000
DES_KOT	1.848372	0.211368	8.744813	0.0000
JRK_KAB	0.607454	0.113327	5.360170	0.0000
FAS_JALAS	-0.137809	0.104148	-1.323206	0.1858
AKS_DIKTRAM	-0.444817	0.201413	-2.208478	0.0272
RAW_RUSUH	0.576681	0.346554	1.664041	0.0961
JUM_ART	0.902135	0.162170	5.562884	0.0000
DEP_RATRT	0.664470	0.128839	5.157379	0.0000
KRT_USMUDA	0.359714	0.097788	3.678508	0.0002
APAK_RT	-1.097646	0.181691	-6.041274	0.0000
PEK_PETANI	0.570133	0.105190	5.420026	0.0000
PEK_BURTAN	0.531098	0.149864	3.543864	0.0004
AKS_KREDUS	-0.449320	0.249087	-1.803863	0.0713
ATAP_RUMBIA	0.402749	0.122646	3.283830	0.0010
DIND_BAMBU	0.577669	0.125261	4.611727	0.0000
LANT_PERART	0.923645	0.103048	8.963292	0.0000
GANG_KES	0.172260	0.093972	1.833096	0.0668
KRT_DIKSD	0.653450	0.240454	2.717568	0.0066
KRT_DIKSMP	0.572816	0.263029	2.177765	0.0294
RAS_DIKDAS	-0.400795	0.286902	-1.396974	0.1624
APM_SDRT	-0.928361	0.275459	-3.370233	0.0008
APM_SMPRT	-0.489199	0.160928	-3.039855	0.0024
FAS_KLOSET	-0.261454	0.099659	-2.623489	0.0087
Mean dependent var	0.339690	S.D. dependent var	0.473675	
S.E. of regression	0.382666	Akaike info criterion	0.897765	
Sum squared resid	488.0630	Schwarz criterion	0.939697	
Log likelihood	-1483.449	Hannan-Quinn criter.	0.912762	
Restr. log likelihood	-2150.625	Avg. log likelihood	-0.442029	
LR statistic (22 df)	1334.350	McFadden R-squared	0.310224	
Probability(LR stat)	0.000000			
Obs with Dep=0	2216	Total obs	3356	
Obs with Dep=1	1140			

LAMPIRAN 7

**OUTPUT EVIEWS MODEL LOGIT KEMISKINAN
DAERAH PERDESAAN DI PROVINSI GORONTALO
(MODEL II, TARAF NYATA (α) = 0,2)**

Dependent Variable: MISKIN

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 11/28/07 Time: 20:26

Sample: 1 2540

Included observations: 2540

Convergence achieved after 4 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.176834	0.447925	-0.394786	0.6930
JRK_KAB	0.584175	0.117180	4.985277	0.0000
RAW_BCANA	0.127567	0.101150	1.261172	0.2072
FAS_JALAS	-0.141344	0.104609	-1.351167	0.1766
AKS_DIKTRAM	-0.340017	0.222405	-1.528820	0.1263
RAW_RUSUH	0.475696	0.349104	1.362621	0.1730
JUM_ART	0.941551	0.172007	5.473927	0.0000
DEP_RATRT	0.561619	0.134067	4.189095	0.0000
KRT_USMUDA	0.402014	0.100848	3.986317	0.0001
APAK_RT	-1.091628	0.187611	-5.818575	0.0000
PEK_PETANI	0.601474	0.107250	5.608141	0.0000
PEK_BURTAN	0.528637	0.153451	3.444991	0.0006
PEK_PEMBRT	0.584552	0.426983	1.369027	0.1710
AKS_KREDUS	-0.396113	0.260297	-1.521773	0.1281
ATAP_RUMBIA	0.392041	0.124975	3.136960	0.0017
DIND_BAMBU	0.544526	0.129497	4.204934	0.0000
LANT_PERART	0.941178	0.106606	8.828604	0.0000
GANG_KES	0.225417	0.096819	2.328224	0.0199
KRT_DIKSD	0.614306	0.249625	2.460917	0.0139
KRT_DIKSMP	0.558558	0.274265	2.036562	0.0417
RAS_DIKDAS	-0.385130	0.297261	-1.295596	0.1951
APM_SDRT	-1.128536	0.305274	-3.696797	0.0002
APM_SMPRT	-0.497438	0.166264	-2.991856	0.0028
FAS_KLOSET	-0.238936	0.103199	-2.315291	0.0206
Mean dependent var	0.435827	S.D. dependent var	0.495962	
S.E. of regression	0.427246	Akaike info criterion	1.098794	
Sum squared resid	459.2691	Schwarz criterion	1.153974	
Log likelihood	-1371.468	Hannan-Quinn criter.	1.118811	
Restr. log likelihood	-1739.616	Avg. log likelihood	-0.539948	
LR statistic (23 df)	736.2943	McFadden R-squared	0.211626	
Probability(LR stat)	0.000000			
Obs with Dep=0	1433	Total obs	2540	
Obs with Dep=1	1107			

LAMPIRAN 8

**OUTPUT EVIEWS MODEL LOGIT KEMISKINAN
DERAH PERKOTAAN DI PROVINSI GORONTALO
(MODEL II, TARAF NYATA (α) = 0,2)**

Dependent Variable: MISKIN
 Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)
 Date: 11/28/07 Time: 20:25
 Sample: 1 816
 Included observations: 816
 Convergence achieved after 6 iterations
 Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-3.834870	0.796046	-4.817395	0.0000
JRK_KAB	1.655910	0.523216	3.164869	0.0016
AKS_PELKES	-1.240554	0.634638	-1.954744	0.0506
AKS_DIKTRAM	-0.840391	0.588683	-1.427579	0.1534
JUM_ART	0.860256	0.560966	1.533526	0.1251
DEP_RATRT	1.748946	0.454739	3.846044	0.0001
KRT_PEREMPUAN	0.955394	0.574232	1.663777	0.0962
APAK_RT	-1.474263	0.778270	-1.894281	0.0582
PEK_BURTAN	2.145016	0.747000	2.871508	0.0041
PEK_PRIKANAN	1.573353	0.641723	2.451762	0.0142
PEK_DAGANG	1.127214	0.604169	1.865725	0.0621
DIND_BAMBU	1.418577	0.481943	2.943453	0.0032
LANT_PERART	1.187548	0.457985	2.592982	0.0095
KRT_DIKSD	0.856575	0.511623	1.674232	0.0941
Mean dependent var	0.040441	S.D. dependent var	0.197112	
S.E. of regression	0.175161	Akaike info criterion	0.264900	
Sum squared resid	24.60648	Schwarz criterion	0.345613	
Log likelihood	-94.07939	Hannan-Quinn criter.	0.295878	
Restr. log likelihood	-138.1845	Avg. log likelihood	-0.115293	
LR statistic (13 df)	88.21014	McFadden R-squared	0.319175	
Probability(LR stat)	3.07E-13			
Obs with Dep=0	783	Total obs	816	
Obs with Dep=1	33			

LAMPIRAN 9

**OUTPUT EViews EXPECTATION PREDICTION TABLE
MODEL LOGIT KEMISKINAN
GABUNGAN DAERAH PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI PROVINSI GORONTALO
(MODEL II, TARAF NYATA (α) = 0,2 DAN CUT OFF 0,5)**

Dependent Variable: MISKIN

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 11/28/07 Time: 20:27

Sample: 1 3356

Included observations: 3356

Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5)

	Estimated Equation			Constant Probability		
	Dep=0	Dep=1	Total	Dep=0	Dep=1	Total
P(Dep=1)≤C	1958	448	2406	2216	1140	3356
P(Dep=1)>C	258	692	950	0	0	0
Total	2216	1140	3356	2216	1140	3356
Correct	1958	692	2650	2216	0	2216
% Correct	88.36	60.70	78.96	100.00	0.00	66.03
% Incorrect	11.64	39.30	21.04	0.00	100.00	33.97
Total Gain*	-11.64	60.70	12.93			
Percent Gain**	NA	60.70	38.07			

	Estimated Equation			Constant Probability		
	Dep=0	Dep=1	Total	Dep=0	Dep=1	Total
E(# of Dep=0)	1728.32	487.68	2216.00	1463.25	752.75	2216.00
E(# of Dep=1)	487.68	652.32	1140.00	752.75	387.25	1140.00
Total	2216.00	1140.00	3356.00	2216.00	1140.00	3356.00
Correct	1728.32	652.32	2380.65	1463.25	387.25	1850.49
% Correct	77.99	57.22	70.94	66.03	33.97	55.14
% Incorrect	22.01	42.78	29.06	33.97	66.03	44.86
Total Gain*	11.96	23.25	15.80			
Percent Gain**	35.21	35.21	35.21			

*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification

**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation

LAMPIRAN 10

**OUTPUT EIEWS EXPECTATION PREDICTION TABLE
 MODEL LOGIT KEMISKINAN DAERAH PERDESAAN
 DI PROVINSI GORONTALO
 (MODEL II, TARAF NYATA (α) = 0,2 DAN CUT OFF 0,5)**

Dependent Variable: MISKIN
 Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)
 Date: 11/28/07 Time: 20:26
 Sample: 1 2540
 Included observations: 2540
 Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5)

	Estimated Equation			Constant Probability		
	Dep=0	Dep=1	Total	Dep=0	Dep=1	Total
P(Dep=1)≤C	1177	412	1589	1433	1107	2540
P(Dep=1)>C	256	695	951	0	0	0
Total	1433	1107	2540	1433	1107	2540
Correct	1177	695	1872	1433	0	1433
% Correct	82.14	62.78	73.70	100.00	0.00	56.42
% Incorrect	17.86	37.22	26.30	0.00	100.00	43.58
Total Gain*	-17.86	62.78	17.28			
Percent Gain**	NA	62.78	39.66			

	Estimated Equation			Constant Probability		
	Dep=0	Dep=1	Total	Dep=0	Dep=1	Total
E(# of Dep=0)	973.40	459.60	1433.00	808.46	624.54	1433.00
E(# of Dep=1)	459.60	647.40	1107.00	624.54	482.46	1107.00
Total	1433.00	1107.00	2540.00	1433.00	1107.00	2540.00
Correct	973.40	647.40	1620.80	808.46	482.46	1290.92
% Correct	67.93	58.48	63.81	56.42	43.58	50.82
% Incorrect	32.07	41.52	36.19	43.58	56.42	49.18
Total Gain*	11.51	14.90	12.99			
Percent Gain**	26.41	26.41	26.41			

*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification

**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation

LAMPIRAN 11

**OUTPUT EVIEWS EXPECTATION PREDICTION TABLE
 MODEL LOGIT KEMISKINAN DAERAH PERKOTAAN
 DI PROVINSI GORONTALO
 (MODEL II, TARAF NYATA (α) = 0,2 DAN CUT OFF 0,5)**

Dependent Variable: MISKIN
 Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)
 Date: 11/28/07 Time: 20:25
 Sample: 1 816
 Included observations: 816
 Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5)

	Estimated Equation			Constant Probability		
	Dep=0	Dep=1	Total	Dep=0	Dep=1	Total
P(Dep=1)<=C	781	25	806	783	33	816
P(Dep=1)>C	2	8	10	0	0	0
Total	783	33	816	783	33	816
Correct	781	8	789	783	0	783
% Correct	99.74	24.24	96.69	100.00	0.00	95.96
% Incorrect	0.26	75.76	3.31	0.00	100.00	4.04
Total Gain*	-0.26	24.24	0.74			
Percent Gain**	NA	24.24	18.18			

	Estimated Equation			Constant Probability		
	Dep=0	Dep=1	Total	Dep=0	Dep=1	Total
E(# of Dep=0)	758.25	24.75	783.00	751.33	31.67	783.00
E(# of Dep=1)	24.75	8.25	33.00	31.67	1.33	33.00
Total	783.00	33.00	816.00	783.00	33.00	816.00
Correct	758.25	8.25	766.50	751.33	1.33	752.67
% Correct	96.84	24.99	93.93	95.96	4.04	92.24
% Incorrect	3.16	75.01	6.07	4.04	95.96	7.76
Total Gain*	0.88	20.95	1.69			
Percent Gain**	21.83	21.83	21.83			

*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification

**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation